

LAPORAN KINERJA 2025

ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA LAYANAN KHUSUS

**AYO
OLAHRAGA**



KEMENPORA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK, BERSATU, BERPRESTASI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Sebagai unit kerja yang memiliki mandat dalam pengembangan Olahraga Layanan Khusus, pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan untuk mendorong prinsip inklusivitas, yaitu memastikan akses dan partisipasi berolahraga bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, warga binaan, anak jalanan serta lapisan masyarakat lainnya yang memerlukan layanan khusus. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga serta mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan olahraga nasional. Dalam meningkatkan kesejahteraan bangsanya, Indonesia menunjukkan komitmen melalui kebijakan strategis sejalan dengan visi misi pembangunan nasional. Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam merancang regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus selama Tahun 2025 sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel. LKj ini memuat capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan di bidang olahraga layanan khusus.

“Olahraga yang mendukung inklusivitas adalah kegiatan olahraga yang memberikan akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok berkebutuhan khusus, untuk berpartisipasi sesuai kemampuan dan kebutuhannya”.

RINGKASAN EKSEKUTIF



Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) melalui Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga khususnya Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus (Asdep OLK) memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan olahraga yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Olahraga inklusif dipandang sebagai instrumen penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok yang memerlukan layanan khusus, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, warga binaan, anak jalanan serta lapisan masyarakat lainnya.

Dalam rangka mendukung prinsip inklusivitas, Asdep OLK melaksanakan berbagai program fasilitasi dan pembinaan olahraga yang berorientasi pada peningkatan akses, kesetaraan kesempatan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan olahraga. Pelaksanaan program dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi olahraga, lembaga pendidikan, serta mitra strategis lainnya guna memastikan keberlanjutan dan dampak yang optimal.

Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kualitas hidup, serta integrasi sosial kelompok sasaran, sekaligus mendukung agenda pembangunan olahraga nasional yang selaras dengan kebijakan pemerintah dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pendekatan ini, Kemenpora RI menegaskan komitmennya dalam menjadikan olahraga sebagai sarana pemersatu dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat.

Laporan Kinerja (LKj) Asdep OLK Tahun 2025 menggambarkan berbagai upaya dan kinerjanya guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada outcome yang dijabarkan ke dalam sasaran program, yaitu:

1. Meningkatnya layanan olahraga yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Binaan;
2. Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani.

Capaian kinerja Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Tahun 2025 menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga layanan khusus serta penguatan kualitas layanan yang inklusif. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui fasilitasi, pembinaan, dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah.

Asdep OLK melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang selaras dengan arah pembangunan olahraga yang inklusif serta mendukung Rencana Strategis 2025–2029. Realisasi anggaran Tahun 2025 mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dengan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung output dan outcome program yang berdampak langsung pada kelompok sasaran olahraga layanan khusus.

Hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program olahraga layanan khusus pada periode berikutnya. Berikut gambaran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Asdep OLK pada tahun 2025:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	Meningkatnya layanan olahraga yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Binaan	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir	11,67%	8,24 % (BPS 2021)
		Persentase penduduk lanjut usia yang berolahraga dalam seminggu terakhir	18,49%	17,77% (Susenas 2024)
		Persentase warga binaan lapas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	36,71%	97,11%
		Provinsi dengan Olahraga Layanan Khusus yang Terbina dan Berkembang	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus yang Tersusun	1 NSPK	1 NSPK
		Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	8.700 Orang	9.011 Orang

2	Terselenggaranya Layanan Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang Berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani	Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang tersusun dan dimanfaatkan	2 Dokumen	2 Dokumen
		Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	99,50%	99,60%
		Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	100%	100,9%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	90	91,45
		Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	70	52,97
PAGU			Rp.13.000.000.000	

Dalam rangka mendukung pengukuran capaian indikator kinerja, pada tahun 2025 dilakukan penghitungan persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan aktivitas olahraga dalam satu minggu terakhir. Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengambilan sampel sebanyak 400 responden yang berasal dari peserta Festival Olahraga Disabilitas (FOD), Special Olympics Indonesia (SOIna), dan National Paralympic Committee (NPC) DKI Jakarta. Dengan hasil survey bahwa 93,523% penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas melakukan olahraga seminggu terakhir. Namun nilai ini hanya menggambarkan responden yang menjadi sampel dan tidak dapat menggambarkan capaian nasional maupun wilayah tertentu. Sehingga data yang digunakan adalah base line 2021 dari BPS yang menyatakan bahwa 8,24% penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas melakukan olahraga seminggu terakhir.

Selain itu, dilakukan pula penghitungan persentase warga binaan yang melakukan olahraga dalam satu minggu terakhir yang dilaksanakan di Rumah Tahanan (Rutan) Bandung, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Bandung, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Bandung, serta Rutan Mamuju dengan total sampel sebanyak 176 responden. Hasil survey yang didapat menyatakan bahwa 97,11% warga binaan lapas melakukan olahraga dalam seminggu terakhir. Data yang diperoleh menjadi dasar penting dalam menilai tingkat partisipasi olahraga pada kelompok sasaran olahraga layanan khusus serta dalam merumuskan kebijakan dan program peningkatan layanan olahraga yang lebih tepat sasaran ke depan.

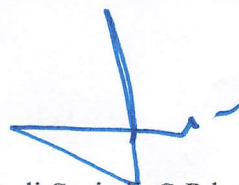
Dalam rangka menjamin tata kelola kearsipan yang akuntabel, penilaian hasil pengawasan kearsipan dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada umumnya dilaksanakan melalui audit kearsipan internal oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal yang dibentuk oleh Menteri Pemuda dan Olahraga serta difasilitasi oleh Unit Kearsipan selaku Biro Keuangan dan Umum.

Pada Tahun 2025, penilaian hasil pengawasan kearsipan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus dilaksanakan secara langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pengawasan kearsipan sesuai dengan wilayah kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pengawasan tersebut meliputi aspek penetapan kebijakan kearsipan, pelaksanaan pembinaan kearsipan, serta pengelolaan arsip, sebagai upaya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kearsipan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas organisasi.

Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang mendorong pengembangan olahraga yang inklusif, adil, dan berkelanjutan serta mendukung capaian indikator yang signifikan. Pelaksanaan kegiatan menggambarkan berbagai upaya dan kinerjanya guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada outcome.

Jakarta, 31 Desember 2025

Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus,



Dadi Surjadi, S.Pd., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
C. Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur	6
D. Potensi Permasalahan.....	7
E. Potensi Permasalahan Indikator Kinerja.....	8
F. Sistematika Pelaporan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis dan Pohon Kinerja.....	11
B. Rencana Kinerja.....	13
C. Indikator Kinerja Utama	16
D. Perjanjian Kinerja	17
E. Postur Anggaran.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Pengukuran Kinerja	21
B. Capaian Kinerja	24
C. Realisasi Anggaran.....	40
D. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	41
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang.....	43
LAMPIRAN	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tes Kebugaran.....	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi	5
Gambar 1.3 Struktur Tim Kerja	6
Gambar 1.4 Sistematisa Pelaporan	10
Gambar 2.1 Pohon Kinerja	13
Gambar 3.1 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran 2021-2025.....	41



KEMENPORA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Aparatur	6
Tabel 1.2 Indikator Kinerja	8
Tabel 2.1 Rencana Kinerja	14
Tabel 2.2 Rincian Output	15
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama	17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja	18
Tabel 2.5 Pagu Anggaran	20
Tabel 3.1 Kriteria Pengukuran Kinerja	22
Tabel 3.2 Rencana Aksi.....	24
Tabel 3.3 Capaian Kinerja.....	25
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja.....	27
Tabel 3.5 Indikator Kinerja 1	28
Tabel 3.6 Indikator Kinerja 2	30
Tabel 3.7 Indikator Kinerja 3	31
Tabel 3.8 Indikator Kinerja 4	33
Tabel 3.9 Indikator Kinerja 5	34
Tabel 3.10 Indikator Kinerja 6	35
Tabel 3.11 Indikator Kinerja 7	36
Tabel 3.12 Indikator Kinerja 8	37
Tabel 3.13 Indikator Kinerja 9	38
Tabel 3.14 Indikator Kinerja 10	39
Tabel 3.15 Indikator Kinerja 11	39
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran.....	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional bidang olahraga. LKJ disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja dengan kebijakan strategis nasional.

Dalam periode pembangunan nasional 2025–2029, arah kebijakan pembangunan olahraga mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang merupakan tahapan awal pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing sebagai salah satu prioritas utama. Olahraga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, partisipasi sosial, serta pembentukan karakter bangsa. Dalam konteks tersebut, pembangunan olahraga tidak hanya diarahkan pada peningkatan prestasi, tetapi juga pada perluasan partisipasi masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Sejalan dengan Rencana Strategis, pelaksanaan pembangunan olahraga nasional juga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). DBOB menjadi kerangka kebijakan jangka panjang pembangunan olahraga Indonesia yang menekankan pengembangan olahraga secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. DBOB juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan olahraga nasional, termasuk dalam upaya memperluas akses dan kesempatan berolahraga bagi seluruh warga negara.

Dalam kerangka kebijakan tersebut, Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya layanan olahraga yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas, masyarakat lanjut usia, serta kelompok masyarakat lainnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan olahraga. Prinsip inklusivitas menjadi landasan utama dalam perumusan dan pelaksanaan program Olahraga Layanan Khusus, agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga, sebagai inovasi Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus (Asdep OLK) melakukan Tes Kebugaran bagi para peserta pada pelaksanaan Festival. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemetaan kondisi kebugaran jasmani peserta secara *sampling*. Melalui tes kebugaran tersebut, diperoleh gambaran awal mengenai tingkat kebugaran peserta yang menjadi dasar dalam menilai dampak kegiatan olahraga layanan khusus berpedoman pada regulasi, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perencanaan program pembinaan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan inklusif.

Pelaksanaan tes kebugaran bagi penyandang disabilitas tetap menggunakan Rockport Walking Test, yaitu uji kebugaran kardiorespirasi berbasis aktivitas berjalan sejauh 1 mil ($\pm 1,6$ km) di lintasan datar dengan kecepatan maksimal tanpa berlari. Selama pelaksanaan tes, waktu tempuh dicatat dan denyut nadi peserta diukur segera setelah selesai untuk memperkirakan kapasitas aerobik. Tes ini relatif aman, mudah diterapkan, serta sesuai bagi peserta dengan kondisi fungsional tertentu dengan pendampingan petugas yang kompeten.

Pengukuran kebugaran bagi lansia dilakukan menggunakan rangkaian Senior Fitness Test, yang secara khusus mencakup beberapa item, yaitu Chair Stand Test untuk menilai kekuatan otot tungkai bawah, Chair Sit and Reach untuk mengukur fleksibilitas tubuh bagian bawah, serta 8 Foot Up and Go Test untuk menilai kelincahan dan keseimbangan dinamis. Setiap item dilakukan dalam durasi atau jarak tertentu sesuai pedoman pelaksanaan, seperti jumlah repetisi dalam 30 detik atau waktu tercepat untuk menyelesaikan lintasan, sehingga memberikan gambaran fungsional mengenai kemampuan fisik lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Pengukuran kebugaran bagi anak jalanan difokuskan pada pengukuran komponen utama kebugaran jasmani, yaitu fleksibilitas, kekuatan dan daya tahan otot, koordinasi gerak, serta daya tahan kardiorespirasi. Instrumen yang digunakan meliputi V Sit and Reach untuk menilai fleksibilitas, Sit Up 60 Detik untuk mengukur daya tahan otot perut, Squat Thrust 30 Detik untuk menilai kekuatan dan koordinasi gerak, serta PACER Test untuk mengukur kapasitas kardiorespirasi melalui aktivitas lari bolak-balik bertahap. Rangkaian tes ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi fisik peserta dan menjadi dasar dalam penyusunan program pembinaan yang lebih tepat sasaran.

Adapun pengukuran kebugaran bagi warga binaan dilaksanakan menggunakan kombinasi beberapa instrumen, yaitu 3 Minutes Step Test untuk menilai daya tahan jantung dan paru melalui aktivitas naik-turun bangku selama tiga menit, 30 Second Sit to Stand

untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot tungkai, 1 Minute Crunch Test untuk menilai daya tahan otot perut, serta Bent Knee Push Up untuk mengukur kekuatan otot lengan dan bahu. Pelaksanaan beberapa item tes tersebut memungkinkan diperolehnya gambaran komprehensif mengenai kondisi kebugaran fisik warga binaan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan serta keterbatasan sarana di lingkungan pemasyarakatan.



Gambar 1.1 Tes Kebugaran

Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus mengacu dan berpedoman pada regulasi yang mengatur dan terkait dengan laporan kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 1. Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 68 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Eselon 1 dan Eselon 2 di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor I Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Susunan Organisasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Penyusunan LKj Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kemenpora 2025–2029, DBON, serta regulasi sebagai kerangka kebijakan nasional, serta mengintegrasikan prinsip inklusivitas sebagai nilai utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan. LKj ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program, serta kontribusi Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus dalam mendukung pembangunan olahraga nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga bagian Keenam Pasal 82-83, Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus memiliki tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang olahraga layanan khusus.

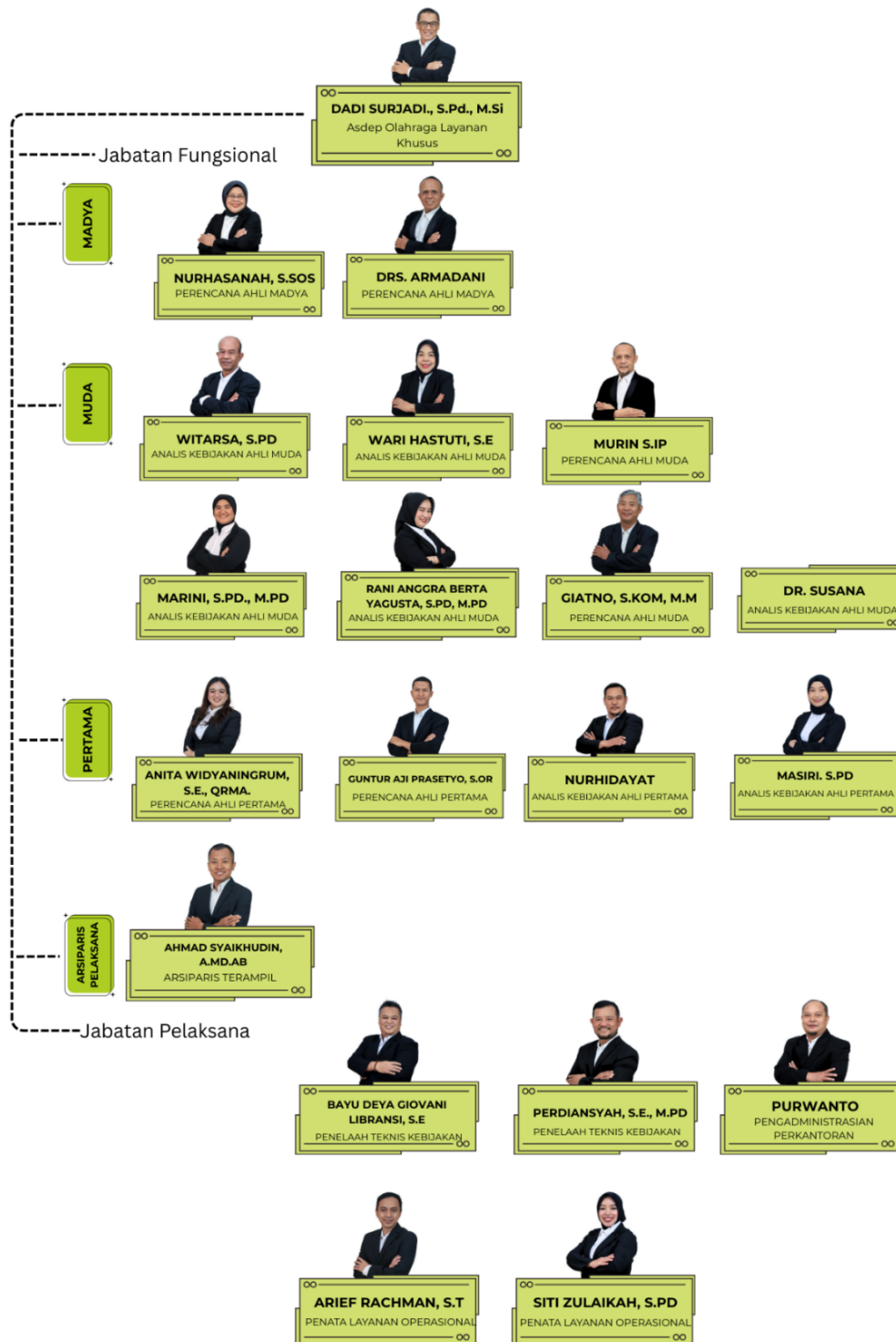
2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang olahraga layanan khusus;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga layanan khusus;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga layanan khusus;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga layanan khusus; dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
5. Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga layanan khusus.

3. Struktur Organisasi



Gambar 1.2 Struktur Organisasi

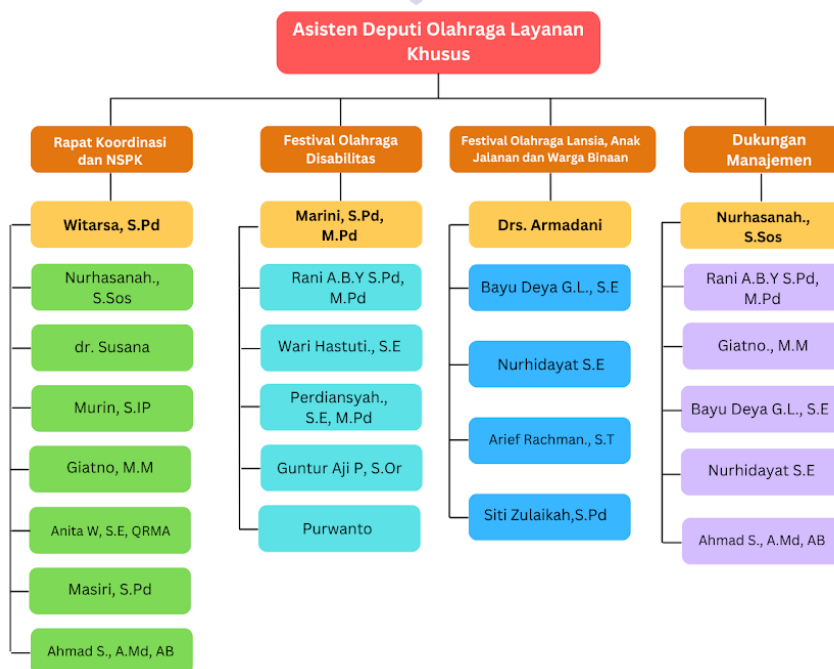
C. Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, menyatakan bahwa Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 16 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 4 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

No	Jabatan	Jumlah ASN	
		PNS	PPPK
1	Perencana Ahli Madya	2	
2	Perencana Ahli Muda	2	
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	5	
4	Perencana Ahli Pertama	2	
5	Analisis Kebijakan Ahli Pertama		2
6	Penelaah Teknis Kebijakan	2	
7	Pengadministrasian Perkantoran	1	
8	Penata Layanan Operasional		2

Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus membentuk tim kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas terbagi dalam 4 (empat) tim kerja sebagai berikut:



Gambar 1.3 Struktur Tim Kerja

D. Potensi Permasalahan

1. Potensi Permasalahan SDM di Asdep Olahraga Layanan Khusus

- Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Asisten Deputy Olahraga Layanan Khusus saat ini didominasi oleh jabatan fungsional muda sebanyak 7 orang dan jabatan pelaksana sebanyak 5 orang, sementara jabatan fungsional madya hanya berjumlah 2 orang. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan ketersediaan tenaga ahli senior yang memiliki kapasitas strategis, sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja pelayanan publik, khususnya dalam pelaksanaan analisis yang bersifat kompleks, kegiatan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Di sisi lain, tingginya proporsi ASN pada jabatan pelaksana menyebabkan upaya penyederhanaan birokrasi belum berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, ke depan diperlukan dorongan dan fasilitasi bagi ASN/PNS untuk beralih dan mengembangkan karier melalui jabatan fungsional. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan dan perizinan, menghilangkan pola pikir linier, monoton, serta ketergantungan pada zona nyaman, sekaligus mendorong terwujudnya iklim birokrasi yang adaptif, produktif, dan inovatif.
- Beberapa nama yang tercantum dalam Surat Tugas Tim Kerja belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Selain itu, pembagian SDM belum sepenuhnya disesuaikan dengan kompetensi dan keahlian individu. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya kinerja tim serta pencapaian sasaran kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali penugasan SDM agar seluruh pegawai dapat melaksanakan tugas sesuai dengan Tim Kerja yang telah ditetapkan serta selaras dengan kompetensi masing-masing. Penataan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja sasaran kegiatan, yaitu *“Terselenggaranya Layanan Asisten Deputy Olahraga Layanan Khusus yang Berkinerja Efektif, Profesional, dan Melayani.”*
- Komunikasi yang kurang efektif masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. Kurangnya keselarasan informasi antar pihak terkait berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan lini masa perencanaan Asisten Deputy Olahraga Layanan Khusus. Kondisi tersebut turut

memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga sebagian kegiatan belum dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Selain itu, faktor administratif, seperti keterlambatan dalam pengalokasian anggaran dan ketersediaan sumber daya, juga menjadi kendala yang menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan;

- Kurangnya sinergi antar tingkatan jabatan menimbulkan kesenjangan koordinasi antara peran strategis, teknis, dan operasional. Di Asdep OLK, jumlah Ahli Madya yang terbatas belum sebanding dengan beban tugas strategis yang meliputi perumusan kebijakan, analisis, dan penyusunan arah kebijakan tahunan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan tambahan bagi Ahli Madya yang didukung oleh peran Ahli Muda, Ahli Pertama, serta dukungan teknis dari Jabatan Pelaksana.

E. Potensi Permasalahan Indikator Kinerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, olahraga berperan menanamkan nilai moral dan sportivitas, memperkuat persatuan, serta mengangkat martabat bangsa. Oleh karena itu, pengembangannya perlu dirancang secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam kerangka agenda strategis nasional. Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) mengatur pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional bahwa perlu bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga pembangunan di bidang keolahragaan menjadi sistematis dan berkelanjutan. Hal ini terus dikembangkan guna memastikan inklusivitas, terutama dalam mendorong partisipasi aktif kelompok penyandang disabilitas, lansia, dan binaan lainnya. Melalui pendekatan ini, pembudayaan olahraga tidak hanya menjadi urusan kebugaran semata, tetapi juga instrumen pembentukan masyarakat yang sehat dan setara.

Tabel 1.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target
Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun ke atas yang melakukan Olahraga Seminggu terakhir	11,67%
Persentase penduduk lanjut usia yang berolahraga dalam seminggu terakhir	18,49%
Persentase warga binaan lapas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	36,71%

Indikator Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun ke atas yang melakukan Olahraga Seminggu terakhir termasuk Program Prioritas Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Penyandang Disabilitas, RPJMN 2025-2029. Selanjutnya dasar

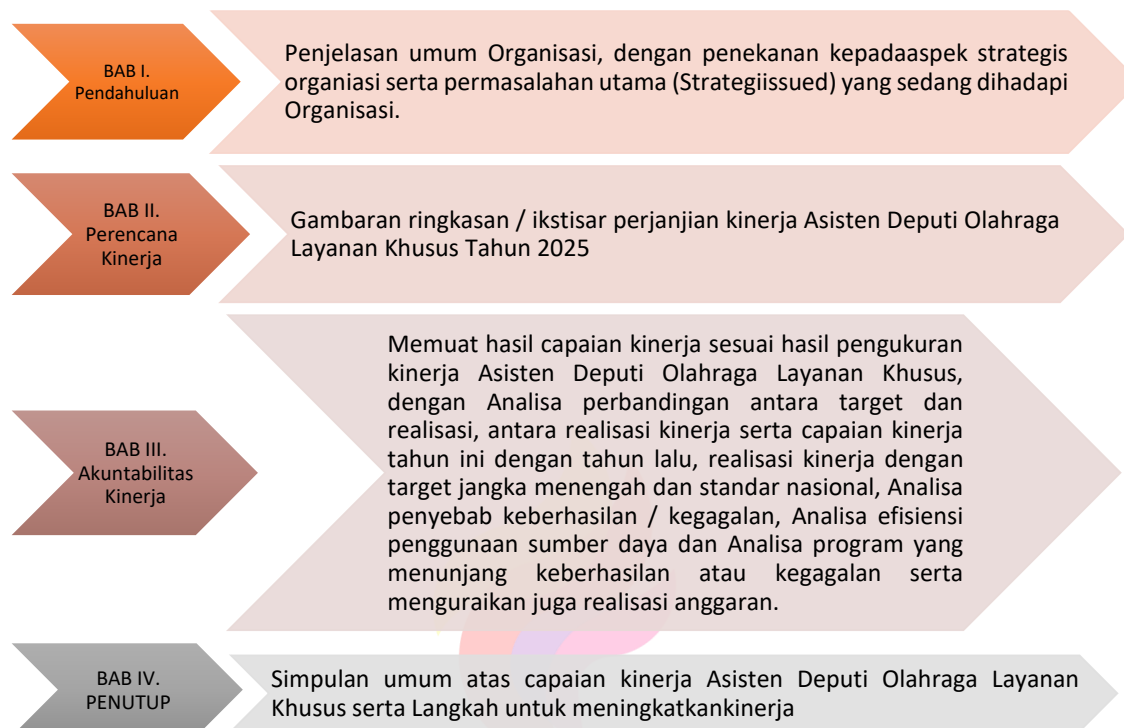
indikator persentase penduduk lanjut usia yang berolahraga dalam seminggu terakhir menunjukkan hanya 17,7% (2024) berdasarkan Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) 2024. Target yang dimiliki pada tahun ini berjumlah 18,49%. Sedangkan persentase warga binaan lapas yang melakukan olahraga seminggu terakhir berasal dari persentase total jumlah warga binaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebesar 36,71%.

Dasar yang dimiliki pada Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun ke atas yang melakukan Olahraga Seminggu terakhir nasional 8,24% (2021) dan target pada tahun ini 11,67%. Ditambah dengan data BPS 2024 mencatat bahwa Indonesia memiliki masyarakat penyandang disabilitas lebih dari 17,8 juta penyandang disabilitas. Dalam mengawal implementasinya, Asdep OLK mengemban peran strategis sebagai pengampu Program Prioritas Nasional ke-4 sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Ketiga indikator ini merupakan indikator kinerja berskala nasional yang diukur melalui survei nasional dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lintas sektor, lintas wilayah, serta partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks tersebut, unit kerja berperan sebagai kontributor terhadap pencapaian indikator nasional melalui pelaksanaan program peningkatan kampanye berolahraga dan pembinaan Olahraga Layanan Khusus bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan program diarahkan untuk meningkatkan akses, kesempatan, dan partisipasi kelompok sasaran terhadap aktivitas olahraga, baik melalui kegiatan terfasilitasi maupun pembinaan komunitas olahraga disabilitas.

Capaian kinerja unit kerja diukur melalui indikator antara, seperti peningkatan partisipasi berolahraga pada kelompok sasaran, yang secara tidak langsung mendukung peningkatan partisipasi olahraga penyandang disabilitas secara nasional. Capaian indikator nasional tidak sepenuhnya berada dalam kendali unit kerja, namun unit berkontribusi secara langsung melalui peningkatan partisipasi kelompok sasaran kegiatan. Partisipasi olahraga khususnya bagi penyandang disabilitas, lansia, dan warga binaan lainnya juga masih menghadapi tantangan dalam peningkatan partisipasi. Keterbatasan akses dan jangkauan kampanye olahraga, fasilitas pendukung yang minim, rendahnya literasi fisik masyarakat, serta dominasi gaya hidup pasif akibat teknologi dan hiburan, dapat menjadi beberapa tantangan di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Unit eselon II berperan melalui peningkatan akses dan partisipasi pada wilayah dan sasaran program yang difasilitasi.

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, adalah sebagai berikut :



Gambar 1.4 Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis dan Pohon Kinerja

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis disusun sebagai alat untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara arah kebijakan nasional di bidang olahraga dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada tingkat operasional. Pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus indikator yang disusun merupakan turunan langsung dari Rencana Strategis Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2025, yang berorientasi pada peningkatan budaya berolahraga masyarakat dan penguatan tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.

Pada tingkat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, terdapat dua Sasaran Program utama, yaitu **(1) Meningkatkan budaya masyarakat dalam berolahraga** dan **(2) Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional**. Sasaran Program pertama menekankan peningkatan partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat, yang diukur melalui persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir serta Indeks Kebugaran Jasmani Masyarakat. Sasaran Program kedua menekankan penguatan kinerja birokrasi melalui indikator serapan anggaran, nilai kinerja anggaran, indeks kepuasan masyarakat, dan hasil pengawasan kearsipan.

Sebagai bagian dari struktur Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus berperan strategis dalam memastikan bahwa peningkatan budaya berolahraga tersebut menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, Sasaran Program tersebut diturunkan ke dalam dua Sasaran Kegiatan utama pada tingkat Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus.

Sasaran Kegiatan pertama adalah **“Meningkatnya layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok binaan lainnya.”** Sasaran ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak berolahraga secara setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan warga binaan pemasyarakatan. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator persentase penduduk penyandang disabilitas dan lanjut usia

yang berolahraga dalam seminggu terakhir, persentase warga binaan lapas yang berolahraga, jumlah provinsi yang memiliki dan mengembangkan olahraga layanan khusus, tersusunnya kebijakan pengembangan olahraga layanan khusus, serta jumlah peserta kampanye olahraga layanan khusus yang terfasilitasi dalam peningkatan partisipasi dan kebugaran jasmani. Indikator-indikator tersebut tidak hanya mengukur aktivitas, tetapi juga menilai dampak nyata layanan olahraga inklusif terhadap perubahan perilaku dan tingkat kebugaran kelompok sasaran.

Sasaran Kegiatan kedua adalah **“Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang berkinerja efektif, profesional, dan melayani.”** Sasaran ini berfokus pada penguatan tata kelola dan kualitas penyelenggaraan layanan agar pelaksanaan olahraga layanan khusus dapat berjalan secara optimal, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pencapaian sasaran ini diukur melalui jumlah standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang tersusun dan dimanfaatkan, persentase serapan anggaran, persentase capaian output, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Asisten Deputi, serta hasil pengawasan kearsipan. Indikator tersebut memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan layanan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.

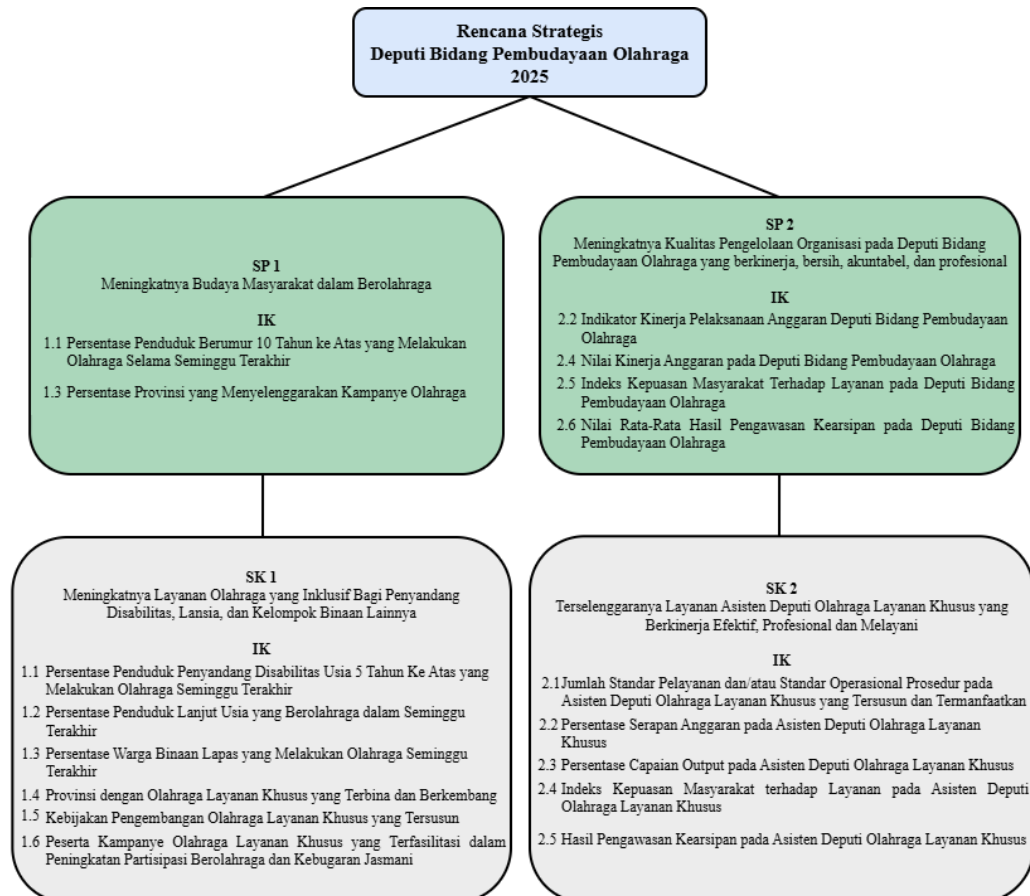
Secara keseluruhan, ini menggambarkan keterkaitan yang utuh antara tujuan strategis nasional dalam membudayakan olahraga dengan upaya operasional yang berfokus pada inklusivitas dan penguatan tata kelola. Melalui pohon kinerja ini, diharapkan peningkatan partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat, khususnya kelompok disabilitas, lansia, dan kelompok binaan, dapat terwujud secara berkelanjutan, seiring dengan terbangunnya sistem layanan olahraga yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2. Pohon Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu visual yang digunakan untuk memetakan hubungan antara tujuan strategis organisasi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pohon kinerja membantu organisasi memahami struktur logika sebab-akibat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Elemen-elemen utama dalam pohon kinerja adalah: Tujuan utama (outcome), Hasil antara (intermediate outcome), Output, Proses, Input.

Pohon kinerja dapat membantu organisasi dalam:

- Mengetahui rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru.
- Memastikan bahwa berbagai elemen organisasi berhubungan satu sama lain dalam mencapai kinerja yang diinginkan.



Gambar 2.1 Pohon Kinerja

B. Rencana Kinerja

Rencana kinerja adalah rencana yang berisi target kinerja yang akan DiCaprio dalam satu tahun. Rencana ini merupakan penjabaran dari Renstra Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2025-2029 sampai dengan turunannya yang ada dalam Perjanjian Kinerja Asisten Deputy Olahraga Layanan Khusus. Perjanjian Kinerja memuat kegiatan, indikator kinerja, target, dan realisasi. Perjanjian Kinerja dibuat untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya dalam jangka waktu tertentu.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola sistem perencanaan yang berkualitas, partisipatif, akuntabel dan konsisten diperlukan rencana kinerja sebagai instrumennya. Formulasi kebijakan dalam bentuk perencanaan ketika memasuki tahapan implementasi

kebijakan sampai pada monitoring dan evaluasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk rencana kinerja. Matriks rencana kinerja dapat menjadi pedoman dalam membantu Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus untuk mencapai tujuan, karena jelas tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang menjadi pedoman setiap bagian/tim. Matriks rencana kinerja menggambarkan dengan jelas sasaran kegiatan, indikator kinerja beserta target dan outcome sehingga sudah semakin jelas arah kebijakan yang menjadi dasar dalam mengimplementasi program kegiatan. Uraian rencana kinerja tersaji berikut ini:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Outcome
Meningkatnya Layanan Olahraga yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Binaan Lainnya	1.1	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir	11,67 Persen	Meningkatnya partisipasi penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas dalam melakukan aktivitas olahraga secara rutin
	1.2	Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Berolahraga Seminggu Terakhir	18,49 Persen	Meningkatnya partisipasi penduduk lanjut usia dalam melakukan aktivitas olahraga untuk mendukung kesehatan dan kebugaran jasmani
	1.3	Persentase Warga Binaan Lapas yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir	36,71 Persen	Meningkatnya partisipasi warga binaan lembaga pemasyarakatan dalam melakukan aktivitas olahraga guna mendukung kesehatan fisik dan mental
	1.4	Provinsi dengan olahraga layanan khusus yang terbina dan berkembang	1 Kegiatan	Meningkatnya jumlah provinsi dengan pembinaan olahraga layanan khusus yang terbina
	1.5	Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus yang Tersusun	1 NSPK	Meningkatnya jumlah kebijakan yang dijadikan acuan dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder atau pemangku kepentingan terkait
	1.6	Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	8.700 Orang	Meningkatnya jumlah peserta kampanye olahraga layanan khusus yang terfasilitasi
Terselenggaranya Layanan Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang Berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani	2.1	Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Olahraga Layananan Khusus yang tersusun dan termanfaatkan	2 Dokumen	Meningkatnya kualitas tata kelola layanan melalui tersedianya standar pelayanan dan/atau SOP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
	2.2	Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	1 Persen	Tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran
	2.3	Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	100 Persen	Terpenuhinya target pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan
	2.4	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	90 Indeks	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan asisten deputi olahraga layanan khusus
	2.5	Hasil Pengawasan Kearsiapan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	70 Indeks	Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pengelolaan arsip dalam mendukung akuntabilitas kinerja organisasi

Sebagai bentuk Rencana Kerja Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga melaksanakan 4 (empat) Rincian Output yang akan dicapai oleh organisasi Tahun Anggaran 2025:

1. RO 1 : Koordinasi

Terdiri dari 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output yaitu Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus.

2. RO 2 : Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

Terdiri dari 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output yaitu Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus Yang Tersusun.

3. RO 3 : Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Terdiri dari 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output yaitu Lembaga Olahraga Layanan Khusus Yang Terfasilitasi Sarana.

4. RO 4 : Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

Terdiri dari 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output yaitu Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dan diturunkan untuk 4 (empat) domain kegiatan, yakni Festival Olahraga Disabilitas, Festival Olahraga Lansia, Festival Olahraga Warga Binaan, dan Festival Olahraga Anak Jalanan. Dalam Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat terdapat Program Pengembangan Olahraga Layanan Khusus yang merupakan upaya fasilitasi yang diberikan kepada 21 lembaga masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan, antara lain Festival Olahraga Lansia, Festival Olahraga Disabilitas, serta Festival Olahraga Warga Binaan. Selain kegiatan berbasis partisipasi tersebut, program ini juga mencakup pemberian fasilitasi sarana olahraga kepada 16 lembaga masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekosistem olahraga di tingkat komunitas. Melalui rangkaian fasilitasi tersebut, program Pengembangan Olahraga Layanan Khusus diarahkan untuk meningkatkan akses dan kesempatan berolahraga bagi kelompok sasaran layanan khusus, memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta mendorong terbentuknya kebiasaan hidup aktif dan sehat. Pendekatan ini sekaligus memperkuat peran lembaga masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan olahraga yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Tabel 2.2 Rincian Output

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2025	
JUMLAH SELURUHNYA		13.000.000.000	12.953.005.870	99,64 %
DA	Program Keolahragaan	13.000.000.000	12.953.005.870	99,64 %
DA.3820	Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	13.000.000.000	12.953.005.870	99,64 %
AEA	Koordinasi	192.000.000	192.000.000	100,00 %
AEA.001	Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	192.000.000	192.000.000	100,00 %
052	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	192.000.000	192.000.000	100,00 %
052.0A	Koordinasi	192.000.000	192.000.000	100,00 %
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	200.000.000	199.200.000	99,60 %
AFA.001	NSPK Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	200.000.000	199.200.000	99,60 %
052	Penyusunan NSPK Bidang Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	200.000.000	199.200.000	99,60 %
052.0A	Penyusunan Pedoman Festival Olahraga Layanan Khusus	200.000.000	199.200.000	99,60 %
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	534.000.000	534.000.000	100,00 %
BDB.001	Bantuan Pemerintah untuk Sarana Olahraga Layanan Khusus	534.000.000	534.000.000	100,00 %
051	Penyaluran Bantuan Sarana Kepada Lembaga Olahraga Layanan Khusus	534.000.000	534.000.000	100,00 %
051.0A	Penyaluran Bantuan	482.000.000	482.000.000	100,00 %
051.0B	Monitoring dan Evaluasi	52.000.000	52.000.000	100,00 %
QD C	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	12.074.000.000	12.027.805.870	99,62 %
QDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus	12.074.000.000	12.027.805.870	99,62 %
051	Persiapan dan Koordinasi Festival/Pekan/Kejuaraan Olahraga Layanan Khusus	213.510.000	211.542.870	99,08 %
051.0A	Rapat Koordinasi Festival/Pekan/Kejuaraan Olahraga Layanan Khusus	213.510.000	211.542.870	99,08 %
052	Festival/Pekan/Kejuaraan Olahraga Layanan Khusus	7.968.586.000	7.925.938.745	99,46 %
052.0A	Festival Olahraga Disabilitas	4.028.399.000	4.020.963.000	99,82 %
052.0B	Festival Olahraga Lansia	3.230.367.000	3.198.241.000	99,01 %
052.0C	Festival Olahraga di LP/Rumah Singgah/Lapisan Masyarakat Lainnya	709.820.000	706.734.745	99,57 %
053	Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	3.891.904.000	3.890.324.255	99,96 %
053.0A	Sosialisasi dan Publikasi Olahraga Layanan Khusus	3.734.400.000	3.732.820.255	99,96 %
053.0B	Koordinasi Strategis Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	157.504.000	157.504.000	100,00 %

C. Indikator Kinerja Utama

Dalam upaya melaksanakan pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual Indikator Kinerja pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama adalah:

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik:

- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama memiliki fungsi, sebagai berikut:

- Menjadi landasan utama penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada setiap level organisasi.
- Memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan program/kegiatan dan dalam menilai kinerja Kemenpora dan unit kerja di bawahnya.
- Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja Kemenpora dan unit kerja.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Layanan Olahraga yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Binaan Lainnya	1.1	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir	11,67%	12,53%	13,39%	14,24%	15,10%
	1.2	Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Berolahraga Seminggu Terakhir	18,49%	19,28%	20,08%	20,87%	21,66%
	1.3	Persentase Warga Binaan Lapas yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir	36,71%	39,41%	42,11%	44,80%	47,50%
	1.4	Provinsi dengan olahraga layanan khusus yang terbina dan berkembang	1	1	1	1	1
	1.5	Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus yang Tersusun	1	1	1	1	1
	1.6	Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi	8.700	9.000	9.500	10.000	10.700
Terselenggaranya Layanan Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang Berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani	2.1	Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang tersusun dan dimanfaatkan	2	2	2	2	2
	2.2	Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	99,50%	99,60%	99,70%	99,80%	99,90%
	2.3	Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	100%	100%	100%	100%	100%
	2.4	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	90	90,1	90,2	90,3	90,4
	2.5	Hasil Pengawasan Kearsiapan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	70	72	73	74	75

D. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, diwajibkan menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan sasaran strategis dengan memuat indikator kinerja dan target kinerja untuk melaksanakan program/kegiatan. Perjanjian kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya, sehingga target kinerja dari Perjanjian Kinerja dapat mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, mengakibatkan terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja. Perjanjian kinerja mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi. Pengukuran pencapaian perjanjian kinerja akan dilakukan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk evaluasi dari hasil pelaksanaan perjanjian kinerja yang dimaksud.

Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus telah membuat perjanjian kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada bulan Mei 2025 dan diperbarui kembali pada Juli 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Olahraga yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas, Lansia, dan	1.1 Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir	11,67%

	Kelompok Binaan Lainnya	1.2	Persentase Penduduk Lanjut Usia Yang Berolahraga Dalam Seminggu Terakhir	18,49%
		1.3	Persentase Warga Binaan Lapas Yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir	36,71%
		1.4	Provinsi dengan Olahraga Layanan Khusus yang Terbina dan Berkembang	1 Kegiatan
		1.5	Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus yang Tersusun	1 NSPK
		1.6	Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	8.700 Orang
		2	Terselenggaranya Layanan Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang Berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani	2.1
2.2	Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus			99,5%
2.3	Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus			100%
2.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus			90
2.5	Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus			70

E. Postur Anggaran

Jumlah Anggaran pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 13.000.000.000 (Tiga Belas Miliar Rupiah). Dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Pagu Anggaran

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu	
1	Koordinasi Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	1	Kegiatan	Rp	192.000.000
2	Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus Yang Tersusun	1	NSPK	Rp	200.000.000
3	Fasilitasi dan Pembinaan kepada Lembaga untuk Sarana Olahraga Layanan Khusus	16	Lembaga	Rp	534.000.000
4	Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	8700	Orang	Rp	12.074.000.000
Jumlah					Rp13.000.000.000



KEMENPORA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pelaksanaan kinerja dilakukan dengan berorientasi kepada rencana aksi yang telah disusun dengan mengacu kepada sasaran kinerja pegawai (SKP). Data dituangkan kedalam bentuk file word/excel/file lainnya yang menjelaskan terkait deskripsi kegiatan, timeline kegiatan, jadwal dan kebutuhan kegiatan lainnya. masing–masing data kegiatan dikumpulkan dalam bentuk soft copy dan hard copy.

Sistem Penilaian

Pengukuran kinerja menggunakan sistem Reward dan Punishment guna memotivasi pegawai agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Tujuan adanya sistem reward dan punishment yaitu agar dapat terus memacu pegawai berprestasi serta bekerja sesuai dengan sasaran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dinilai melalui e-Kinerja BKN serta laporan singkat yang disampaikan pada grup komunikasi asdep/bidang masing-masing.

Ruang Lingkup Kerja Pegawai

Eselon II

Mengkoordinasikan, merumuskan, menyelenggarakan, menetapkan pelaksanaan kegiatan.

Ketua Tim

Menyiapkan, memverifikasi bahan pelaksanaan kegiatan.

Anggota

Mengumpulkan, mengelompokan dan mengarsipkan bahan pelaksanaan kegiatan

1. Kriteria Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mengacu pada Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Persentase Realisasi pencapaian target yang diberi penilaian sesuai dengan kriteria target yang dicapai.

Tabel 3.1 Kriteria Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Layanan Olahraga yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Binaan Lainnya	1.1 Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir	11,67%	8,24% (BPS 2021)	70,60%	BB
		1.2 Persentase penduduk lanjut usia yang berolahraga dalam seminggu terakhir	18,49%	17,77% (Susenas 2024)	96,10%	AA
		1.3 Persentase warga binaan lapas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	36,71%	97,11% (Survey Mandiri)	264,53%	AA
		1.4 Provinsi dengan Olahraga Layanan Khusus yang Terbina dan Berkembang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	AA
		1.5 Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus yang Tersusun	1 NSPK	1 NSPK	100%	AA
		1.6 Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	8.700 Orang	9.011 Orang	103,57%	AA

2	Terselenggaranya Layanan Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang Berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani	2.1	Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang tersusun dan termanfaatkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	AA
		2.2	Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	99,5%	99,6%	101%	AA
		2.3	Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	100%	100,9%	100,9%	AA
		2.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	90	91,45	101,61%	AA
		2.5	Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	70	52,97	75,67%	BB

Keterangan Kriteria:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| AA : Nilai > 90–100 (Sangat Memuaskan) | CC : Nilai > 50 – 60 (Cukup) |
| A : Nilai > 80 – 90 (Memuaskan) | C : Nilai > 30 – 50 (Kurang) |
| BB : Nilai > 70 – 80 (Sangat Baik) | D : Nilai > 0 – 30) (Sangat Kurang) |
| B : Nilai > 60 – 70 (Baik) | |

2. Rencana Aksi

Untuk melakukan Pengukuran Kinerja, terlebih dahulu harus menyusun Rencana Aksi kegiatan sepanjang tahun 2025 yang dituangkan dalam sebuah tabel berikut :

Tabel 3.2 Rencana Aksi

NO.	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (PK 2025)	TARGET	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PELAKSANAAN	RENCANA AKSI
1.1	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir	11,67%	3820.QDC.001 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Festival Olahraga Disabilitas	Tingkat penyandang disabilitas Usia 5 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir	29-1 Agustus 2025 (Bangka Belitung), 14-18 Juli (Banten), 28-1 Agustus (Pekalongan), 4-8 Agustus (Maluku Utara),	1. Melaksanakan koordinasi dan persiapan; 2. menyelenggarakan Bimtek dan Festival; 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
1.2	Persentase penduduk lanjut usia yang berolahraga dalam seminggu terakhir	18,49%	3820.QDC.001 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Festival Olahraga Lanjut Usia	Tingkat penduduk lanjut usia yang berolahraga dalam seminggu terakhir	22-25 Juli 2025 (NTB), 14-18 Juli (Banten), 21-25 Juli (Bandung), 11-15 (Sulawesi Selatan), 25-29 Agustus (NTB)	1. Melaksanakan koordinasi dan persiapan; 2. menyelenggarakan Bimtek dan Festival; 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
1.3	Persentase warga binaan lembaga pemasyarakatan yang melakukan olahraga seminggu terakhir	36,71%	3820.QDC.001 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Festival Olahraga di LP/Rumah Singgah/Lapisan Masyarakat Lainnya	Tingkat warga binaan lembaga pemasyarakatan yang melakukan olahraga seminggu terakhir	18-22 Agustus 2025	1. Melaksanakan koordinasi dan persiapan; 2. menyelenggarakan Bimtek dan Festival; 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
1.4	Provinsi dengan Olahraga Layanan Khusus yang Terbina dan Berkembang	1 Kegiatan	3820.AEA.001 - Koordinasi Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	Meningkatnya Provinsi dengan Olahraga Layanan Khusus yang Terbina dan Berkembang	18-20 Juli 2025	1. Melaksanakan koordinasi dan persiapan; 2. menyelenggarakan Bimtek dan Festival; 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
1.5	Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus yang Tersusun	1 NSPK	3820.AFA.001 - Kebijakan Pengembangan Olahraga Penyandang Layanan Khusus Yang Tersusun Penyusunan NSPK Bidang Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	Meningkatnya Naskah Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus yang Tersusun	10-12 Agustus 2025	1. Melaksanakan koordinasi dan persiapan; 2. menyelenggarakan Bimtek dan Festival; 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
1.6	Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	8.700 Orang	3820.QDC.001 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	Meningkatnya persentase Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	Juli - November	1. Melaksanakan koordinasi dan persiapan; 2. menyelenggarakan Bimtek dan Festival; 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
2.1	Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang tersusun dan dimanfaatkan	2 Dokumen	Menyusun 1 (satu) Standar Pelayanan dan 1 (satu) Standar Operasional Prosedur	Meningkatnya jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang tersusun dan dimanfaatkan	Juli - Agustus	Evaluasi SP dan SOP dari Biro SDMO
2.2	Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	99,5%	Pemantauan dan evaluasi atas serapan anggaran	Meningkatnya persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	Juli - Desember	Pengisian Capaian Output yg tepat waktu dan selaras
2.3	Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	100%	Pemantauan dan evaluasi capaian output	Meningkatnya persentase capaian output pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	Juli - Desember	Pengisian Capaian Output yg tepat waktu dan selaras
2.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	90	Pemantauan dan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	April - Desember	Monitoring dan evaluasi rutin terhadap tindak lanjut hasil SKM
2.5	Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	70	Pemantauan dan evaluasi atas hasil pengawasan kearsipan	Meningkatnya nilai hasil pengawasan kearsipan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	April - Desember	Pengarsipan data pada Asdep OLK

B. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang ditetapkan dalam PK 2025 dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Capaian Kinerja

Tabel 3.3 Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Kriteria
1.1	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir	11,67%	8,24% (Data BPS 2021)	70,60%	BB
1.2	Persentase penduduk lanjut usia yang berolahraga dalam seminggu terakhir	18,49%	17,77% (Data Susenas BPS 2024)	96,10%	AA
1.3	Persentase warga binaan lapas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	36,71%	97,11 (Perhitungan Mandiri dengan sebaran instrument survey)	264,53%	AA
1.4	Provinsi dengan Olahraga Layanan Khusus yang Terbina dan Berkembang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	AA
1.5	Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus yang Tersusun	1 NSPK	1 NSPK	100%	AA
1.6	Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	8.700 Orang	9.011 Orang	103,57%	AA
2.1	Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang tersusun dan termanfaatkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	AA
2.2	Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	99,5%	99,6%	101%	AA
2.3	Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	100%	100,9%	100,9%	AA
2.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	90	91,45	101,61%	AA
2.5	Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	70	52,97	75,67%	BB
Rata-rata Capaian (1213,98/11)				110,36%	AA

Target :

Capaian Kinerja diatas, sebanyak 8 (delapan) output indikator dapat memenuhi capaian sasaran program/kegiatan sebesar 100% bahkan lebih. Output lainnya walaupun belum mencapai 100% tetapi sudah mendekati angka tersebut. Sehingga didapatkan rata-rata persentase Capaian Kinerja Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus tahun 2025 sebesar 110,36% dengan predikat Sangat Memuaskan (AA).

Efisiensi Operasional :

Dalam pelaksanaan kegiatan, efisiensi operasional juga dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan anggaran perjalanan dinas (perjadin) yang mensyaratkan bahwa pada saat dilakukan revisi anggaran, total pagu tidak mengalami perubahan. Revisi dilaksanakan semata-mata melalui penyesuaian alokasi antar komponen tanpa adanya penambahan anggaran baru maupun pengurangan pagu, sehingga secara prinsip tidak terdapat efisiensi operasional yang bersumber dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Meskipun demikian, target kinerja tetap dapat dicapai secara optimal melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan disiplin, sehingga dari total pagu sebesar Rp13.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp12.953.005.870, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp46.994.130 atau sekitar 0,36% dari total pagu. Sisa tersebut mencerminkan kehati-hatian dalam pelaksanaan belanja serta optimalisasi penggunaan sumber daya, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program dan pencapaian output yang telah ditetapkan.

Dampak Positif :

Program-program yang dilaksanakan diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas untuk berolahraga, sebagai baseline hasil Susenas BPS tahun 2021.

Pengakuan Eksternal :

Setiap kegiatan Asdep Olahraga Layanan Khusus bekerjasama dengan media cetak maupun online untuk dapat secara masif memberitakan kegiatan yang telah dilaksanakan, hal ini sebagai langkah promosi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas serta hal ini juga menandakan kualitas dan kredibilitas kinerja yang dapat diakui secara luas.

Pada tahun 2025, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Berbagai program dan target yang telah direncanakan berhasil direalisasikan dengan baik, bahkan beberapa di antaranya melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi semua pihak yang terlibat. Implementasi strategi yang efektif, pengelolaan sumber daya yang optimal, serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan ini.

Keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan mempertahankan pencapaian di tahun-tahun mendatang. Fokus ke depan adalah memastikan keberlanjutan program, adaptasi terhadap tantangan baru, serta peningkatan inovasi untuk mendukung capaian yang lebih optimal.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Periode 2021 s.d 2025

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Perbandingan Capaian Kinerja									
				2021		2022		2023		2024		2025	
1	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir	11,67	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,24	70,61%
2	Persentase penduduk lanjut usia yang berolahraga dalam seminggu terakhir	18,49	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17,77	96,11%
3	Persentase warga binaan lepas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	36,71	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97,11	264,53%
4	Provinsi dengan Olahraga Layanan Khusus yang Terbina dan Berkembang	1	Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	100%
5	Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus yang Tersusun	1	NSPK	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100%	1	100%	1	100%
6	Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	8700	Orang	11770	135%	11274	130%	4600	53%	6510	75%	9011	104%
7	Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang tersusun dan bermanfaat	2	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	100%
8	Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	99,5	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99,6	101,00%
9	Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	100	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,90%	100,9%
10	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	90		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	91,45	101,61%
11	Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	70		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	52,97	75,67%
Rata-rata Capaian					117,50%		115%		84,29%		91,61%		110%

Selama periode 2021–2025, kinerja Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dalam hal kampanye olahraga disabilitas dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam olahraga. Capaian ini tidak hanya berorientasi pada prestasi tetapi juga bertujuan untuk menciptakan budaya olahraga di kalangan penyandang disabilitas, dengan menekankan pentingnya partisipasi berolahraga.

3. Pembahasan Capaian Kinerja Per-Indikator

Indikator Kinerja 1:

Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir (Target: 11,67%)

Tabel 3.5 Indikator Kinerja 1

No.	Indikator Kinerja	Target	Perbandingan Capaian Kinerja			
			2024		2025	
1	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir	11,67%	N/A	N/A	11,67%	8,24%

Persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga intensitas sedang minimal 150 menit dalam seminggu terakhir. Olahraga intensitas sedang adalah aktivitas fisik yang meningkatkan detak jantung dan pernapasan hingga tingkat yang membuat perasaan sedikit lebih tertantang, tetapi masih memungkinkan untuk berbicara dengan nyaman. Contohnya termasuk jalan cepat, bersepeda dengan kecepatan sedang, berenang, atau mengikuti kelas aerobik. Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah penduduk penyandang disabilitas berumur 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir terhadap jumlah penduduk penyandang disabilitas berumur 5 tahun ke atas. Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk penyandang disabilitas dalam pembudayaan olahraga di masyarakat yang pada gilirannya menghasilkan bibit-bibit talenta yang potensial menjadi olahragawan unggul untuk ditingkatkan prestasinya di tingkat regional dan internasional.

Dalam rangka mendukung pengukuran capaian indikator kinerja, pada tahun 2025 dilakukan penghitungan persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan aktivitas olahraga dalam satu minggu terakhir dengan target 11,67%. Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengambilan sampel sebanyak 400 responden yang berasal dari peserta Festival Olahraga Disabilitas (FOD), Special Olympics Indonesia (SOIna), dan National Paralympic Committee (NPC) DKI Jakarta. Dengan hasil survey bahwa 93,523% penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas melakukan olahraga seminggu terakhir. Namun nilai ini hanya menggambarkan responden yang menjadi sampel dan tidak dapat menggambarkan capaian nasional

maupun wilayah tertentu. Sehingga data yang digunakan adalah base line 2021 dari BPS yang menyatakan bahwa 8,24% penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas melakukan olahraga seminggu terakhir.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator persentase penyandang disabilitas yang melakukan aktivitas olahraga dalam satu minggu terakhir, Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus melaksanakan Festival Olahraga Disabilitas (FOD) sebagai sarana peningkatan partisipasi olahraga bagi kelompok sasaran tersebut. Kegiatan ini dirancang secara inklusif melalui pelaksanaan senam bersama, pengenalan berbagai cabang olahraga adaptif, antara lain para atletik, para catur, para tenis meja, para bulu tangkis, hingga boccia. Melalui rangkaian aktivitas tersebut, peserta didorong untuk terlibat aktif dalam kegiatan fisik sekaligus mengenal ragam pilihan olahraga yang sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing, sehingga dapat menumbuhkan kebiasaan berolahraga secara berkelanjutan.

Selain kegiatan partisipatif tersebut, dalam pelaksanaan FOD juga dilakukan pengukuran kebugaran jasmani bagi penyandang disabilitas menggunakan Rockport Walking Test. Tes ini dilaksanakan dengan aktivitas berjalan sejauh 1 mil ($\pm 1,6$ km) di lintasan datar pada kecepatan maksimal tanpa berlari, dengan pencatatan waktu tempuh serta pengukuran denyut nadi setelah tes selesai sebagai dasar penilaian kapasitas kardiorespirasi peserta. Pemilihan instrumen ini didasarkan pada pertimbangan aspek keselamatan, kemudahan pelaksanaan, serta kesesuaiannya dengan kondisi fungsional peserta, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program dan perencanaan kegiatan pembinaan olahraga layanan khusus secara berkelanjutan.

Hambatannya adalah data yang digunakan masih merujuk pada tahun 2021 Badan Pusat Statistik, 2025 tidak ada data persentase disabilitas berolahraga dalam seminggu terakhir secara periodik. Solusi yang digunakan adalah data tahun 2021 yaitu 8.24%.

Indikator Kinerja 2:

Persentase penduduk lanjut usia yang berolahraga dalam seminggu terakhir

(Target: 18,49%)

Tabel 3.6 Indikator Kinerja 2

No.	Indikator Kinerja	Target	Perbandingan Capaian Kinerja			
			2024		2025	
2	Persentase penduduk lanjut usia yang berolahraga dalam seminggu terakhir	18,49%	N/A	N/A	18,49%	17,77%

Persentase penduduk lanjut usia berusia 60 tahun ke atas yang melakukan olahraga intensitas sedang minimal 150 menit dalam seminggu terakhir. Olahraga intensitas sedang adalah aktivitas fisik yang meningkatkan detak jantung dan pernapasan hingga tingkat yang membuat perasaan sedikit lebih tertantang, tetapi masih memungkinkan untuk berbicara dengan nyaman. Contohnya termasuk jalan cepat, bersepeda dengan kecepatan sedang, berenang, atau mengikuti kelas aerobik. Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang melakukan aktivitas olahraga dalam seminggu terakhir terhadap jumlah penduduk berumur 60 tahun ke atas. Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk lanjut usia dalam pembudayaan olahraga di masyarakat yang pada gilirannya mampu meningkatkan angka harapan hidup lansia. Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat dijalani seseorang sejak lahir.

Data Persentase Lanjut Usia Berolahraga dalam seminggu terakhir mempunyai target 18.49%. Hasil target capaian Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Lanjut Usia Berolahraga seminggu terakhir data Tahun 2024 menunjukkan 17.77% pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator persentase lansia yang melakukan aktivitas olahraga dalam satu minggu terakhir, Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus melaksanakan Festival Olahraga Lansia (FOL) sebagai wadah peningkatan partisipasi olahraga bagi kelompok lanjut usia. Kegiatan ini dirancang sebagai aktivitas massal yang mudah diikuti dan ramah lansia, antara lain melalui pelaksanaan jalan sehat, senam bersama, serta berbagai bentuk aktivitas fisik rekreatif lainnya yang mendorong keterlibatan aktif peserta. Melalui pendekatan partisipatif tersebut, FOL

tidak hanya berfungsi sebagai sarana kampanye hidup aktif, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kebiasaan berolahraga di kalangan lansia.

Selain kegiatan partisipatif tersebut, dalam pelaksanaan FOL juga dilakukan pengukuran kebugaran jasmani peserta menggunakan instrumen Senior Fitness Test. Rangkaian tes ini meliputi Chair Stand Test untuk menilai kekuatan otot tungkai, Chair Sit and Reach untuk mengukur fleksibilitas, serta 8 Foot Up and Go Test untuk menilai keseimbangan dan kelincahan gerak. Setiap item tes dilaksanakan sesuai pedoman dengan durasi dan prosedur yang terstandar, sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat kebugaran fungsional lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hasil pengukuran tersebut dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kegiatan serta penyusunan program pembinaan olahraga layanan khusus yang lebih tepat sasaran.

Hambatan dalam mencapai target lanjut usia berolahraga dalam seminggu terakhir yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Badan Pusat Statistik tidak bisa melaksanakan *update* hasil capaian lanjut usia berolahraga dalam seminggu terakhir. Solusi untuk hambatan yang dihadapi untuk hasil capaian Lanjut Usia berolahraga seminggu terakhir dengan menunggu *update* data dari Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Badan Pusat Statistik.

Indikator Kinerja 3:

Persentase warga binaan lembaga pemasyarakatan yang melakukan olahraga seminggu terakhir (Target: 36,71%)

Tabel 3.7 Indikator Kinerja 3

No.	Indikator Kinerja	Target	Perbandingan Capaian Kinerja			
			2024		2025	
3	Persentase Warga Binaan yang berolahraga dalam seminggu terakhir	36,71%	N/A	N/A	36,71%	97,11%

Persentase warga binaan pemasyarakatan yang melakukan olahraga intensitas sedang minimal 150 menit dalam seminggu terakhir. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah istilah yang merujuk pada narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan yang sedang menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau lembaga pembinaan khusus anak. Mereka adalah individu yang telah dijatuhi hukuman pidana atau sedang dalam proses pembinaan di bawah

pengawasan sistem peradilan pidana. Olahraga intensitas sedang adalah aktivitas fisik yang meningkatkan detak jantung dan pernapasan hingga tingkat yang membuat perasaan sedikit lebih tertantang, tetapi masih memungkinkan untuk berbicara dengan nyaman. Contohnya termasuk jalan cepat, bersepeda dengan kecepatan sedang, berenang, atau mengikuti kelas aerobik.

Persentase warga binaan yang melakukan olahraga seminggu terakhir mempunyai target 36.71%. Hasil target capaian Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Warga Binaan Berolahraga dalam seminggu terakhir datanya belum ada di Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik sehingga Asdep OLK melakukan survey mandiri kepada 176 responden dari Rutan Bandung, LPP Bandung, LPKA Bandung, dan Rutan Mamuju. Dari hasil survey tersebut didapatkan bahwa 97,11% warga binaan melakukan olahraga dalam seminggu terakhir.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator persentase warga binaan yang melakukan aktivitas olahraga dalam satu minggu terakhir, Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus melaksanakan Festival Olahraga Warga Binaan (FOWB) sebagai sarana peningkatan partisipasi olahraga di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui senam bersama serta pertandingan berbagai cabang olahraga rekreatif, seperti futsal dan voli, yang dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif peserta sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan gaya hidup sehat. Melalui pelaksanaan FOWB, warga binaan diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur sebagai bagian dari upaya pembinaan jasmani dan mental.

Selain kegiatan partisipatif tersebut, dalam pelaksanaan FOWB juga dilakukan pengukuran kebugaran jasmani warga binaan menggunakan serangkaian instrumen yang sesuai dengan kondisi lapangan, yaitu 3 Minutes Step Test, 30 Second Sit to Stand, 1 Minute Crunch Test, serta Bent Knee Push Up. Rangkaian tes tersebut digunakan untuk menilai daya tahan kardiorespirasi, kekuatan dan daya tahan otot tungkai, otot perut, serta otot lengan dan bahu. Hasil pengukuran ini menjadi dasar evaluasi kondisi fisik warga binaan sekaligus bahan perencanaan program pembinaan olahraga layanan khusus yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Hambatannya data Warga Binaan Lapas tidak ada data pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik. Solusi untuk mendapatkan Data Persentase Warga Binaan berolahraga Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus melakukan perhitungan cepat dengan cara mendistribusikan Instrumen Survei kepada Warga Binaan walaupun data ini tidak dapat mencerminkan data nasional.

Indikator Kinerja 4:

Provinsi dengan Olahraga Layanan Khusus yang Terbina dan Berkembang (Target: 1 Kegiatan)

Tabel 3.8 Indikator Kinerja 4

No.	Indikator Kinerja	Target	Perbandingan Capaian Kinerja			
			2024		2025	
4	Provinsi dengan Olahraga Layanan Khusus yang Terbina dan Berkembang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

Kegiatan bertujuan meningkatkan olahraga layanan khusus melalui koordinasi lintas sektoral dalam hal Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus pada tingkat provinsi.

Untuk menjalankan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dengan stakeholder, Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus memanfaatkan rapat kegiatan koordinasi persiapan dan koordinasi penyelenggaraan Festival/Pekan Olahraga pada program kampanye olahraga. Dalam rapat koordinasi tersebut selain membahas persiapan kegiatan kampanye olahraga juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan pengembangan program olahraga layanan khusus.

Realisasi sasaran program Provinsi dengan Olahraga Layanan Khusus yang terbina tercapai 100 % dari target 1 kegiatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat perubahan dimana pada tahun sebelumnya hanya berfokus pada Penyandang Disabilitas, sedangkan pada tahun 2025 terdapat perubahan SOTK menjadi olahraga layanan khusus yang menaungi olahraga disabilitas, lanjut usia, warga binaan, anak jalanan dan lapisan masyarakat lainnya.

Permasalahan yang dihadapi adalah perlunya pencapaian tujuan organisasi Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus melalui pelaksanaan koordinasi lintas sektor yang efektif. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa perubahan kebijakan pimpinan yang berdampak pada perubahan lokus kegiatan. Meskipun demikian, melalui koordinasi yang berjalan dengan baik antar pemangku kepentingan terkait, tujuan organisasi Asdep OLK tetap dapat tercapai, khususnya dalam mendukung terselenggaranya kegiatan festival sesuai dengan rencana.

Indikator Kinerja 5:

Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus yang Tersusun (Target: 1 NSPK)

Tabel 3.9 Indikator Kinerja 5

No.	Indikator Kinerja	Target	Perbandingan Capaian Kinerja			
			2024		2025	
5	Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus yang Tersusun	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK

Penyusunan naskah kebijakan dan regulasi yang menangani terkait dengan pengembangan, pengelolaan serta pembangunan sistem olahraga berkelanjutan bagi Olahraga Layanan Khusus. Penyusunan NSPK dilakukan oleh para akademisi, praktisi olahraga, organisai olahraga dan juga stakeholder. NSPK ini akan dijadikan panduan dan pedoman terhadap kebijakan Olahraga Layanan Khusus bagi pemangku kepentingan Olahraga Layanan Khusus baik ditingkat pusat maupun daerah. Pada prinsipnya kegiatan penyusunan NSPK dapat diselesaikan dan mencapai target yang telah ditentukan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah durasi waktu yang relatif singkat serta jumlah peserta yang masih terbatas karena harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Sebagai solusi, diperlukan perpanjangan durasi pelaksanaan kegiatan serta perluasan jumlah dan cakupan peserta, sehingga dapat memberikan kesempatan yang lebih merata dan mampu mewakili komunitas yang sebelumnya belum terundang.

Indikator Kinerja 6:

Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani (Target: 8.700 Orang)

Tabel 3.10 Indikator Kinerja 6

No.	Indikator Kinerja	Target	Perbandingan Capaian Kinerja			
			2024		2025	
6	Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	8.700 Orang	N/A	N/A	8700 Orang	9.011 Orang

Indikator ini menunjukkan jumlah peserta yang mengikuti kampanye olahraga layanan khusus yang berasal dari penyandang disabilitas, lanjut usia, warga binaan, dan anak jalanan.

Kegiatan ini terdiri dari bimbingan teknis dan festival olahraga layanan khusus terdiri dari festival olahraga lansia, festival olahraga disabilitas, festival olahraga warga binaan, dan festival olahraga anak jalanan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja antara lain waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif berdekatan antar festival sehingga berdampak pada keterbatasan waktu persiapan dan koordinasi. Selain itu, prasarana kegiatan di beberapa sekolah atau lokasi pelaksanaan masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan teknis kegiatan. Faktor eksternal berupa kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi juga turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan, khususnya untuk aktivitas luar ruang.

Sebagai solusi, diperlukan penjadwalan kegiatan yang lebih terstruktur dan terdistribusi dengan baik antar festival untuk memberikan waktu persiapan yang memadai. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah perlu didukung dengan koordinasi awal serta penyesuaian desain kegiatan. Selain itu, perlu disiapkan rencana mitigasi cuaca, seperti alternatif lokasi indoor, penyesuaian waktu pelaksanaan, serta kesiapan logistik pendukung, agar kegiatan tetap dapat berjalan efektif dan indikator kinerja dapat tercapai secara optimal.

Indikator Kinerja 7:

Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang tersusun dan termanfaatkan (Target: 2 Dokumen)

Tabel 3.11 Indikator Kinerja 7

No.	Indikator Kinerja	Target	Perbandingan Capaian Kinerja			
			2024		2025	
7	Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang tersusun dan termanfaatkan	2 Dokumen	N/A	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar Operasional Prosedur (SOP) serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.

Permasalahan yang dihadapi adalah adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Pada tahun 2024 hanya berfokus pada layanan olahraga disabilitas, kemudian mengalami penyesuaian pada tahun 2025. Kondisi tersebut berdampak pada proses perencanaan dan penyusunan kebijakan. Selain itu, pelaksanaan penyusunan juga terkendala oleh keterlambatan penetapan DIPA. Meskipun demikian, sebagai solusi, Forum Konsultasi Publik (FKP) telah berhasil dilaksanakan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang diamanatkan dalam dukungan manajemen telah tersusun dan dapat diimplementasikan.

Indikator Kinerja 8:

Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus (Target: 99,5%)

Tabel 3.12 Indikator Kinerja 8

No.	Indikator Kinerja	Target	Perbandingan Capaian Kinerja			
			2024		2025	
8	Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	99,50%	N/A	N/A	99,5%	99,6%

Persentase Serapan Anggaran adalah indikator kinerja yang menggambarkan tingkat realisasi penggunaan anggaran dibandingkan dengan total alokasi yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan layanan yang menjadi tanggung jawab unit kerja, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran di Asdep Olahraga Layanan Khusus. Serapan anggaran terupdate dalam aplikasi e-monev, kinerja kemenpora, sakti, dan sirup.

Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus berhasil mencapai nilai serapan anggaran sebesar 99,6%, dari target yang ditetapkan untuk T.A 2025 sebesar 99,5%. Realisasi belanja berjalan optimal, hal ini menunjukkan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif.

Permasalahan yang dihadapi adalah terjadinya keterlambatan pada beberapa paket pekerjaan, meskipun pada akhirnya dapat dikejar dan diselesaikan pada akhir Triwulan IV (TW IV). Sebagai solusi, diperlukan perbaikan strategi mitigasi risiko sejak tahap perencanaan awal, khususnya dalam menyelaraskan rencana realisasi kegiatan. Selain itu, percepatan penyelesaian administrasi perlu dilakukan agar capaian target kinerja dapat lebih optimal seiring dengan penyerapan anggaran yang efisien dan tepat waktu.

Indikator Kinerja 9:

Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus (Target: 100%)

Tabel 3.13 Indikator Kinerja 9

No.	Indikator Kinerja	Target	Perbandingan Capaian Kinerja			
			2024		2025	
9	Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	100%	N/A	N/A	100,9%	100,9%

Persentase Capaian Output adalah indikator kinerja yang menggambarkan tingkat ketercapaian target keluaran dari program dan kegiatan Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang telah direncanakan dibandingkan dengan realisasi yang berhasil diwujudkan, sehingga mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus dalam menghasilkan output sesuai sasaran yang ditetapkan, serta menjadi dasar evaluasi untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh. Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, yaitu sebesar 100,9%.

Permasalahan yang sering dihadapi adalah keterlambatan dukungan data atau dokumen sumber yang berasal dari aplikasi SAKTI Modul Komitmen dan MONEV-PA OMSPAN, sehingga berdampak pada ketepatan waktu pelaksanaan pelaporan dan administrasi. Sebagai solusi, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antar unit kerja terkait agar ketersediaan data dapat lebih tepat waktu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Indikator Kinerja 10:

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus (Target: 90)

Tabel 3.14 Indikator Kinerja 10

No.	Indikator Kinerja	Target	Perbandingan Capaian Kinerja			
			2024		2025	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	90	N/A	N/A	90	91,45

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus telah melebihi target Tahun 2025 dari 90 % mendapat capaian 91,45 % dengan target data populasi 361 mendapat 404.

Hambatan yang dihadapi oleh peserta lansia, penyandang disabilitas, anak jalanan, dan warga binaan adalah keterbatasan dalam penggunaan gawai/HP untuk mengisi kuesioner secara mandiri akibat rendahnya literasi digital dan keterbatasan fungsional. Sebagai solusi, pengisian kuesioner dilakukan secara manual dan selanjutnya diinput oleh petugas agar seluruh data dapat terhimpun secara lengkap dan akurat.

Indikator Kinerja 11:

Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus (Target: 70)

Tabel 3.15 Indikator Kinerja 11

No.	Indikator Kinerja	Target	Perbandingan Capaian Kinerja			
			2024		2025	
11	Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	70	N/A	N/A	70	52,97

Pengawasan Kearsipan internal pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus dilaksanakan setiap tahunnya, hasil penilaian ini berdasarkan arsip tahun 2024 dan penilaiannya di tahun 2025 ini menjadi tugas penting untuk sadar arsip karena arsip tidak bisa dikerjakan hanya seorang tapi bersama-sama dalam unit kerja. Tahun ini mendapatkan nilai yang sebelumnya 69.43 menjadi 52.97 dikarenakan menjadi sampel pengawasan Eksternal Arsip Nasional Republik Indonesia.

Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan kearsipan terdapat beberapa aspek diantaranya :

- Terdapat lebih dari 0% s.d 50% naskah dinas tindak lanjuti melalui Srikandi mendapatkan nilai belum maksimal.
- Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tidak mendapatkan nilai dikarenakan belum ada BAST pemindahan arsip (kehilangan jejak dokumen arsip ditahun – tahun sebelumnya).
- Terdapat pengelola arsip tapi belum, melakukan pendidikan dan latihan sehingga nilai yang di dapat dari aspek ini belum maksimal.
- Belum melaksanakan pengendalian naskah dinas keluar.
- Terdapat arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis (SKKAD) aspek ini belum mendapatkan nilai maksimal dikarenakan SKKAD peminjaman belum menggunakan *Out Indikator/ google form*.

Solusi untuk meningkatkan penilaian arsip di tahun 2026 :

- Melaksanakan tindak lanjut surat masuk pada akun Srikandi Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus.
- Sudah memiliki arsip tahun 2025 untuk penilaian tahun 2026 untuk lebih baik lagi.
- Melaksanakan pendidikan latihan untuk pengelola arsip agar mendapatkan nilai maksimal pada penilaian aspek pengelola arsip.
- Melakukan pengendalian naskah masuk dan keluar dengan membuat buku agenda.
- Membuat *google form* untuk layanan peminjaman arsip pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus.

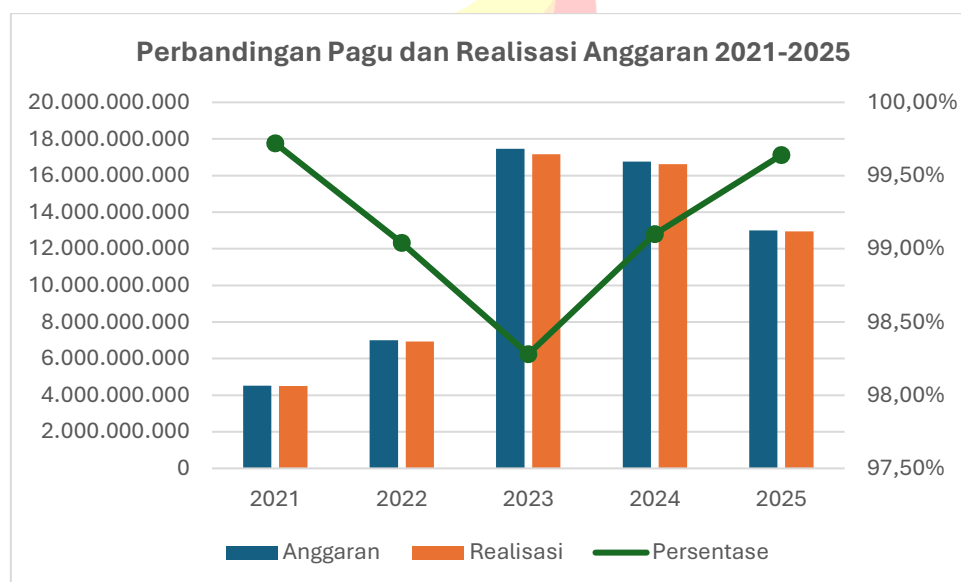
C. Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DIPA-092.01.1.418139/2025 adalah sebesar Rp13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah). Berikut data realisasi anggaran Asdep Olahraga Layanan Khusus Tahun Anggaran 2025 :

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU	REALISASI			
				KINERJA		ANGGARAN	
1	3820.AEA.001	1 Kegiatan	192.000.000	1 Kegiatan	100%	192.000.000	100,00%
	Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus						
2	3820.AFA.001	1 NSPK	200.000.000	1 NSPK	100%	199.200.000	99,60%
	NSPK Pengembangan Olahraga Layanan Khusus						
3	3820.BDB.001	16 Lembaga	534.000.000	16 Lembaga	100%	534.000.000	100,00%
	Bantuan Pemerintah untuk Sarana Olahraga Layanan Khusus						
4	3820.QDC.001	8.700 Orang	12.074.000.000	9,011 Orang	103,60%	12.027.805.870	99,62%
	Fasilitasi dan Pembinaan Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus						
Jumlah			13.000.000.000			12.953.005.870	99,64%

D. Analisis Efisiensi Sumber Daya



Gambar 3.1 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran 2021-2025

Pada Tahun 2021, pagu anggaran mengalami penyesuaian yang signifikan sebagai dampak dari pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19. Meskipun demikian, tingkat realisasi anggaran mencapai 99,72%, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan fokus yang kuat dalam pengelolaan anggaran serta kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program secara efektif.

Memasuki Tahun 2022, seiring dengan mulai dilonggarkannya pembatasan pandemi, pagu anggaran kembali mengalami peningkatan. Tingkat realisasi anggaran sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap berada di atas 99%. Capaian ini

mencerminkan stabilitas kinerja pengelolaan anggaran dan keberlanjutan pelaksanaan program meskipun terjadi penyesuaian dalam skala kegiatan.

Pada Tahun 2023, pagu anggaran mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu lebih dari dua kali lipat dibandingkan Tahun 2022. Kondisi ini menandai adanya ekspansi besar program, khususnya dalam pengembangan layanan olahraga disabilitas pascapandemi. Seiring dengan meningkatnya skala dan kompleksitas kegiatan, tingkat realisasi anggaran tercatat sebesar 98,28 persen. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut masih berada pada kategori sangat baik dan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tetap berjalan secara efektif.

Selanjutnya, pada Tahun 2024, pagu anggaran mengalami sedikit penurunan dibandingkan Tahun 2023, namun tetap berada pada tingkat yang relatif besar. Tingkat realisasi anggaran meningkat menjadi 99,10%, mencerminkan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang semakin matang setelah fase ekspansi besar pada tahun sebelumnya. Penguatan koordinasi, penjadwalan kegiatan yang terukur, serta peningkatan pengendalian pelaksanaan kegiatan turut berkontribusi terhadap capaian ini.

Pada Tahun 2025, selain terjadi penyesuaian pagu anggaran, juga terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), di mana unit kerja mengalami transformasi dari Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas menjadi Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025. Perubahan tersebut berdampak pada perluasan tugas dan fungsi organisasi yang tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas, tetapi juga mencakup layanan olahraga bagi lansia, anak jalanan, warga binaan, serta lapisan masyarakat lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2025. Meskipun terjadi penyesuaian organisasi dan perluasan cakupan layanan, realisasi anggaran pada Tahun 2025 tetap mendekati pagu yang tersedia dengan tingkat penyerapan yang tinggi. Hal ini menunjukkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan kebijakan sekaligus menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran pada periode 2021–2025 senantiasa berada di atas 98 persen. Kondisi ini mencerminkan kinerja efisiensi yang konsisten, di mana perencanaan dan pelaksanaan program telah dilakukan secara optimal meskipun terjadi fluktuasi pagu anggaran, dinamika kebijakan, serta perubahan struktur organisasi. Capaian tersebut menegaskan komitmen Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus dalam menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran guna mendukung pencapaian sasaran kinerja secara berkelanjutan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, kinerja Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **sangat memuaskan**, baik dari aspek pencapaian sasaran kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, maupun pengelolaan anggaran. Mayoritas indikator kinerja berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan persentase rata-rata capaian 110,36% yang berada pada kategori **sangat memuaskan**. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus telah berjalan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi nyata dalam mendorong peningkatan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok binaan lainnya. Selain itu, penyusunan kebijakan, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur telah mendukung penguatan tata kelola organisasi serta peningkatan kualitas layanan publik. Pengelolaan anggaran juga menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi, tercermin dari serapan anggaran yang optimal tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Capaian tersebut merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi antara seluruh jajaran Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dukungan lintas sektor yang berkelanjutan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan kinerja, seperti keterbatasan waktu, dinamika kebijakan, serta kendala administratif dan koordinasi, yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan program dan mitigasi risiko sejak tahap awal, penguatan koordinasi dan sinergi lintas unit kerja serta lintas sektor, serta optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam mendukung pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja.

Selain itu, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan terus dilakukan agar pelaksanaan tugas dapat lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran. Penguatan kebijakan, perluasan jangkauan layanan, serta inovasi dalam pelaksanaan program olahraga layanan khusus juga akan menjadi fokus utama guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan program.

Dengan komitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus optimistis dapat meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung terwujudnya pembangunan olahraga nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



KEMENPORA



LAMPIRAN

KEMENPORA



KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dadi Surjadi, S.Pd., M.Si.

Jabatan : Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Sri Wahyuni, S.T., M.Sc.

Jabatan : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2025

Pihak Kedua,

Dr. Sri Wahyuni, S.T., M.Sc.

Pihak Pertama,

Dadi Surjadi, S.Pd., M.Si.



KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA LAYANAN KHUSUS

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Olahraga yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Binaan Lainnya	1.1 Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun Ke Atas yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir	11,67%
		1.2 Persentase penduduk lanjut usia yang berolahraga dalam seminggu terakhir	18,49%
		1.3 Persentase warga binaan lapas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	36,71%
		1.4 Provinsi dengan Olahraga Layanan Khusus yang Terbina dan Berkembang	1 Kegiatan
		1.5 Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus yang Tersusun	1 NSPK
		1.6 Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	8.700 Orang
2	Terselenggaranya Layanan Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang Berkinerja Efektif, Profesional dan Melayani	2.1 Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang tersusun dan termanfaatkan	2 Dokumen
		2.2 Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	99,5%
		2.3 Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	100%
		2.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	90
		2.5 Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	70

Kegiatan

Pengembangan Olahraga Layanan Khusus

Anggaran

Rp 13.000.000.000

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga,



Dr. Sri Wahyuni, S.T., M.Sc.

Jakarta, Juli 2025
Asisten Deputi Olahraga Layanan
Khusus,



Dadi Surjadi, S.Pd., M.Si.

**STANDAR PELAYANAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA
OLAHRAGA LAYANAN KHUSUS**

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Fasilitasi yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga c.q. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; 2. Proposal Fasilitasi; 3. Kelengkapan Proposal.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan surat permohonan, proposal dan kelengkapan proposal fasilitasi dan pembinaan Olahraga Layanan Khusus melalui email persuratan.kemenpora.go.id; 2. Memperoleh nomor agenda pengajuan proposal melalui email persuratan.kemenpora.go.id; 3. Mendapat informasi penerimaan atau penolakan melalui asdepolk@kemenpora.go.id; <p>Apabila disetujui</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melengkapi dokumen administrasi; 5. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama; 6. Menerima fasilitasi melalui rekening yang telah disampaikan dalam proposal; 7. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari kerja sejak proposal diterima
4	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya oleh instansi
5	Produk Layanan	Dana Fasilitasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SP4N LAPOR! 2. Instagram @kemenpora

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelatihan Olahraga Layanan Khusus ramah disabilitas; 2. Ruangan Bimbingan Teknis nyaman dan memiliki pendingin ruangan (AC); 3. Lapangan terbuka untuk pelaksanaan Festival/Pekan/Kejuaraan; 4. Ruang ibadah; 5. Tempat parkir R2 dan R4; 6. Toilet bersih dan ramah disabilitas/lansia; 7. Akomodasi ramah disabilitas/lansia; 8. Juru Bahasa Isyarat (apabila diperlukan); 9. Audio atau <i>screen reader</i>;
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Pengawasan sistem pengendalian internal pemerintah oleh inspektorat; 3. Pengawasan atas kebenaran bukti-bukti pengeluaran/belanja, pembayaran pajak yang lengkap dan sah sesuai ketentuan; 4. Pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR! atau Instagram @kemenpora;
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang Olahraga Layanan Khusus; 2. Pendamping yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
5	Jumlah pelaksana	<p>10 (sepuluh) orang dengan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Kebijakan 2. Perencana

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Arsiparis 4. Penelaah Teknis Kebijakan
6	Jaminan Pelayanan	1. Petugas memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, mudah, lengkap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas tidak menerima suap, mengeluarkan ucapan, dan/atau isyarat untuk keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data informasi penerima bantuan pemerintah dijamin kerahasiaannya; 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 3. Tersedia Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK); 4. Pengawasan ruang layanan dengan CCTV; 5. Tersedia titik kumpul.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat setiap saat dalam 1 (satu) tahun; 3. Dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan; 4. Laporan kegiatan.

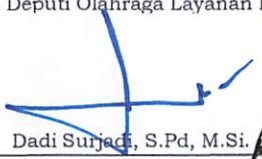
Jakarta, 12 November 2025
 Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus,



Dadi Surjadi., S.Pd., M.Si



**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARHAGA
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLARHAGA
ASISTEN DEPUTI OLARHAGA LAYANAN KHUSUS**

NOMOR SOP	: BO.02.03/8.4.4/D-II.4/VIII/2025
TGL. PEMBUATAN	: Juli 2025
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: Agustus 2025
DISAHKAN OLEH	: Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus  Dadi Surjadi, S.Pd, M.Si.
NAMA SOP	: Festival Olahraga Layanan Khusus

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
---------------------	-------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan 3. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; 5. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Susunan Organisasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Pedoman Pelaksanaan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat Olahraga Layanan Khusus seperti Festival Olahraga Disabilitas (FOD), Festival Olahraga Lansia (FOL), dan Festival Olahraga Warga Binaan/Anak Jalanan; 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Office
--	---















KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN:
---------------------	----------------------------------

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer / Laptop 3. Seminar Kit 4. Venue yang menunjang aksesibilitas Layanan Khusus
--	--

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
--------------------	----------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika kegiatan tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan tahapan SOP, maka pelayanan terhadap Festival Olahraga Layanan Khusus tidak terlaksana dengan baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip disimpan dalam bentuk elektronik dan non elektronik
---	--

SOP Penyelenggaraan Festival Olahraga Layanan Khusus

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Asisten Deputi	Ketua Tim	Anggota Tim	Pengelola Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan arahan/penugasan kepada Ketua Tim terkait pelaksanaan Festival Olahraga Layanan Khusus					Perjanjian Kinerja, DIPA/RKAKL, KAK	30 menit	Disposisi/ Penugasan	
2.	Menyusun rancangan kegiatan Festival Olahraga Layanan Khusus bersama anggota tim					Disposisi/ Penugasan	1 hari	Dokumen rancangan kegiatan FOLK	
3.	Melaksanakan rapat persiapan teknis Festival Olahraga Layanan Khusus					Dokumen rancangan kegiatan FOLK	1 hari	Notula	
4.	Melaporkan rancangan kegiatan Festival Olahraga Layanan Khusus kepada Asisten Deputi.					Notula	60 menit	Dokumen rancangan kegiatan FOLK hasil rapat teknis, notula	
5.	Memeriksa rancangan kegiatan Festival Olahraga Layanan Khusus. Apabila setuju, menugaskan Ketua Tim untuk menyiapkan proses administrasi dan berkoordinasi dengan stakeholders. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.		N 			Dokumen rancangan kegiatan FOLK hasil rapat teknis, notula	30 menit	Disposisi/ penugasan tindak lanjut	Koordinasi awal dengan stakeholders
6.	Menugaskan anggota tim untuk menyiapkan dokumen administrasi pelaksanaan Festival Olahraga Layanan Khusus dan mengoordinasikan tim Pengelola Keuangan untuk menyiapkan dokumen administrasi keuangan					Disposisi/ penugasan Asep untuk tindak lanjut	15 menit	Disposisi/ penugasan Ketua Tim	
7.	Menyiapkan konsep dokumen administrasi dan dokumen keuangan pelaksanaan Festival Olahraga Layanan Khusus dan melaporkan kepada Ketua Tim					Disposisi/ penugasan Ketua Tim	1 hari	Konsep Surat Pemberitahuan, ST, SK, Materi	
8.	Memeriksa konsep dokumen administrasi pelaksanaan Festival Olahraga Layanan Khusus. Jika setuju, maka diverifikasi/diparaf. Jika tidak setuju, maka dikembalikan untuk diperbaiki		N 			Konsep Surat Pemberitahuan, ST, SK, Materi	30 menit	Konsep Surat Pemberitahuan, ST, SK, Materi yang telah diverifikasi/paraf	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Asisten Deputi	Ketua Tim	Anggota Tim	Pengelola Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output		
9.	Memeriksa konsep dokumen administrasi dan dokumen keuangan pelaksanaan Festival Olahraga Layanan Khusus. Jika setuju, maka ditandatangani. Jika tidak setuju, maka dikembalikan untuk diperbaiki						Konsep Surat Pemberitahuan, ST, SK, Materi yang telah diverifikasi/ paraf	30 menit	Konsep Surat Pemberitahuan, ST, SK, Materi yang telah ditandatangani	
10.	Melakukan koordinasi dengan stakeholders					Konsep Surat Pemberitahuan, ST, SK, Materi yang telah ditandatangani	2 hari	Hasil koordinasi dengan stakeholders	Bentuk koordinasi: Survei venue, survei penyedia	
11.	Melaporkan hasil koordinasi kepada Asdep					Hasil koordinasi dengan stakeholders	60 menit	Laporan (dokumentasi, notula)		
12.	Menyelenggarakan bimbingan teknis persiapan kegiatan Festival Olahraga Layanan Khusus					Laporan (dokumentasi, notula)	1 hari	Dokumentasi dan notula kegiatan Bimtek		
13.	Menyelenggarakan kegiatan Festival Olahraga Layanan Khusus					Dokumentasi dan notula kegiatan Bimtek	1 hari	Dokumentasi dan notula kegiatan FOLK		
14.	Melakukan rapat evaluasi kegiatan Festival Olahraga Layanan Khusus					Dokumentasi dan notula kegiatan FOLK	2 jam	Notula hasil rapat evaluasi		
15.	Menyusun konsep Laporan Kegiatan Festival Olahraga Layanan Khusus					Notula hasil rapat evaluasi	1 hari	Konsep laporan kegiatan FOLK		
16.	Memeriksa konsep laporan Kegiatan Festival Olahraga Layanan Khusus. Jika setuju, maka diverifikasi/ditandatangani. Jika tidak setuju, maka dikembalikan untuk diperbaiki					Konsep laporan kegiatan FOLK	30 menit	Laporan kegiatan FOLK yang telah ditandatangani		
17.	Arsip					Laporan kegiatan FOLK yang telah ditandatangani	15 menit	Arsip		

NOTA DINAS

Nomor : OT.01.01/10.8.16/SET/X/2025

Yth : Daftar terlampir
Dari : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
Hal : *Progress Report* Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan
Lampiran : 2 (dua) dokumen
Tanggal : 8 Oktober 2025

Memperhatikan target dan capaian kinerja pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, bersama ini kami laporkan kepada Saudara terkait *progress report* indikator kinerja jumlah standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur sebagai berikut:

1. bahwa untuk meningkatkan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga pasca terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka setiap unit organisasi Eselon II diamanatkan untuk menyusun dan menetapkan naskah Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani;
2. bahwa sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja tersebut, telah diidentifikasi *progress report* dari ketercapaian target kinerja tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran nota dinas ini;
3. kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan unit yang telah menetapkan naskah standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur. Kami yakin bahwa naskah tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi penyelenggaraan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik di unit organisasi yang Saudara pimpin;
4. selanjutnya, kami menghimbau kepada pimpinan unit yang belum menetapkan naskah standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur agar dapat segera menyusun dan menetapkan naskah standar pelayanan dan standar operasional prosedur dimaksud sebagai komitmen kinerja serta perbaikan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik di unit organisasi yang Saudara pimpin;
5. untuk informasi dan koordinasi teknis terkait pemenuhan target kinerja dimaksud, dapat menghubungi Sdr. Rizki Kurniawan (0812 8712 9965) atau Sdr. Yudi Setiadi (0812 1428 0953) atau Sdri. Juhantika Anggraeni (0856 4291 4243).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Gunawan Suswantoro

Tembusan Yth:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga; dan
2. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga

Lampiran I Nota Dinas

Nomor : OT.01.01/10.8.16/SET/X/2025

Tanggal : 8 Oktober 2025

DAFTAR PENERIMA NOTA DINAS

1. Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan;
2. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga;
5. Inspektur;
6. Kepala Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data;
7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
8. Kepala Biro Keuangan dan Umum;
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
10. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama;
11. Sekretariat Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan;
12. Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan;
13. Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah;
14. Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta;
15. Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda;
16. Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global;
17. Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
18. Asisten Deputi Olahraga Pendidikan;
19. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat;
20. Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus;
21. Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga;
22. Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
23. Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda;
24. Asisten Deputi Olahragawan Elit;
25. Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi;
26. Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi;
27. Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga;
28. Asisten Deputi Wisata Olahraga;
29. Asisten Deputi Olahraga Profesional;
30. Asisten Deputi Pengelolaan Jasa, Sarana, dan Prasarana Olahraga; dan
31. Asisten Deputi Promosi dan Kemitraa



Gunawan Suswanto

**PROGRESS REPORT PENYUSUNAN
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025**

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR								
NO	UNIT ORGANISASI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		PROGRESS REPORT				KETERANGAN
		NO	JUDUL SOP	DRAFT	PEMBAHASAN	VERIFIKASI	PENETAPAN	
1	Inspektorat							Perlu menyusun SOP
2	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data	1	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Secara Langsung					Perlu dilakukan reviu
		2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Melalui Situs Web					Perlu dilakukan reviu
		3	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Melalui Surat Elektronik					Perlu dilakukan reviu
		4	SOP Pengelolaan Pengajuan Keberatan Secara Langsung					Perlu dilakukan reviu
		5	SOP Pengelolaan Pengajuan Keberatan Berbasis Situs Web					Perlu dilakukan reviu
		6	SOP Pengelolaan Pengajuan Keberatan Melalui Surat Elektronik					Perlu dilakukan reviu
		7	SOP Pelaksanaan Uji Konsekuensi					Perlu dilakukan reviu
		8	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik					Perlu dilakukan reviu
		9	SOP Pengelolaan Informasi Publik Yang Dikecualikan					Perlu dilakukan reviu
		10	SOP Pengelolaan Pendokumentasian Informasi Publik					Perlu dilakukan reviu
		11	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik					Perlu dilakukan reviu

NO	UNIT ORGANISASI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		PROGRESS REPORT				KETERANGAN
		NO	JUDUL SOP	DRAFT	PEMBAHASAN	VERIFIKASI	PENETAPAN	
		12	SOP Pembuatan Kartu Keanggotaan	✓	✗	✗	✓	Perlu dilakukan reviu
		13	SOP Peminjaman Koleksi Bahan Pustaka	✓	✗	✗	✓	Perlu dilakukan reviu
		14	SOP Pelayanan Umum Perpustakaan Pungkas Tri Baruno	✓	✗	✗	✓	Perlu dilakukan reviu
		15	SOP Pengelolaan Pengajuan Keberatan Informasi Bagi Masyarakat Disabilitas Secara Langsung	✓	✓	✗	✗	Perlu dilakukan verifikasi
		16	SOP Pengelolaan Pengajuan Keberatan Informasi Berbasis Situs Web Bagi Disabilitas	✓	✓	✗	✗	Perlu dilakukan verifikasi
		17	SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Kemenpora	✓	✓	✗	✓	Perlu dilakukan reviu
		18	SOP Pengelolaan Permohonan Infoemasi Bagi Masyarakat Disabilitas Secara Langsung	✓	✓	✗	✓	Perlu dilakukan reviu
		3	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	1	SOP Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Melalui Aplikasi E-SKM Kemenpora	✓	✓	✓
2	SOP Pelayanan Peminjaman Arsip Personal File Kepegawaian			✓	✓	✓	✓	
3	SOP Pengajuan Laporan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Kemenpora			✓	✓	✓	✓	
4	SOP Pengajuan Tunjangan Kinerja Pegawai			✓	✓	✓	✓	
5	SOP Pengajuan Uang Makan Pegawai			✓	✓	✓	✓	
6	SOP Pengelolaan Pelanggaran Kode Etik Pegawai			✓	✓	✓	✓	
7	SOP Mutasi Pegawai Antar Unit Kerja Di Lingkungan Kemenpora			✓	✓	✓	✓	
8	SOP Permohonan Rekomendasi dan Kelengkapan Berkas Untuk Seleksi Pindah Instansi Lain			✓	✓	✓	✓	
9	SOP Persetujuan Mutasi Keluar PNS di Lingkungan Kemenpora ke Instansi Lain			✓	✓	✓	✓	
10	SOP Persetujuan Mutasi Pegawai Antar Unit Kerja Di Lingkungan ke Kemenpora			✓	✓	✓	✓	
4	Biro Keuangan dan Umum	1	SOP Pinjam pakai kendaraan dinas operasional Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	✓	✗	✗	✗	Perlu dilakukan pembahasan


NO	UNIT ORGANISASI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		PROGRESS REPORT				KETERANGAN
		NO	JUDUL SOP	DRAFT	PEMBAHASAN	VERIFIKASI	PENETAPAN	
		2	SOP Peminjaman Ruang Rapat dan Pertemuan					Perlu dilakukan pembahasan
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol							Perlu menyusun SOP
6	Biro Hukum dan Kerja Sama							Perlu menyusun SOP
7	Sekretariat Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan							Perlu menyusun SOP
8	Asisten Deputy Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan							Perlu menyusun SOP
9	Asisten Deputy Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah							Perlu menyusun SOP
10	Asisten Deputy Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta	1	SOP Penyusunan Program Youth Edulife Skill (YES)					
		2	SOP Penyelenggaraan Youth Edulife Skill (YES)					
		3	SOP Pengesahan Sertifikat Youth Edulife Skill (YES)					
11	Asisten Deputy Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda							Perlu menyusun SOP
12	Asisten Deputy Pengembangan Kepemudaan Global							Perlu menyusun SOP
13	Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga							Perlu menyusun SOP
14	Asisten Deputy Olahraga Pendidikan							Perlu menyusun SOP
15	Asisten Deputy Olahraga Masyarakat							Perlu menyusun SOP
16	Asisten Deputy Olahraga Layanan Khusus	1	SOP Festival Olahraga Layanan Khusus					
17	Asisten Deputy Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga	1	SOP Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga					
18	Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga							Perlu menyusun SOP
19	Asisten Deputy Sentra Pembinaan Olahragawan Muda							Perlu menyusun SOP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	UNIT ORGANISASI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		PROGRESS REPORT				KETERANGAN
		NO	JUDUL SOP	DRAFT	PEMBAHASAN	VERIFIKASI	PENETAPAN	
20	Asisten Deputi Olahragawan Elit							Perlu menyusun SOP
21	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi							Perlu menyusun SOP
22	Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi							Perlu menyusun SOP
23	Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga	1	SOP Usulan Kenaikan Pangkat					Perlu dilakukan pembahasan
24	Asisten Deputi Wisata Olahraga	1	SOP Alur Pengarsipan pada Unit Asisten Deputi Wisata Olahraga					Perlu dilakukan pembahasan
25	Asisten Deputi Olahraga Profesional							Perlu menyusun SOP
26	Asisten Deputi Pengelolaan Jasa, Sarana, dan Prasarana Olahraga	1	SOP Pemberkasan Arsip Aktif pada Aplikasi SRIKANDI					Perlu dilakukan pembahasan
27	Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga	1	SOP Pelaksanaan Kemitraan Global					Perlu dilakukan pembahasan
TOTAL		39						

B. STANDAR PELAYANAN								
NO	UNIT ORGANISASI	STANDAR PELAYANAN		PROGRESS REPORT				KETERANGAN
		NO	JUDUL STANDAR PELAYANAN	DRAFT	PEMBAHASAN	VERIFIKASI	PENETAPAN	
1	Inspektorat	1	Standar Pelayanan Assurance (Audit/Reviu/Evaluasi/Monitoring)	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		2	Standar Pelayanan Konsultasi (<i>Consulting</i>) melalui Tatap Muka/Langsung	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
2	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data	1	Standar Pelayanan Permohonan Informasi	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		2	Standar Pelayanan Keberatan Atas Informasi	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		3	Standar Pelayanan Umum Perpustakaan	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		4	Standar Pelayanan Keanggotaan Perpustakaan	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		5	Standar Pelayanan Sirkulasi Perpustakaan	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
3	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	1	Standar Pelayanan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara	✓	✓	✗	✗	Perlu melakukan verifikasi
		2	Standar Pelayanan Audiensi Kelembagaan	✓	✓	✗	✗	Perlu melakukan verifikasi
4	Biro Keuangan dan Umum	1	Standar Pelayanan Pelayanan Tamu Kementerian	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		2	Standar Pelayanan Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kemenpora	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		3	Standar Pelayanan Perbaikan/ Pemeliharaan Sarana	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		4	Standar Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Arsip Kemenpora	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		5	Standar Pelayanan Peminjaman Prasarana Kantor Non PNBPN	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan

NO	UNIT ORGANISASI	STANDAR PELAYANAN		PROGRESS REPORT				KETERANGAN
		NO	JUDUL STANDAR PELAYANAN	DRAFT	PEMBAHASAN	VERIFIKASI	PENETAPAN	
		6	Standar Pelayanan Peminjaman Prasarana Kantor PNBP	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		7	Standar Pelayanan Penyusunan Laporan PNBP Kementerian Pemuda Dan Olahraga	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		8	Standar Pelayanan Pengembalian Barang Milik Negara (BMN) Yang Rusak/Tidak Digunakan	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		9	Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Kemenpora	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		10	Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Satker Kemenpora	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		11	Standar Pelayanan Permintaan Barang Kebutuhan Kantor Kemenpora	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		12	Standar Pelayanan Verifikasi dan Pencairan Anggaran	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		13	Standar Pelayanan Tindakan Bedah Minor/ Sedang	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		14	Standar Pelayanan Unit Rawat Jalan	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		15	Standar Pelayanan Unit Fisioterapi	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		16	Standar Pelayanan Unit Dukungan Kesehatan dan Kebugaran (Dkk)	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		17	Standar Pelayanan Unit DKA/ MCU	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		18	Standar Pelayanan Humas Dan Kerjasama Antar Lembaga	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		19	Standar Pelayanan Unit Diklat	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		20	Standar Pelayanan Unit Rekam Medik dan Pendaftaran Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan

NO	UNIT ORGANISASI	STANDAR PELAYANAN		PROGRESS REPORT				KETERANGAN
		NO	JUDUL STANDAR PELAYANAN	DRAFT	PEMBAHASAN	VERIFIKASI	PENETAPAN	
		21	Standar Pelayanan Unit Laboratorium Patologi Klinik	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		22	Standar Pelayanan Unit Radiologi	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		23	Standar Pelayanan Unit Farmasi	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		24	Standar Pelayanan Konseling Gizi Rawat Jalan	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	1	Standar Pelayanan Peminjaman Media Center Kementerian Pemuda Dan Olahraga	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
6	Biro Hukum dan Kerja Sama			✗	✗	✗	✗	Perlu menyusun SP
7	Sekretariat Deputy Bidang Pelayanan Kepemudaan	1	Standar Pelayanan Audiensi	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
8	Asisten Deputy Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan			✗	✗	✗	✗	Perlu menyusun SP
9	Asisten Deputy Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	1	Standar Pelayanan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
10	Asisten Deputy Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta	1	Standar Pelayanan Penyelenggaraan Youth Edulife Skill (Yes)	✓	✓	✓		
		2	Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Bagi Sentra Kewirausahaan Pemuda	✓	✓	✓	✓	
		3	Standar Pelayanan Permintaan Data dan Informasi Bina Kepemudaan Badan Usaha Dan Swasta	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
11	Asisten Deputy Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda	1	Standar Pelayanan Pengajuan Proposal Bantuan Pemerintah	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		2	Standar Pelayanan Pencairan Proposal Bantuan	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		3	Standar Pelayanan Pelaporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan

NO	UNIT ORGANISASI	STANDAR PELAYANAN		PROGRESS REPORT				KETERANGAN
		NO	JUDUL STANDAR PELAYANAN	DRAFT	PEMBAHASAN	VERIFIKASI	PENETAPAN	
12	Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global	1	Standar Pelayanan Pertukaran Pemuda Antar Negara	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
13	Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	1	Standar Pelayanan Audiensi Program Pembudayaan Olahraga	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		2	Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Kegiatan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun 2025	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
14	Asisten Deputi Olahraga Pendidikan			✗	✗	✗	✗	Perlu menyusun SP
15	Asisten Deputi Olahraga Masyarakat			✗	✗	✗	✗	Perlu menyusun SP
16	Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	1	Standar Pelayanan Festival Olahraga	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
17	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga	1	Standar Pelayanan Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga	✓	✓	✓		
18	Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1	Standar Pelayanan Audiensi Program Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	✓	✓	✗	✗	Perlu melakukan verifikasi
19	Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	1	Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kejuaraan Pada Perkumpulan/Sentra Unggulan	✓	✓	✗	✗	Perlu melakukan verifikasi
20	Asisten Deputi Olahragawan Elit	1	Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Untuk Pembinaan Olahragawan Nasional Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	✓	✓	✗	✗	Perlu melakukan verifikasi
21	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	1	Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Tenaga Keolahragaan Lingkup Olahraga Prestasi	✓	✓	✓		
		2	Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi	✓	✓	✓	✓	
22	Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi	1	Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Sarana Dan Prasarana Olahraga Prestasi	✓	✓	✗	✗	Perlu melakukan verifikasi
23	Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga	1	Standar Pelayanan Audiensi Program Bidang Pengembangan Industri Olahraga	✓	✓	✗	✗	Perlu melakukan verifikasi
24	Asisten Deputi Wisata Olahraga	1	Standar Pelayanan Data & Informasi Bidang Wisata Olahraga	✓	✓	✗	✗	Perlu melakukan verifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	UNIT ORGANISASI	STANDAR PELAYANAN		PROGRESS REPORT				KETERANGAN
		NO	JUDUL STANDAR PELAYANAN	DRAFT	PEMBAHASAN	VERIFIKASI	PENETAPAN	
25	Asisten Deputi Olahraga Profesional	1	Standar Pelayanan Audiensi Stakeholder Tidak Terjadwal	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
		2	Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitas Pembinaan Dan Pengembangan Induk Organisasi Cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional	✓	✗	✗	✗	Perlu melakukan Pembahasan
26	Asisten Deputi Pengelolaan Jasa, Sarana, dan Prasarana Olahraga	1	Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Pengelolaan Jasa, Sarana dan Prasarana Olahraga	✓	✓	✗	✗	Perlu melakukan verifikasi
27	Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga	1	Standar Pelayanan Kerja Sama Luar Negeri Bidang Olahraga	✓	✓	✗	✗	Perlu melakukan verifikasi
TOTAL		59						



Gunawan Suswanto



KEMENPORA

PEDOMAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA 2025



ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA LAYANAN KHUSUS
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



KEMENPORA

LAPORAN FKP

Forum Konsultasi Publik dalam
rangka Penetapan Standar
Pelayanan pada Asisten Deputi
Olahraga Layanan Khusus 2025



DAFTAR ISI

BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
BAB II.....	5
ANALISIS PELAKSANAAN FKP DAN RENCANA AKSI.....	5
1. Analisis Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.....	5
BAB III.....	8
KESIMPULAN.....	8
LAMPIRAN I. BERITA ACARA FKP.....	9



BAB I.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, warga binaan, dan kelompok masyarakat lainnya.

Pelaksanaan olahraga yang inklusif di Indonesia merupakan wujud nyata dari semangat Asta Cita 2025–2029, khususnya cita keempat yang menekankan pembangunan manusia Indonesia unggul, sehat, berkeadilan, dan berkeadilan. Kegiatan olahraga tidak lagi dipandang sekadar ajang prestasi, tetapi juga sarana memperkuat nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan pemberdayaan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemberian kesempatan untuk dapat berolahraga seperti ini menjadi bagian penting, khususnya dengan target peningkatan kebugaran dan partisipasi masyarakat berolahraga. Berbagai cara untuk mengajak masyarakat untuk mau berolahraga dilakukan oleh pemerintah khususnya di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada fasilitasi dan pembinaan olahraga layanan khusus. Melalui fasilitasi dan pendampingan maka dapat menggerakkan masyarakat menuju gerakan masyarakat untuk selalu menjaga kesehatannya dan menjadi gaya hidup sehari-hari.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan dilakukannya Forum Konsultasi Publik Bersama Pemangku Kepentingan menuju Standar Pelayanan Fasilitasi dan Pembinaan Olahraga Layanan Khusus, antara lain:

- i. Meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung inklusivitas
- ii. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemangku kepentingan dalam mengakses dan menggunakan fasilitasi dan pembinaan olahraga layanan khusus;
- iii. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam membuat perencanaan dan penyaluran fasilitasi dan pembinaan olahraga layanan khusus;
- iv. Menyatukan perspektif terhadap pelaksanaan pendampingan olahraga layanan khusus

- v. Menyusun rekomendasi perbaikan dan tahapan-tahapan yang diperlukan bagi pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan
 - vi. Melibatkan unsur penyelenggara layanan, unsur akademisi, unsur mitra kerja, unsur pengguna layanan, unsur organisasi masyarakat sipil, dan unsur media massa dalam penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan olahraga layanan khusus.
- b. Manfaat
- Manfaat dilakukannya Forum Konsultasi Publik Bersama Pemangku Kepentingan menuju Standar Pelayanan Fasilitasi dan Pembinaan Olahraga Layanan Khusus, antara lain:
- i. Secara umum
 - a. Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus melaksanakan pelayanan publik yakni mendukung pelaksanaan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, warga binaan, dan kelompok masyarakat lainnya.
 - b. Pemerataan pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan olahraga layanan khusus
 - c. Memperkuat nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan pemberdayaan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat
 - ii. Penyelenggara Pelayanan
Menjadi wadah dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masukan mengenai pelaksanaan olahraga layanan khusus yang inklusif dimana ramah dengan kelompok rentan, dan marginal.
 - iii. Publik
 - a. Ruang partisipasi masyarakat dalam menyalurkan masukan dan saran dalam pelaksanaan kebijakan publik;
 - b. Memperoleh pengetahuan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Metodologi Pelaksanaan FKP

Waktu dan Tempat Pelaksanaan FKP

4 – 5 November 2025, bertempat di Hotel Arion Bandung, Jawa Barat.

4. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Bersama Pemangku Kepentingan menuju Standar Pelayanan Fasilitasi dan Pembinaan Olahraga Layanan Khusus pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

b. Peserta

- SLBN Cicendo Kota Bandung
- Rumah Cemara, Organisasi
- FFTI
- Geraktin
- SOina Jawa Barat
- PP PORTI
- PSAI
- Kanwil Dirjen Permasalahatan Jawa Barat
- UPI
- Praktisi Olahraga
- LPP TVRI Provinsi Jawa Barat
- Biro SDMO Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Asisten Deputi Bidang Olahraga Layanan Khusus
- Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga



5. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Bersama Pemangku Kepentingan dilakukan secara tatap muka langsung. Peserta, narasumber, dan Tim Asisten Deputi Olahraga Layanna khusus berdiskusi secara langsung untuk mendapatkan masukan bagaimana menentukan standar pelayanan fasilitas dan pembinaan Olahraga Layanan Khusus.

6. Susunan Acara FKP

Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penetapan Standar Pelayanan

Waktu (WIB)		Kegiatan	Keterangan
Selasa, 4 November 2025	15.00 – 18.00	Check In dan Registrasi Peserta	All
	19.00 – 20.30	Check Akhir Pesiapan Pembukaan	All Panitia
		Pembukaan:	MC
		1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya	
		2. Pembacaan Do'a	
		3. Laporan Ketua Pelaksana	Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus
		4. Arahan dan Pembukaan Kegiatan	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
		5. Foto Bersama	All
Rabu, 5 November 2025	09.00-10.00	Pembahasan Forum Konsultasi Publik (FKP) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	Biro SDM dan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga
	10.00-10.15	Coffee Break	
	10.15-11.15	Diskusi dan Penetapan Standar Pelayanan (SP) pada Asdep Olahraga Layanan Khusus	Biro SDM dan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga
	11.15-12.00	Lanjut Diskusi dan Penetapan Standar Pelayanan (SP)	Biro SDM dan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga
	12.00-13.00	I S O M A	
	13.00-13.45	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan FKP pada Asdep Olahraga Layanan Khusus	Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus dan pihak terkait
	13.45-15.15	Pembahasan Rancangan dan Finalisasi Rancangan Pedoman Penyandang Disabilitas	Tim Penyusun
	15.15-15.30	I S O M A	
	15.30-17.00	Pembahasan Rancangan dan Finalisasi Pedoman Lanjut Usia	Tim Penyusun
	17.00-18.00	Pembahasan Rancangan dan Finalisasi Pedoman Warga Binaan dan Anak Jalanan	Tim Penyusun



BAB II

ANALISIS PELAKSANAAN FKP DAN RENCANA AKSI

1. Analisis Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah, Selanjutnya, Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus bekerjasama dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan pendampingan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam standar pelayanan fasilitasi dan pendampingan olahraga layanan khusus. Unsur tersebut melibatkan dari unsur akademisi, unsur mitra kerja, unsur pengguna layanan, unsur organisasi masyarakat sipil, dan unsur media massa dalam penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan olahraga layanan khusus. Selanjutnya, hasil pelaksanaan FKP Organisasi Penyelenggara di Lingkungan Asdep Olahraga Layanan Khusus dianalisis melalui aspek-aspek berikut :

1. Identifikasi Masalah

Forum Konsultasi Publik (FKP) ini diselenggarakan dalam rangka penetapan perdana Standar Pelayanan (SP) Fasilitasi dan Pembinaan Olahraga Layanan Khusus. Pelaksanaan FKP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat prinsip inklusivitas dalam seluruh proses penyelenggaraan layanan. FKP melibatkan berbagai unsur, meliputi unsur penyelenggara layanan, akademisi, mitra kerja, pengguna layanan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Keterlibatan multipihak ini menghasilkan *outcome* berupa Berita Acara Kesepakatan FKP pada Asdep Olahraga Layanan Khusus. Dokumen kesepakatan tersebut menjadi salah satu bentuk bukti nyata dalam menyatukan persepektif dan tujuan yang sama menentukan standar pelayanan. serta mitigasi dalam implementasi Standar Pelayanan Fasilitasi dan Pembinaan Olahraga Layanan Khusus, sehingga penerapannya dapat berjalan optimal, terukur, serta memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat inklusif.

2. Bentuk Penyelenggaraan FKP

Penyelenggaraan FKP dilakukan secara tatap muka melalui luring. Penyelenggaraan FKP yang dilakukan secara luring. Pelaksanaan FKP perdana dilaksanakan pada saat Raapt koordinasi Asdep OLK. Selanjutnya penyelenggaraan bersamaan dengan pelaksanaan penyusunan rancangan pedoman NSPK Asdep OLK yaitu sebanyak 2 kali atau 100 %.

3. Tema FKP

Tema dalam pelaksanaan FKP adalah standar pelayanan fasilitasi dan pembinaan yang berkaitan dengan pelaksanaan olahraga layanan khusus. Standar Pelayanan tersebut membahas mengenai teknis pelaksanaan permohonan fasilitasi meliputi *Service Delivery* terdiri dari Persyaratan; Sistem Mekanism Prosedur; Jangka Waktu; Biaya/Tarif; Produk layanan; dan



Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan; dan *Manufacturing* terdiri dari Dasar hukum; Sarana dan Prasarana; Kompetensi Pelaksanaan; Pengawasan internal; Jumlah Pelaksanaan; Jaminan Pelayanan; Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan; dan Evaluasi kinerja pelaksanaan.

4. Ruang Lingkup Pembahasan dalam FKP

Ruang Lingkup FKP adalah cakupan pembahasan dan pemecahan masalah dari tema yang dibahas dalam pelaksanaan FKP. Penyelenggaraan FKP pada kali ini membahas terkait jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan yaitu tindak lanjut peningkatan pelayanan publik dan penyaluran informasi pelaksanaan kegiatan yang ada pada Asdep OLK. Sehingga apa yang dilakukan Kementerian pemuda dan olahraga sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Pada penyelenggaraan ini diketahui bahwa pengguna layanan pada Asdep OLK bermacam-macam meliputi penyandang disabilitas; masyarakat lanjut usia; warga binaan dan anak jalanan, namun dengan adanya FKP maka terdapat Standar Pelayanan yang memiliki kesepahaman antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait serta regulasi yang terkait dengan pendampingan olahraga layanan khusus. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah melibatkan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan dalam membudayakan olahraga inklusivitas. Didasarkan pada diskusi yang telah dilakukan, kedepannya semakin banyak pemangku kepentingan yang mendukung standar pelayanan fasilitasi dan pendampingan olahraga layanan khusus.

5. Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi dari FKP

Hasil yang dimaksud menjelaskan hasil pembahasan dan pemecahan masalah yang dilakukan. Kesimpulan merupakan gambaran keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi adalah saran/anjuran yang didapat selama pelaksanaan kegiatan dan dapat berupa saran tindak lanjut berdasarkan hasil yang didapat dari FKP. Sebagian besar hasil/kesimpulan/rekomendasi dari pelaksanaan FKP yang dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara pada lingkup Asdep Olahraga Layanan Khusus secara garis besar meliputi :

- Publikasi terkait timeline pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan olahraga layanan khusus ke masyarakat;
- Keterbukaan public dengan mengadakan publikasi penerima fasilitasi dan pembinaan pada Tahun Anggaran berjalan;
- Perlunya kerjasama lebih rinci terhadap OPD dan organisasi dan komunitas terkait penerima layanan agar fasilitasi dan pembinaan dapat dirasakan manfaatnya di semua daerah;
- Peningkatan akuntabilitas pelaporannya seperti spj dan dokumentasinya serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk kepentingan pencapaian indikator dari SP terarah dan akuntabel.



6. Rencana Aksi

Dalam rangka menindaklanjuti masukan yang disampaikan pada Forum Konsultasi Publik bersama Pemangku Kepentingan terkait Standar Pelayanan Fasilitas dan Pembinaan Asdep Olahraga Layanan Khusus, direncanakan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Layanan.

Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus akan menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bekerja sama dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, guna menentukan kesepahaman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik.

Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus akan menindaklanjuti masukan terkait keterbukaan informasi dengan menerbitkan publikasi resmi, bekerja sama dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

- Rencana Perjanjian Kerja Sama.

Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus merencanakan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan bagi Warga Binaan.



BAB III.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Lingkup Standar Pelayanan Fasilitas dan Pembinaan Olahraga Layanan Khusus, maka Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus berkomitmen untuk :

1. Segera menindaklanjuti hasil dari FKP;
2. Penyelenggaraan FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan dengan melibatkan masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan dapat membantu Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus yang mendukung inklusivitas.



**BERITA ACARA KESEPAKATAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
DALAM RANGKA PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA LAYANAN KHUSUS
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025**

NOMOR: OT.02.00/11.5.1/D-II.4/XI/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (5 November 2025), kami masing-masing pihak:

1. Dadi Surjadi, S.Pd., M.Si, Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus pada Asisten Deputi Bidang Olahraga Layanan Khusus, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Pimpinan Forum Konsultasi Publik);
2. Nurhasanah, S.Sos. Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga (unsur Penyelenggara Layanan);
3. Kusnali, A.Md.IP., S.Sos., M.H., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Barat, Kementerian Imigrasi dan Permasarakatan (unsur Mitra Kerja);
4. Dr. Reshandi Nugraha, M.Pd., Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Pendidikan Indonesia (unsur Akademisi);
5. Ard hany Suryadarma, Direktur Rumah Cemara (unsur Organisasi Masyarakat Sipil);
6. Asri, Ketua Perkumpulan Olahraga Tunanetra Indonesia (unsur Pengguna Layanan);
7. Komarudin, LPP TVRI Jawa Barat, (unsur Media Massa);

Telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penetapan Rancangan Standar Pelayanan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Olahraga Layanan Khusus, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 melalui pertemuan langsung yang dihadiri oleh para penyelenggara pelayanan publik serta pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta yang terlampir dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:







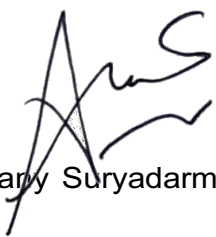
- a. Pemaparan Rancangan Standar Pelayanan Penetapan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Olahraga Layanan Khusus, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025;
- b. Tanggapan dan saran dari peserta Forum Konsultasi Publik yang tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

Maka Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penetapan Rancangan Standar Pelayanan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Olahraga Layanan Khusus, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025:

MENYEPAKATI

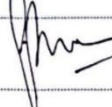
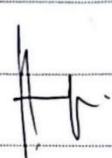

- KESATU** : Rancangan Standar Pelayanan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Olahraga Layanan Khusus, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KEDUA** : Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penetapan Rancangan Standar Pelayanan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Olahraga Layanan Khusus, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I, II, dan III yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Berita acara ini.
- KETIGA** : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dijadikan rujukan penyempurnaan dan penetapan Rancangan Standar Pelayanan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Olahraga Layanan Khusus, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditetapkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 5 November 2025	
<p>Pemangku Kepentingan Unsur Penyelenggara Layanan Perencana Ahli Madya, Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kemenpora,</p>  <p>Nurhasanah, S.Sos.</p>	<p>Pimpinan Forum Konsultasi Publik Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kemenpora,</p>  <p>Dadi Surjadi, S.Pd., M.Si</p>
<p>Pemangku Kepentingan Unsur Akademisi Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Pendidikan Indonesia,</p>  <p>Dr. Reshandi Nugraha, M.Pd.</p>	<p>Pemangku Kepentingan Unsur Mitra Kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat,</p>  <p>Kusnali, A.Md.IP., S.Sos., M.H.</p>
<p>Pemangku Kepentingan Unsur Pengguna Layanan Ketua Perkumpulan Olahraga Tunanetra Indonesia,</p>  <p>Asri</p>	<p>Pemangku Kepentingan Unsur Media Massa LPP TVRI Jawa Barat,</p>  <p>Komarudin</p>
<p>Pemangku Kepentingan Unsur Organisasi Masyarakat Sipil Direktur Rumah Cemara,</p>  <p>Ardhanj Suryadarma</p>	

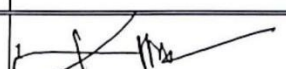
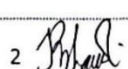

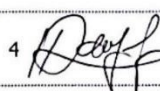
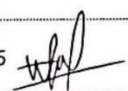
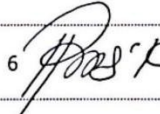


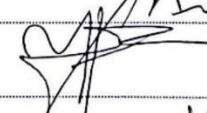
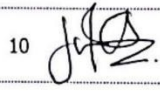

**DAFTAR HADIR FORUM KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA ASISTEN DEPUTI
OLAHRAGA LAYANAN KHUSUS**

NO	N A M A	INSTANSI	JABATAN DALAM KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	Dadi Surjadi, S.Pd, M.Si	KEMENPORA	Peserta	1
2	Nurhasanah, S.Sos.	KEMENPORA	Peserta	2
3	Witarsa, S.Pd	KEMENPORA	Peserta	3
4	Rani Anggra Berta Yagusta, S.Pd, M.Pd	KEMENPORA	Peserta	4
5	Murin, S.IP	KEMENPORA	Peserta	5
6	Giatno, S.Kom, M.M.	KEMENPORA	Peserta	6
7	Anita Widyaningrum, S.E.	KEMENPORA	Peserta	7
8	Tengku Muhammad Rafee Pratama, S.H.	KEMENPORA	Peserta	8
9	Ahmad Syaikhudin, A.Md.AB	KEMENPORA	Peserta	9
10	Masiri, S.Pd.	KEMENPORA	Peserta	10
11	Rina Utharina	SLBN Cicendo Kota Bandung	Peserta	11
12	Tatang Lia	SLBN Cicendo Kota Bandung	Peserta	12
13	Shilpi Yanti	Rumah Cemara	Peserta	13
14	Alvin Gunawan	FFTI	Peserta	14
15	Bambang Prasetyo	Gerkatin	Peserta	15
16	Parsaoran Simanjuntak, S.Pd	SoIna Jawa Barat	Peserta	16
17	Hanu Resinujanti Pitrosandhi	SoIna Jawa Barat	Peserta	17
18	Frangky Rumengan	PORTI	Peserta	18

19	Rusharmanto	PSAI	Peserta	19	
20	Arief Rachman	KEMENPORA	Peserta	20	
21	Siti Zulaikah	KEMENPORA	Peserta	21	

Bandung, November 2025
Pembuat Daftar,


Siti Zulaikah, S.Pd

NO	N A M A	INSTANSI	JABATAN DALAM KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	Kusnali Amd. IP. S. Sos. MH	Kakanwil Dirjen Pemasyarakatan Jawa Barat	Narasumber	
2	Dr. Reshandi Nugraha, M.Pd.	UPI	Narasumber	2 
3	Salman, M.Pd.	UPI	Narasumber	3 
4	Regi Dwi Septian, M.Pd.	UPI	Narasumber	4 
5	Naufal Nur Fadhillah Karim, S.Pd.	UPI	Narasumber	5 
6	Rizki Kurniawan, S.Psi, M.M	Praktisi Olahraga	Narasumber	6 
7	Asri	PP PORTI	Tim Penyusun	7 
8	Ardhany Suryadarma	Rumah Cemara	Tim Penyusun	8 
9	Komarudin	LPP TVRI Prov. Jawa Barat	Tim Penyusun	9 
10	Juhantika Anggraeni, S.S.	Praktisi Olahraga	Tim Penyusun	10 
11	Yudi Setiadi, S.Sos.	Praktisi Olahraga	Tim Penyusun	11 

Bandung, November 2025
Pembuat Daftar,


Siti Zulaikah, S.Pd

TANGGAPAN DAN SARAN PESERTA FORUM KONSULTASI PUBLIK

Tanggal, 5 November 2025

TANGGAPAN DAN SARAN PESERTA FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Nama : Ardhany Suryadarma
Instansi : Rumah Cemara
Tanggapan dan saran :
 - Terkait jangka waktu ke masyarakat karena terkait APBN, kita harus mengetahui *timeline* sesuai APBN;
 - Terkait data dan informasi, karena Kemenpora harus publikasi, perlu disampaikan publikasi juga kepada penerimanya; dan
 - Terkait dengan layanan khusus, Rumah Cemara adalah organisasi nasional, semoga nantinya ada seleksi untuk *homeless world cup* yang akan menjadi promosi yang luar biasa bahwa Indonesia memberikan ruang bagi warga binaan untuk berprestasi di kancah internasional.

2. Nama : Asri
Instansi : Perkumpulan Olahraga Tunanetra Indonesia
Tanggapan dan saran :
 - Usul terkait sarana dan prasarana olahraga banyak yang belum ramah akses disabilitas khususnya tunanetra. Ketika membuat atau renovasi kami minta untuk dilibatkan. Sebagai contoh saya sering ke GBK, di tribun tidak ada *railing*, itu akan membahayakan. Kita disuruh berolahraga tapi untuk akses untuk olahraga minim yang ramah disabilitas; dan
 - Terkait anggaran apakah anggaran tetap atau setiap tahun ada.

3. Nama : Komarudin
Instansi : LPP TVRI Jawa Barat
Tanggapan dan saran :
 - Apa yang tertulis di Standar Pelayanan ini sudah cukup lengkap. Pemerintah juga perhatiannya sudah cukup baik termasuk kepada atlet disabilitas. Kemenpora perlu menerapkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan dengan lebih baik. Dari daerah agar bisa mendapat dukungan dari Kemenpora bagaimana prosedurnya apakah bisa langsung atau harus melalui organisasi seperti SOIna? Bisakah kalau ada sedikit kendala langsung ke Kemenpora agar memperoleh dukungan?;

- SOIna dan Kemenpora perlu kolaborasi publikasi sehingga bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas;
- Jaminan perlu adanya asuransi untuk kenyamanan; dan
- Saya selaku pengurus SOIna Jawa Barat, sering melakukan publikasi mengingat belum seluruh daerah paham sehingga ada SOIna daerah yang belum mendapat anggaran sama sekali dari pemerintah.

4. Nama : Dr. Reshandi Nugraha, M.Pd
 Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia
 Tanggapan dan saran :

- Apakah informasi ini akan ditampilkan di website? Bagaimana dengan pedomannya?;
- Apakah mekanismenya seperti dana hibah yang biasa diterima para dosen proses untuk publikasi dan pengumuman prosesnya?; dan
- Ketika nanti penerima sudah menerima apakah ada akuntabilitas pelaporannya seperti spj dan dokumentasinya? Sebagai saran harusnya dipantau sampai ke monitoring dan evaluasi untuk kepentingan pencapaian indikator dari SP ini di akhir serta agar lebih terarah dan akuntabel.

5. Nama : Salman
 Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia
 Tanggapan dan saran :

- Komponen Sarana dan Prasarana apakah memungkinkan ditambahkan dengan lapangan tertutup? Khawatirnya pada saat pelaksanaan cuacanya kurang mendukung atau mungkin pada beberapa kasus butuh dilaksanakan di dalam ruangan contohnya untuk kebutuhan lansia.

6. Nama : Regi
 Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia
 Tanggapan dan saran :

- Apakah dimungkinkan didetailkan kegiatan yang boleh dilakukan apa saja? Festival seperti apa? Kegiatan seperti apa? Bentuk pelatihannya seperti apa? Opsi-opsinya agar disampaikan dan tidak menimbulkan bias di masyarakat.

7. Nama : Noval
 Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia
 Tanggapan dan saran :

- Perlu adanya penjelasan pada aspek anggaran (RAB) pada proposal bantuan seperti apa?

8. Nama : Kusnali, A.Md.IP.,S.Sos.,M.H.
Instansi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Barat

Tanggapan dan saran :

- Di Jawa Barat ini terdapat 33 unit pelaksana teknis, kami berharap kedepannya ada kegiatan yang memang terprogram disetiap lapas;
- Kami menyampaikan bahwa kegiatan yang kemaren dilakukan mendapat apresiasi positif dari warga binaan dan merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan yaitu warga binaan. Mereka merasa diperhatikan dan manfaatnya banyak. Mereka terpacu untuk aktif berolahraga; dan
- Sarana dan prasarana olahraga di Lembaga Pemasyarakatan harus ada standar misal setiap Lembaga Pemasyarakatan minimal ada 1 lapangan olahraga. Ini juga yang akan kami terus dorong.

RANCANGAN NASKAH KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DIPERBAIKI SESUAI TANGGAPAN DAN SARAN PESERTA FORUM KONSULTASI PUBLIK

**STANDAR PELAYANAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA
OLAHRAGA LAYANAN KHUSUS**

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Fasilitasi yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga c.q. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; 2. Proposal Fasilitasi 3. Kelengkapan Proposal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan surat permohonan, proposal dan kelengkapan proposal fasilitasi dan pembinaan Olahraga Layanan Khusus melalui email persuratan.kemenpora.go.id; 2. Memperoleh nomor agenda pengajuan proposal melalui email persuratan.kemenpora.go.id; 3. Mendapat informasi penerimaan atau penolakan melalui asdepolk@kemenpora.go.id; <p>Apabila disetujui</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melengkapi dokumen administrasi; 5. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama; 6. Menerima fasilitasi melalui rekening yang telah disampaikan dalam proposal; 7. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari kerja sejak proposal diterima
4	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya oleh instansi
5	Produk Layanan	Dana Fasilitasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SP4N LAPOR! 2. Instagram @kemenpora

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelatihan Olahraga Layanan Khusus ramah disabilitas; 2. Ruangan Bimbingan Teknis nyaman dan memiliki pendingin ruangan (AC); 3. Lapangan terbuka untuk pelaksanaan Festival/Pekan/Kejuaraan; 4. Ruang ibadah; 5. Tempat parkir R2 dan R4; 6. Toilet bersih dan ramah disabilitas/lansia; 7. Akomodasi ramah disabilitas/lansia; 8. Juru Bahasa Isyarat (apabila diperlukan); 9. Audio atau <i>screen reader</i>;
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Pengawasan sistem pengendalian internal pemerintah oleh inspektorat; 3. Pengawasan atas kebenaran bukti-bukti pengeluaran/belanja, pembayaran pajak yang lengkap dan sah sesuai ketentuan; 4. Pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR! atau Instagram @kemenpora;
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang Olahraga Layanan Khusus; 2. Pendamping yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
5	Jumlah pelaksana	<p>10 (sepuluh) orang dengan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Kebijakan 2. Perencana

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Arsiparis 4. Penelaah Teknis Kebijakan
6	Jaminan Pelayanan	1. Petugas memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, mudah, lengkap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas tidak menerima suap, mengeluarkan ucapan, dan/atau isyarat untuk keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data informasi penerima bantuan pemerintah dijamin kerahasiaannya; 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 3. Tersedia Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK); 4. Pengawasan ruang layanan dengan CCTV; 5. Tersedia titik kumpul.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat setiap saat dalam 1 (satu) tahun; 3. Dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan; 4. Laporan kegiatan.

Jakarta, 12 November 2025
 Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus,



Dadi Surjadi., S.Pd., M.Si

Dashboard

TOTAL KUISONER

45



TOTAL RESPONDEN

404



TOTAL IKM

3.66



TOTAL IKM KONVERSI

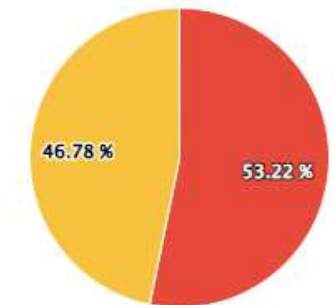
91.45



Persentase Responden Menurut Jenis Kelamin

#	Jenis Kelamin	Responden	Persentase
1	LAKI-LAKI	215	53.22%
2	PEREMPUAN	189	46.78%
Total		404	100%

Grafik Responden Menurut Jenis Kelamin



● LAKI-LAKI ● PEREMPUAN

NOTA DINAS
Nomor: KA.10.01/12.3.10/B-V/XII/2025

Yth. : Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus
Dari : Kepala Biro Keuangan dan Umum
Hal : Permohonan Tandatanganan LAKI 2025
Tanggal : 3 Desember 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Sebagai tindak lanjut pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan bulan Juni 2025 di Unit Pengolah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Tim Audit Internal Kearsipan telah menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) sesuai dengan Program Kegiatan Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan dokumen LAKI masing-masing Unit Pengolah untuk ditandatangani Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus selaku Penanggung Jawab Unit Pengolah. Selanjutnya LAKI yang telah ditandatangani dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan arsip di Unit Pengolah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i kami ucapkan terima kasih.



Ferry Hadju

Tembusan Yth:

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

**LAPORAN AUDIT KEARSIPAN INTERNAL
ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Tanggung jawab pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional.

Dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud di atas ANRI dibantu oleh lembaga dan/atau unit kearsipan bekerja sama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya sesuai Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pengawasan kearsipan adalah pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan penyelenggaraan kearsipan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan kebijakan kearsipan,

pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Sedangkan pengawasan terhadap penegakan peraturan perundangan adalah ketaatan dan kepatuhan pencipta arsip, pejabat struktural dan fungsional serta pengelola arsip dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan kearsipan.

Jenis pengawasan kearsipan terdiri atas pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan melalui audit kearsipan internal di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibentuk oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dan difasilitasi oleh Biro Keuangan dan Umum selaku Unit Kearsipan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan;
2. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan;
3. Peraturan arsip nasional republik indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan;
4. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan Kearsipan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan
5. Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda Dan Olahraga;
6. Surat tugas sekretaris kementerian pemuda dan olahraga nomor NOMOR: KA.10.01/7.7.18/SET/VII/2025 tentang Pengawasan Internal Kearsipan di lingkungan kementerian pemuda dan olahraga.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan audit kearsipan internal di Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah untuk menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

D. Ruang Lingkup

1. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

Yaitu melakukan pengujian atau verifikasi terhadap pengelolaan arsip dinamis mulai dari penciptaan arsip, pemberkasan dan penataan arsip aktif, program arsip vital, pengolahan dan pelaporan arsip terjaga, pengolahan arsip inaktif, pemeliharaan arsip inaktif, layanan dan akses arsip dinamis dan penyusutan arsip.

2. Aspek Sumber Daya Kearsipan

Yaitu melaksanakan pengujian atau verifikasi terhadap arsiparis dan pengelola arsip dalam hal tanggung jawab, kedudukan hukum, kewenangan, kompetensi dan pembinaan yang diperoleh.

E. Objek Pengawasan

Audit kearsipan internal dilaksanakan terhadap Objek pengawasan kearsipan internal pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dilaksanakan sebanyak 14 Objek Pengawasan Unit Pengolah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada bulan Juni s.d. Juli 2025.

F. Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal

Berdasarkan hasil audit kearsipan internal yang telah dilaksanakan diberikan penilaian atas penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan sebagai berikut:

1. Nilai 90 s.d. 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)
2. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan)
3. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik)
4. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik)
5. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup)
6. Nilai lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang)
7. Nilai 0 s.d 30 dengan kategori D (Sangat Kurang)

Nilai yang diperoleh masing-masing unit pengolah merupakan prosentase nilai yang diperoleh terhadap nilai standar pada setiap aspek pengawasan kearsipan. Sedangkan nilai yang diperoleh masing-masing unit kerja/satuan kerja merupakan prosentase dari penjumlahan nilai rata-rata unit pengolah dengan nilai unit kearsipan dibagi dua.

G. Tim Pengawas Kearsipan Internal

Tim Pengawas Kearsipan Internal yang melaksanakan audit kearsipan internal di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah:

1. M. Arif Tri Prasetyo selaku Ketua Tim
2. Purwanto selaku Anggota
3. Sarlawati Gita Afrianingsih selaku Anggota
4. Afrianda Setyawan selaku Anggota
5. Muhammad Lathif selaku Anggota
6. Yeni Wijaya selaku Anggota
7. Astri Dwijayanti selaku Anggota
8. Rydha Sobikhatul Fajriyah selaku Anggota
9. Sulardi Setyo selaku Anggota
10. Suroto selaku Anggota
11. Melati Wemon selaku Anggota
12. Faizatul Fuadah Parwisti selaku Anggota

BAB II

URAIAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL UNIT PENGOLAH ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA LAYANAN KHUSUS

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS			
1.1.	SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP			
A.	BAGIAN ELEKTRONIK			
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Sebanyak 7 s.d. 9 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	3	Ada beberapa naskah dinas yang belum sesuai ukuran huruf
2.	Pimpinan unit pengolah menandatangani naskah dinas yang dibuat oleh unit pengolah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terverifikasi.	Seluruh naskah dinas sampel telah ditandatangani menggunakan TTE terverifikasi.	4	<i>Sesuai</i>
3.	Jumlah naskah dinas yang telah ditandatangani dan dikirim oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 70% s.d. 90% naskah dinas yang ditandatangani dan dikirim melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	3	Apabila melihat data dukung terdapat 27 surat masuk, 5 belum dikirim, sehingga persentasenya menjadi 81,48%
4.	Jumlah naskah dinas yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Terdapat lebih dari 0% s.d. 50% naskah dinas yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	1	Terdapat 54 naskah masuk, 31 belum ditindaklanjuti sehingga persentase menjadi 42,59%
B.	BAGIAN KONVENSIONAL			
1.	Unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	Sebanyak 7 s.d. 9 sampel naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.	3	Ada beberapa naskah dinas yang belum sesuai font dan ukuran huruf

2.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas masuk konvensional.	Telah melaksanakan 1 kegiatan pengendalian naskah dinas masuk konvensional.	1	<i>data dukung naskah dinas konvensional belum dilampirkan berupa Buku Agenda, Buku Ekspedisi dan dokumentasi namun telah terdapat disposisi</i>
3.	Unit pengolah mengendalikan naskah dinas keluar konvensional.	Belum melaksanakan pengendalian naskah dinas keluar konvensional.	0	<i>data dukung pengendalian naskah dinas keluar konvensional belum dilampirkan berupa Buku Agenda, Buku Ekspedisi, dokumentasi penyimpanan</i>

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS			
1.2.	SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP			
A.	BAGIAN ELEKTRONIK			
1.	Unit pengolah melayani arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD.	2	<i>Belum ada catatan peminjaman dan mohon dipastikan kembali untuk peminjaman menggunakan out indicator atau google form</i>
B.	BAGIAN KONVENSIONAL			
1.	Unit pengolah melayani arsip aktif konvensional berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD).	Terdapat daftar arsip aktif untuk kegiatan layanan arsip aktif berdasarkan SKKAAD dan melaksanakan layanan yang dicatat pada sarana pencatatan layanan arsip yang tersedia.	4	Sudah terdapat daftar arsip aktif dan sarana peminjaman beserta pencatatannya

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS			
1.3.	SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP			
A.	BAGIAN ELEKTRONIK			

1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Telah melaksanakan pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI terhadap naskah masuk dan naskah keluar sesuai dengan klasifikasi arsip.	4	-
2.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif yang dilaksanakan oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	Rata-rata persentase pemberkasan arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI mencapai lebih dari 0% s.d. 50%.	1	Sesuai data dukung persentase surat masuk 17,07% dan surat keluar 6,58% sehingga total persentase keseluruhan 11,83%
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan, tetapi belum menyampaikan kepada unit kearsipan secara rutin.	3	<i>Terdapat 1 kali penyampaian tanggal 11 Juni 2025</i>
4.	Berkas yang telah ditutup oleh unit pengolah pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Belum terdapat berkas yang ditutup.	0	<i>belum dilampirkan data dukung berkas yang ditutup dalam aplikasi srikandi berupa tangkapan layar seluruh berkas yang ada di srikandi</i>
B. BAGIAN KONVENSIONAL				
1.	Unit pengolah memberkaskan arsip aktif konvensional.	Telah melaksanakan pemberkasan terhadap arsip yang dibuat dan arsip yang diterima, sesuai dengan klasifikasi arsip.	4	
2.	Persentase pemberkasan arsip aktif konvensional oleh unit pengolah.	Rata-rata pemberkasan arsip aktif mencapai lebih dari 90% s.d. 100%.	4	
3.	Unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif konvensional kepada unit kearsipan.	Telah menyusun daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai ketentuan, tetapi belum menyampaikan kepada unit kearsipan secara rutin.	3	Terdapat 1 kali penyampaian ke UK I namun lampiran belum lengkap

4.	Arsip yang disimpan oleh unit pengolah tidak melewati retensi aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).	Terdapat arsip yang disimpan dengan akhir retensi aktif tidak melebihi masa audit.	4	
5.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional sesuai media.	Telah melaksanakan penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai media dengan memenuhi seluruh kriteria penyimpanan.	4	
6.	Unit pengolah melaksanakan alih media arsip aktif sesuai dengan prioritas (berpotensi permanen berdasarkan JRA yang berlaku) dan ketentuan.	TIDAK MENJADI PEMBAGI	-	-
7.	Unit pengolah mengelola arsip vital.	TIDAK MENJADI PEMBAGI	-	-

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
1.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS			
1.4.	SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP			
A.	BAGIAN ELEKTRONIK			
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI/aplikasi sejenis SRIKANDI.	-	-	
B.	BAGIAN KONVENSIONAL			
1.	Unit pengolah memindahkan arsip inaktif konvensional sesuai dengan prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif konvensional sesuai dengan prosedur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	0	<i>Belum ada data dukung BAST, hanya sebatas Nota Dinas Pemindahan tanggal 10 Juni 2025 sehingga belum bisa sebagai bukti bahwa telah dilaksanakan pemindahan</i>

2.	Intensitas pemindahan arsip inaktif konvensional oleh unit pengolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	0	<i>Belum ada data dukung BAST, hanya sebatas Nota Dinas Pemindahan tanggal 10 Juni 2025 sehingga belum bisa sebagai bukti bahwa telah dilaksanakan pemindahan</i>
----	---	---	---	---

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN			
2.1.	SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN			
1.	Ketersediaan arsiparis tersertifikasi pada unit pengolah.	Tidak tersedia arsiparis, tetapi tersedia pengelola arsip yang ditetapkan melalui surat tugas/surat keputusan.	2	Terdapat pengelola arsip
2.	Jumlah arsiparis pada unit pengolah yang telah tersertifikasi.	-	0	
3.	Kompetensi teknis pengelola arsip pada unit pengolah.	Pengelola arsip belum memenuhi kompetensi.	0	Terdapat pengelola arsip namun belum mengikuti pendidikan dan pelatihan

NO	ASPEK/SUB-ASPEK/BAGIAN/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS
2.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN			
2.2.	SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN			
1.	Ketersediaan sarana penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai dengan kriteria.	Seluruh sarana penyimpanan arsip aktif konvensional memenuhi kriteria.	4	
2.	Unit pengolah menyimpan arsip aktif konvensional kartografi dan/atau kearsitekturan, serta/atau media baru foto menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai.	TIDAK MENJADI PEMBAGI	-	Tidak ada arsip kartografi dan arsip foto pada unit

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian hasil pengawasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar **52,97 (Lima Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Tujuh)** dengan kategori “**CC (Cukup)**”. Adapun hasil penilaian untuk setiap aspek adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT SUB-ASPEK	NILAI SUB-ASPEK	BOBOT ASPEK	NILAI AKHIR
1	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	2000			50,67	70%	35,47
	1.1. SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP	700	350	20%	10,00		
	1.2. SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP	200	150	20%	15,00		
	1.3. SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP	900	660	35%	25,67		
	1.4. SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP	200	0	25%	0,00		
2	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	400			58,33	30%	17,50
	2.1. SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN	300	50	50%	8,33		
	2.2. SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN	100	100	50%	50,00		
TOTAL NILAI STANDAR/ NILAI/ BOBOT ASPEK/ NILAI AKHIR						100%	52,97 CC (CUKUP)

Berdasarkan hasil penilaian tersebut agar pejabat yang bertanggung jawab pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan khususnya pada aspek-aspek yang memperoleh penilaian belum baik.

Mengetahui,
Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus

Jakarta, 3 Desember 2025
Kepala Unit Kearsipan



Dadi Surjadi



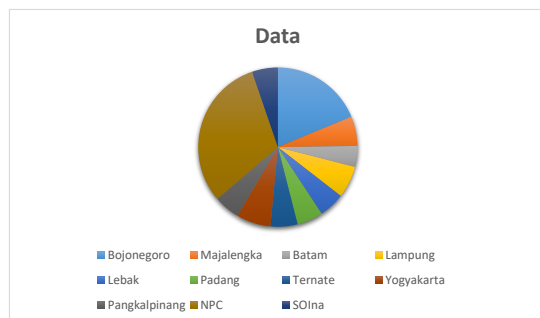
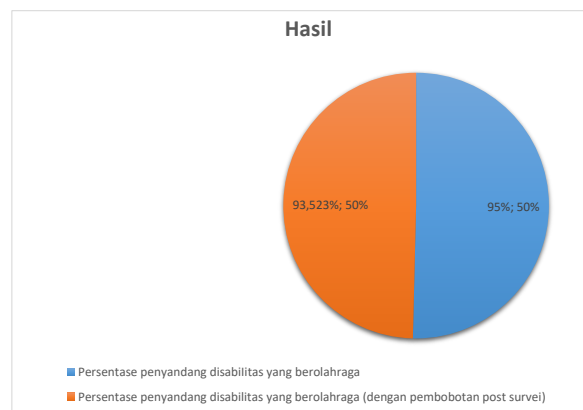
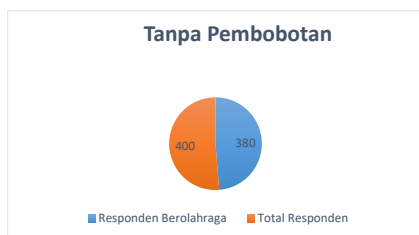
Ferry Hadju

Tanpa Pembobotan	
Responden Berolahraga	380
Total Responden	400
Persentase	95%

No.	Dengan pembobotan post survei	Responden	Responden Olahraga	Total Peserta	Bobot	Nilai Awal	Nilai Akhir
1	Bojonegoro	75	73	290	0,078	0,973	0,076
2	Majalengka	24	23	290	0,078	0,958	0,074
3	Batam	17	9	290	0,078	0,529	0,041
4	Lampung	26	26	290	0,078	1,000	0,078
5	Lebak	21	21	290	0,078	1,000	0,078
6	Padang	21	21	290	0,078	1,000	0,078
7	Ternate	22	22	290	0,078	4,000	0,078
8	Yogyakarta	28	24	290	0,078	0,857	0,067
9	Pangkalpinang	21	21	290	0,078	1,000	0,078
10	NPC	124	120	613	0,164	0,968	0,159
11	SOIna	21	20	510	0,137	0,952	0,130
Jumlah		400	380	3733	1,003	12,264	0,935

Persentase penyandang disabilitas yang berolahraga	95%
Persentase penyandang disabilitas yang berolahraga (dengan pembobotan post survei)	93,523%

Berdasarkan hasil survei penyandang disabilitas yang berolahraga dari 11 lokasi diperoleh hasil 95% (93,523%) yang berolahraga. Nilai tersebut hanya menggambarkan responden yang menjadi sampel dan tidak dapat menggambarkan capaian Nasional maupun wilayah tertentu.

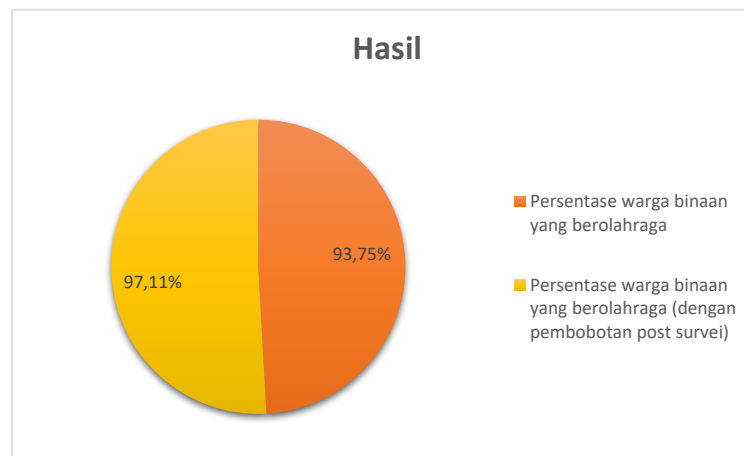
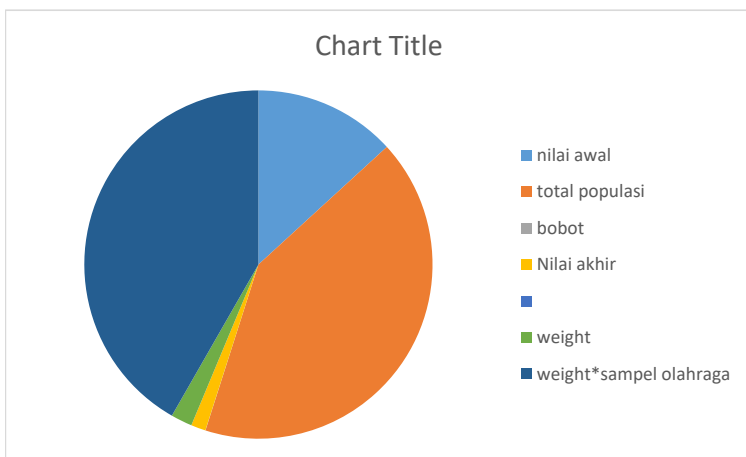


Jumlah populasi/jumlah

Jumlah Responden yang Berolahraga			nilai awal	total populasi	bobot	Nilai akhir	weight	weight*sampel olahraga
Mamuju	21	21	100,00	316	0,10	10,31	15,05	316,00
LPKA	53	43	81,13	252	0,08	6,67	4,75	204,45
LPP	51	51	100,00	410	0,13	13,38	8,04	410,00
Rutan	51	50	98,04	2086	0,68	66,75	40,90	2045,10
	176	165	93,75	3064	1	97,11		2975,55

Persentase warga binaan yang berolahraga	93,75%
Persentase warga binaan yang berolahraga (dengan pembobotan post survei)	97,11%

Berdasarkan hasil survei warga binaan yang berolahraga dari 4 lokasi diperoleh hasil 93,75% yang berolahraga. Nilai tersebut hanya menggambarkan responden yang menjadi sampel dan tidak dapat menggambarkan capaian nasional maupun wilayah tertentu.



Survey Aktivitas Fisik Seminggu Terakhir

Terima kasih telah berpartisipasi dalam Event Olahraga Disabilitas. Kami berharap kegiatan tersebut memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menginspirasi Anda untuk terus aktif bergerak.

Untuk meningkatkan kualitas program dan memastikan dampak positifnya berlanjut, kami ingin mengetahui apakah Anda masih melakukan aktivitas olahraga setelah mengikuti event tersebut. Jawaban Anda sangat berarti sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan olahraga ke depan.

Mohon luangkan sedikit waktu untuk mengisi formulir singkat ini. Terima kasih atas dukungan dan kontribusi Anda

*** Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi**

1. 1. Nama Lengkap *

2. 2. NIK/NIS *

3. 3. Jenis Kelamin *

Tandai satu oval saja.

Laki-laki

Perempuan

4. 4. Usia *

5. 5. Tinggi Badan (Cm) *

6. 6. Berat Badan (Kg) *

7. 7. Kabupaten/Kota Asal *

8. 8. Nama Sekolah/Komunitas *

9. 9. Kategori Disabilitas *

Centang semua yang sesuai.

Tunadaksa

Tunanetra

Tunarungu

Tunawicara

Tunagrahita

Down Syndrome

Cerebral Palsy

Yang lain: _____

10. 10. Apakah Anda berolahraga dalam seminggu terakhir? (Jika tidak langsung ke pertanyaan 18.) *

Tandai satu oval saja.

Ya *Langsung ke pertanyaan 11*

Tidak *Langsung ke pertanyaan 21*

11. 11. Jika Ya, berapa kali anda berolahraga dalam seminggu terakhir? *

12. 12. Berapa lama rata-rata waktu setiap kali anda berolahraga? *

Tandai satu oval saja.

<30 Menit

30 - 60 Menit

>60 Menit

13. 13. Jenis olahraga apa yang anda lakukan dalam seminggu terakhir (**boleh lebih dari satu**)? *

Centang semua yang sesuai.

Jogging

Senam

Futsal / Sepak Bola

Bola Voli

Bulu Tangkis

Bola Basket

Yang lain: _____

14. 14. Apakah anda berolahraga secara berkelompok atau secara mandiri dalam seminggu terakhir? *

Tandai satu oval saja.

Sendiri

Berkelompok

Keduanya

15. 15. Seberapa teratur kegiatan olahraga dilakukan di Sekolah/Komunitas ini? *

Tandai satu oval saja.

- Tidak Teratur
- Kadang-kadang
- Cukup Teratur
- Sangat Teratur

16. 16. Seberapa termotivasi anda untuk ikut berolahraga? *

Tandai satu oval saja.

- Tidak Termotivasi
- Kurang Termotivasi
- Cukup Termotivasi
- Sangat Termotivasi

17. 17. Apa alasan utama anda berolahraga? **(boleh lebih dari satu)** *

Centang semua yang sesuai.

- Menjaga Kesehatan / Kebugaran
- Kegemaran / Hobi
- Mengisi Waktu
- Menjaga Penampilan
- Bersosialisasi
- Perintah Tugas
- Yang lain: _____

18. 18. Hambatan apa yang membuat anda tidak atau jarang berolahraga? *

Tandai satu oval saja.

- Fasilitas Kurang
- Waktu Terbatas
- Tidak Ada Pendamping
- Kurang Minat
- Kondisi Fisik
- Yang lain: _____

19. 19. Menurut anda apakah fasilitas olahraga yang tersedia sudah memadai *
bagi para penyandang disabilitas?

Tandai satu oval saja.

- Tidak Memadai
- Cukup Memadai
- Sangat Memadai

20. 20. Saran untuk meningkatkan partisipasi para penyandang disabilitas untuk *
berolahraga

21. 18. Hambatan apa yang membuat anda tidak atau jarang berolahraga? *

Tandai satu oval saja.

- Fasilitas Kurang
- Waktu Terbatas
- Tidak Ada Pendamping
- Kurang Minat
- Kondisi Fisik
- Yang lain: _____

22. 19. Menurut anda apakah fasilitas olahraga yang tersedia sudah memadai bagi para penyandang disabilitas? *

Tandai satu oval saja.

- Tidak Memadai
- Cukup Memadai
- Sangat Memadai

23. 20. Saran untuk meningkatkan partisipasi para penyandang disabilitas untuk berolahraga *

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Data Diri Peserta Festival Olahraga Lansia

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

1. Nama *

2. Jenis Kelamin *

Tandai satu oval saja.

Laki-

Perempuan

3. Usia *

4. Tinggi Badan (cm) *

5. Berat Badan (kg) *

6. Komunitas *

7. Lokasi Kegiatan (Nama Daerah) *

8. Apakah dalam seminggu terakhir berolahraga? *

Tandai satu oval saja.

Ya

Tidak

9. Jika iya, cabang olahraga apa yang rutin dilakukan?

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

**SURVEI WARGA BINAAN YANG BEROLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025**

Petunjuk Pengisian

1. *Perhatian : informasi yang disampaikan terutama mengenai informasi pribadi merupakan data yang akan dijaga kerahasiannya dan jika terjadi kebocoran data maka pemilik data akan bertanggungjawab sepenuhnya. Adapun data yang disajikan dalam bentuk agregat mengenai partisipasi olahraga dan tidak akan dikaitkan dengan identitas pribadi*
2. *Jawablah pertanyaan sesuai dengan kondisi anda/responden*
3. *Berilah tanda (√) pada jawaban berupa pilihan yang sesuai dengan kondisi anda/responden*

RAHASIA

A. KETERANGAN TEMPAT (DIISI PETUGAS)		
1. Provinsi	:	
2. Kabupaten / Kota	:	
3. Nama Lembaga Permasyarakatan	:	

B. IDENTITAS RESPONDEN		
4. Nomor Responden	:	
5. Nama (inisial)	:	
6. NIK	:	
7. Usia	:	_____ tahun
8. Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
9. Tinggi Badan	:	_____ cm
10. Berat Badan	:	_____ kg

C. PARTISIPASI BEROLAHRAGA		
11. Apakah anda mengikuti kegiatan olahraga dalam seminggu terakhir	:	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (jika responden menjawab tidak lanjut pertanyaan 16)
12. Jika Ya, berapa kali anda berolahraga dalam seminggu terakhir	:	_____ kali
13. Berapa lama rata-rata waktu anda berolahraga setiap kali	:	_____ menit
14. Jenis olahraga apa yang ada lakukan dalam seminggu terakhir (boleh lebih dari satu)	:	<input type="checkbox"/> Jogging <input type="checkbox"/> Senam <input type="checkbox"/> Futsal / Sepakbola <input type="checkbox"/> Bola voli <input type="checkbox"/> Bulu tangkis <input type="checkbox"/> Bola Basket <input type="checkbox"/> Lainnya _____



C. PARTISIPASI BEROLAHRAGA	
15. Apakah anda berolahraga secara berkelompok atau secara mandiri dalam seminggu terakhir	: <input type="checkbox"/> Berkelompok <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Keduanya
16. Seberapa teratur kegiatan olahraga dilakukan di Lembaga ini	: <input type="checkbox"/> Tidak teratur <input type="checkbox"/> Kadang-kadang <input type="checkbox"/> Cukup teratur <input type="checkbox"/> Sangat teratur
17. Seberapa termotivasi anda untuk ikut berolahraga	: <input type="checkbox"/> Tidak termotivasi <input type="checkbox"/> Kurang termotivasi <input type="checkbox"/> Cukup termotivasi <input type="checkbox"/> Sangat termotivasi
18. Apa alasan utama anda berolahraga	: <input type="checkbox"/> Menjaga Kesehatan / kebugaran <input type="checkbox"/> Kegemaran / hobi <input type="checkbox"/> Mengisi waktu <input type="checkbox"/> Menjaga penampilan <input type="checkbox"/> Bersosialisasi <input type="checkbox"/> Perintah petugas <input type="checkbox"/> Lainnya _____
19. Hambatan apa yang membuat anda tidak atau jarang berolahraga	: <input type="checkbox"/> Fasilitas kurang <input type="checkbox"/> Waktu terbatas <input type="checkbox"/> Tidak ada pendamping <input type="checkbox"/> Kurang minat <input type="checkbox"/> Kondisi Fisik <input type="checkbox"/> Lainnya _____

D. PENILAIAN DAN SARAN	
20. Menurut anda apakah fasilitas olahraga yang tersedia sudah memadai	: <input type="checkbox"/> Tidak memadai <input type="checkbox"/> Cukup memadai <input type="checkbox"/> Sangat memadai
21. Saran untuk meningkatkan kegiatan olahraga di Lembaga ini	:



LAPORAN TES KEBUGARAN DISABILITAS 2025



Tim Narasumber
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Universitas Negeri Jakarta

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan **Pelaksanaan Festival Olahraga Disabilitas (FOD)** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus dokumentasi hasil pengukuran dan pengolahan data yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Festival Olahraga Disabilitas merupakan salah satu upaya strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam mendorong peningkatan partisipasi aktivitas fisik penyandang disabilitas secara inklusif dan berkelanjutan. Pada pelaksanaan tahun ini, FOD tidak hanya difokuskan pada penyelenggaraan cabang olahraga adaptif, tetapi juga dilengkapi dengan pengukuran kebugaran jasmani peserta sebagai langkah awal menuju pendekatan berbasis data dalam pengembangan olahraga disabilitas.

Laporan ini menyajikan gambaran pelaksanaan kegiatan secara komprehensif, meliputi profil peserta berdasarkan jenis disabilitas, karakteristik antropometri (usia, tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh), serta hasil tes kebugaran kardiorespirasi menggunakan metode Rockport Walking Test. Selain itu, laporan ini juga memuat catatan pelaksanaan dan kendala lapangan yang ditemui, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat berbagai keterbatasan, baik dari sisi sarana prasarana, kondisi peserta, maupun kesiapan sumber daya manusia pendamping. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumentasi kegiatan, tetapi juga menjadi dasar perumusan rekomendasi dan tindak lanjut untuk pengembangan Festival Olahraga Disabilitas yang lebih adaptif, terstandar, dan berdampak jangka panjang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, pemerintah daerah, sekolah luar biasa (SLB), guru olahraga, relawan, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Festival Olahraga Disabilitas tahun ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan program olahraga disabilitas di masa yang akan datang.

**Tim Narasumber
2025**

Daftar Isi

<i>Kata Pengantar</i>	<i>ii</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>iii</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	- 1 -
1.1 Latar Belakang	- 1 -
1.2 Tujuan Kegiatan.....	- 1 -
1.3 Sasaran Kegiatan	- 2 -
1.4 Landasan Regulasi	- 2 -
<i>BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN</i>	- 4 -
2.1 Waktu dan Lokasi.....	- 4 -
2.2 Cabang Olahraga yang Dilaksanakan	- 5 -
<i>BAB III HASIL PELAKSANAAN</i>	- 7 -
3.1 Karakteristik Peserta	- 7 -
3.2 Ringkasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	20
3.3 Catatan Pelaksanaan dan Kendala Lapangan.....	20
<i>BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</i>	22
4.1 Kesimpulan.....	22
4.2 Rekomendasi	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Festival Olahraga Disabilitas merupakan bagian dari upaya strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan olahraga nasional yang berorientasi pada prinsip inklusivitas, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas. Kegiatan ini sejalan dengan amanat pembangunan sumber daya manusia yang menempatkan olahraga sebagai instrumen penting dalam peningkatan kesehatan, partisipasi sosial, serta penguatan kohesi sosial di masyarakat.

Penyelenggaraan Festival Olahraga Disabilitas pada sembilan titik lokasi, yaitu Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Majalengka, Provinsi Maluku Utara, Kota Padang, Provinsi Lampung, Kota Batam, Kabupaten Bojonegoro, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mencerminkan komitmen terhadap pemerataan layanan olahraga disabilitas lintas wilayah. Sebaran lokasi yang mencakup kawasan barat, tengah, dan timur Indonesia memberikan gambaran awal mengenai tingkat kesiapan daerah, respons masyarakat, serta variasi animo partisipasi terhadap kegiatan olahraga yang inklusif.

Selain sebagai kegiatan partisipatif, festival ini juga berfungsi sebagai instrumen pemetaan kebijakan, khususnya dalam mengidentifikasi tingkat animo peserta, ketersediaan dukungan ekosistem olahraga disabilitas di daerah, serta tantangan implementasi di lapangan. Data dan temuan dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan lanjutan, penguatan program daerah, serta integrasi olahraga disabilitas dalam perencanaan pembangunan olahraga yang berkelanjutan.

1.2 Tujuan Kegiatan

Penyelenggaraan Festival Olahraga Disabilitas bertujuan untuk:

1. Memetakan tingkat animo dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan olahraga pada sembilan titik pelaksanaan di berbagai daerah.
2. Menyediakan data empiris sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pengembangan olahraga disabilitas di tingkat daerah dan nasional.
3. Mendorong peningkatan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam penyediaan layanan olahraga yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Mendukung pengarusutamaan olahraga disabilitas sebagai bagian integral dari sistem pembangunan olahraga nasional.

1.3 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Festival Olahraga Disabilitas meliputi:

1. Penyandang disabilitas sebagai subjek utama pembangunan olahraga inklusif.
2. Pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan pemangku kepentingan terkait sebagai mitra dalam pengembangan kebijakan dan program olahraga disabilitas.
3. Masyarakat umum sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya olahraga yang setara dan inklusif.

1.4 Landasan Regulasi

Penyelenggaraan Festival Olahraga Disabilitas dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai regulasi dan kebijakan nasional yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh akses yang setara terhadap aktivitas olahraga, rekreasi, dan partisipasi sosial. Landasan regulasi tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang olahraga, kesehatan, dan rekreasi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga dilakukan secara adil, merata, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang menekankan pentingnya integrasi program inklusif dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, yang mendorong penguatan kebijakan lintas sektor dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang olahraga dan aktivitas fisik.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kualitas kesehatan, serta penguatan inklusi sosial sebagai prioritas nasional, dengan olahraga sebagai salah satu instrumen pendukung.
6. Kebijakan dan program Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, khususnya dalam pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan

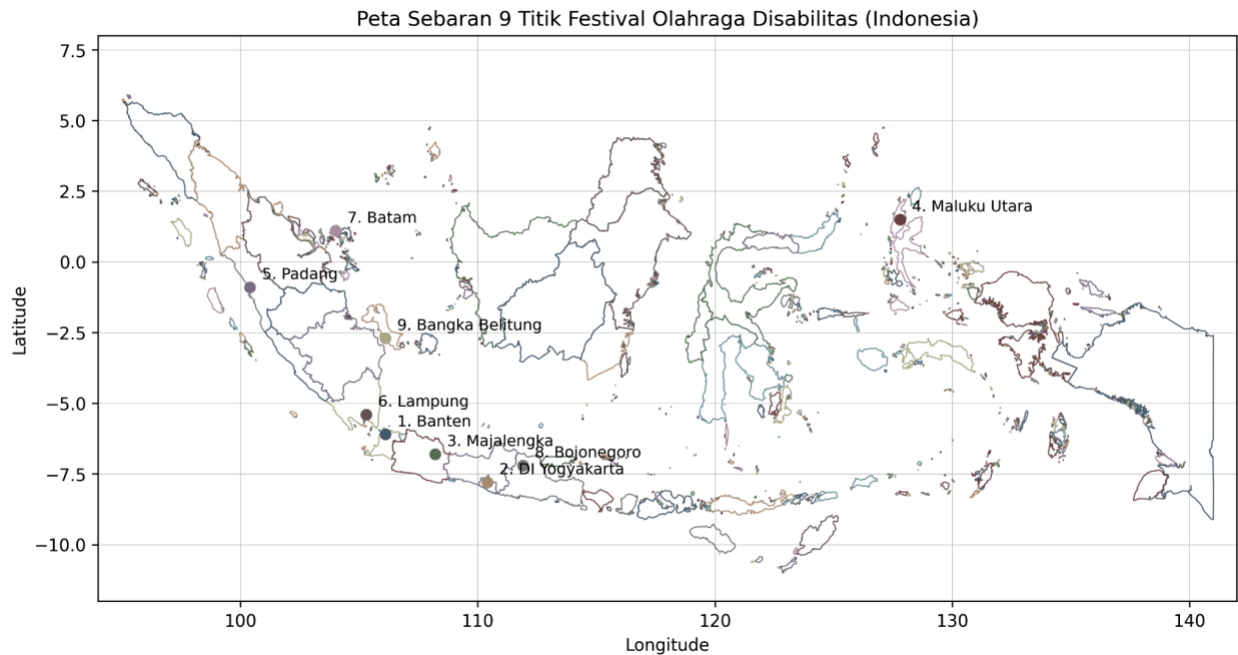
- olahraga disabilitas, yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerataan akses layanan olahraga di daerah.
7. Pasal 26 (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

Berdasarkan landasan regulasi tersebut, Festival Olahraga Disabilitas diposisikan tidak hanya sebagai kegiatan seremonial atau event olahraga, tetapi sebagai bagian dari implementasi kebijakan publik dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas, penguatan inklusi sosial, serta pembangunan olahraga yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Waktu dan Lokasi

Festival Olahraga Disabilitas dilaksanakan pada tahun 2025 dengan pelaksanaan kegiatan yang tersebar di sembilan titik lokasi pada beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Majalengka, Provinsi Maluku Utara, Kota Padang, Provinsi Lampung, Kota Batam, Kabupaten Bojonegoro, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaan kegiatan pada berbagai lokasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan akses, kesiapan daerah, serta potensi partisipasi penyandang disabilitas di masing-masing wilayah. Penyelenggaraan pada setiap titik disesuaikan dengan kondisi geografis, fasilitas yang tersedia, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat.



Nama Tempat	Tanggal	Tempat
Bangka Belitung	29 Juli-1 Agustus 2025	SLB Negeri Pangkal Pinang
Lebak Banten	18-22 Agustus 2025	SKH Negeri 2 Lebak
Yogyakarta	23-25 Agustus 2025	Alun-Alun Kidul Yogyakarta
Ternate	24-27 September 2025	SLB Negeri Sasa Ternate
Majalengka	29 September-2 Oktober 2025	SLB Negeri Majalengka
Padang	21-24 Oktober 2025	SLB Negeri 2 Padang
Lampung	28-31 Oktober 2025	SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi
Batam	18-21 November 2025	SLB Negeri Batam
Bojonegoro	25-28 November 2025	Gor Utama Ngumpakdalem

2.2 Cabang Olahraga yang Dilaksanakan

Pelaksanaan Festival Olahraga Disabilitas (FOD) tahun ini dirancang sebagai wahana pengenalan, partisipasi, dan pembiasaan aktivitas fisik bagi penyandang disabilitas melalui pendekatan olahraga adaptif. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk beberapa pos cabang olahraga, yang disesuaikan dengan karakteristik jenis disabilitas peserta, ketersediaan sarana prasarana, serta prinsip keamanan dan inklusivitas. Seluruh cabang olahraga dilaksanakan secara rotasi pos pada rentang waktu pukul 09.00–11.30, dengan pendampingan guru, relawan, dan tenaga teknis di setiap pos. Model ini memungkinkan seluruh peserta memperoleh pengalaman bergerak yang beragam, baik yang bersifat fisik, koordinatif, maupun kognitif.

Cabang atletik adaptif dirancang untuk melatih kemampuan gerak dasar, seperti lari, perubahan arah, keseimbangan, dan koordinasi. Setiap kelompok mengikuti aktivitas selama ± 5 menit dengan lintasan sederhana menggunakan cone, pembatas lintasan, dan bola plastik kecil. Untuk peserta tuna netra, disediakan tongkat bantu dan relawan pendamping. Atletik adaptif menjadi salah satu cabang dengan tingkat partisipasi tinggi karena bersifat dinamis, sederhana, dan mudah dimodifikasi.

Para tenis meja diperuntukkan bagi peserta dengan disabilitas tuna grahita, tuna rungu, dan tuna daksa. Aktivitas dilakukan dalam format teori singkat dan praktik langsung, dengan durasi 3–5 menit per kelompok berisi empat peserta. Cabang ini berfokus pada pengembangan koordinasi mata–tangan, konsentrasi, dan kontrol gerak halus. Peralatan yang digunakan relatif sederhana, terdiri dari meja tenis, bet, bola, serta pendamping relawan, sehingga mudah direplikasi di sekolah.

Boccia ditujukan khusus bagi peserta dengan disabilitas tuna daksa, khususnya yang memiliki keterbatasan mobilitas. Kegiatan dilaksanakan pada satu lapangan dengan pendekatan teori dan praktik. Peserta menggunakan bola boccia (merah, biru, dan putih), dengan dukungan ramp bantu lempar bagi peserta dengan keterbatasan gerak ekstrem. Cabang ini melatih akurasi, strategi, dan pengambilan keputusan, serta memberikan ruang partisipasi setara bagi peserta dengan hambatan fisik berat.

Badminton adaptif diikuti oleh peserta dengan disabilitas tuna rungu, tuna grahita, dan tuna daksa. Aktivitas dilakukan menggunakan net mini atau portabel, raket, dan shuttlecock, dengan penyesuaian posisi bermain (duduk atau berdiri). Cabang ini bertujuan meningkatkan kelincahan, koordinasi, dan respons motorik, serta menjadi olahraga yang familiar bagi peserta sehingga meningkatkan antusiasme dan keberanian untuk bergerak aktif.

Catur tuna netra dilaksanakan khusus bagi peserta dengan disabilitas penglihatan. Aktivitas menggunakan papan catur khusus dan didampingi relawan. Meskipun tidak bersifat aerobik, cabang ini berperan penting dalam mengembangkan konsentrasi, memori, dan kemampuan kognitif peserta. Catur menjadi bagian dari pendekatan

holistik FOD, yang tidak hanya menekankan aktivitas fisik, tetapi juga stimulasi mental dan sosial.

Sebagai inovasi pelaksanaan FOD tahun ini, dilakukan tes kebugaran kardiorespirasi menggunakan Rockport Walking Test (1,6 km). Tes ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal tingkat kebugaran peserta, yang sebelumnya belum pernah diintegrasikan dalam pelaksanaan FOD. Peserta diminta berjalan sejauh 1.600 meter secepat mungkin, kemudian dilakukan pengukuran waktu tempuh dan denyut jantung pasca-tes untuk estimasi VO_2max . Pelaksanaan tes dilakukan dengan berbagai penyesuaian sesuai kondisi lapangan dan karakteristik peserta.

BAB III HASIL PELAKSANAAN

3.1 Karakteristik Peserta

Data ini dikumpulkan untuk memperoleh gambaran umum mengenai profil peserta yang terlibat, khususnya ditinjau dari aspek jenis kelamin. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi keterlibatan peserta serta sebagai konteks pendukung dalam interpretasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penyajian distribusi peserta berdasarkan jenis kelamin ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai pelaksanaan kegiatan di lapangan. Data disajikan dalam bentuk persentase agar perbandingan antar lokasi dapat dilihat secara lebih jelas dan proporsional. Informasi ini menjadi pijakan awal bagi narasumber dalam menganalisis hasil kegiatan selanjutnya, termasuk capaian kebugaran jasmani peserta dan respons terhadap materi yang diberikan selama pelaksanaan program.

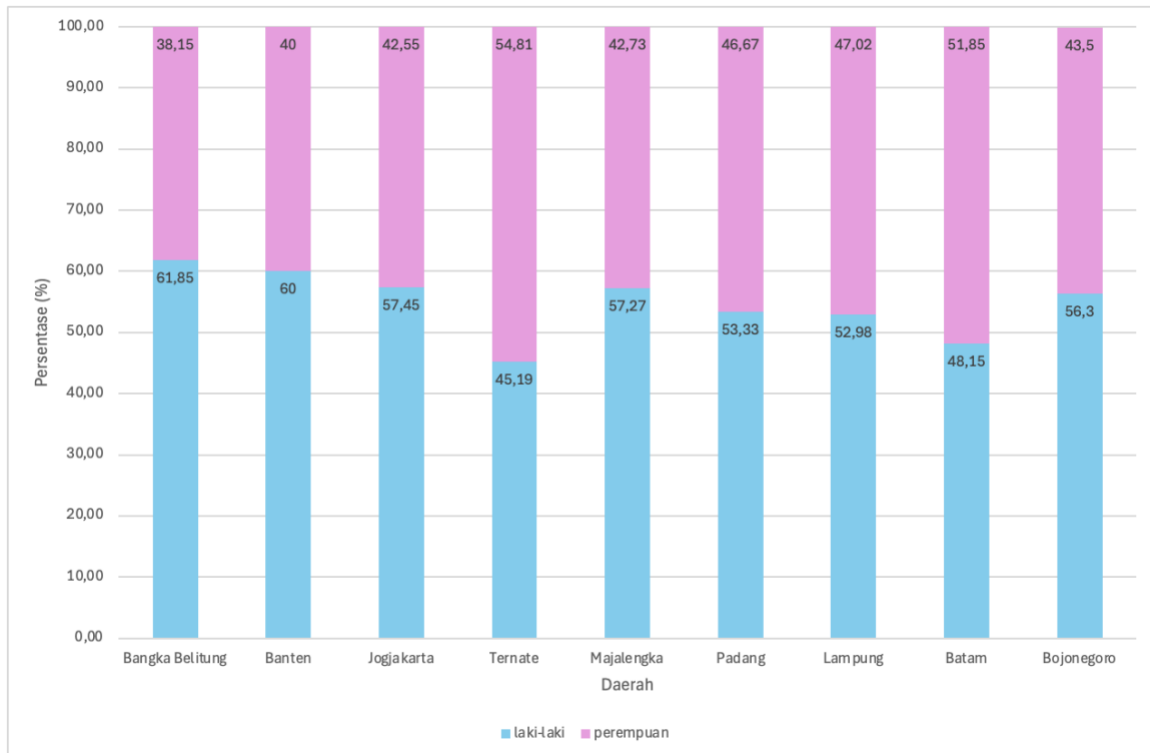
Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa peserta kegiatan memiliki komposisi gender, usia, serta karakteristik antropometri yang bervariasi antar lokasi pelaksanaan. Secara umum, peserta laki-laki mendominasi jumlah peserta di sebagian besar kota, dengan persentase berkisar antara 48,15% hingga 61,85%. Kota Bangka Belitung dan Banten menunjukkan proporsi peserta laki-laki tertinggi, sementara Ternate dan Batam menjadi lokasi dengan proporsi peserta perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pola partisipasi peserta antar wilayah.

Dari aspek usia, peserta laki-laki umumnya berada pada rentang remaja hingga dewasa muda, dengan rerata usia sekitar 12–18 tahun, sedangkan peserta perempuan pada beberapa kota menunjukkan usia rata-rata yang lebih tinggi, terutama di Ternate, Padang, Lampung, dan Batam. Perbedaan usia ini mengindikasikan variasi karakteristik peserta yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Ditinjau dari karakteristik fisik, peserta laki-laki secara konsisten memiliki tinggi badan rata-rata lebih besardibandingkan peserta perempuan di seluruh kota. Sementara itu, berat badan peserta relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, meskipun terdapat variasi antar lokasi yang dipengaruhi oleh usia dan karakteristik wilayah setempat.

Tabel 1. Karakteristik Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kota

Daerah	Laki-Laki				Perempuan			
	Jumlah (%)	usia (tahun)	tinggi badan (cm)	berat badan (kg)	jumlah (%)	usia (tahun)	tinggi badan (cm)	berat badan (kg)
Bangka Belitung	61,85	14,01	152,00	46,90	38,15	13,84	144,00	43,11
Banten	60,00	14,7	154,20	46,62	40,00	15,67	148,8	45,54
Jogjakarta	57,45	16,96	164,00	53,07	42,55	15,20	153,00	46,42
Ternate	45,19	12,37	140,00	51,55	54,81	24,54	144,00	49,42
Majalengka	57,27	14,31	149,00	44,21	42,73	14,43	141,00	39,38
Padang	53,33	17,39	153,65	50,68	46,67	25,39	147,57	50,00
Lampung	52,98	15,34	147,53	48,07	47,02	22,92	147,77	48,34
Batam	48,15	15,27	151,76	44,09	51,85	23,68	149,58	48,37
Bojonegoro	56,30	17,74	150,74	48,54	43,5	17,95	142,97	46,07

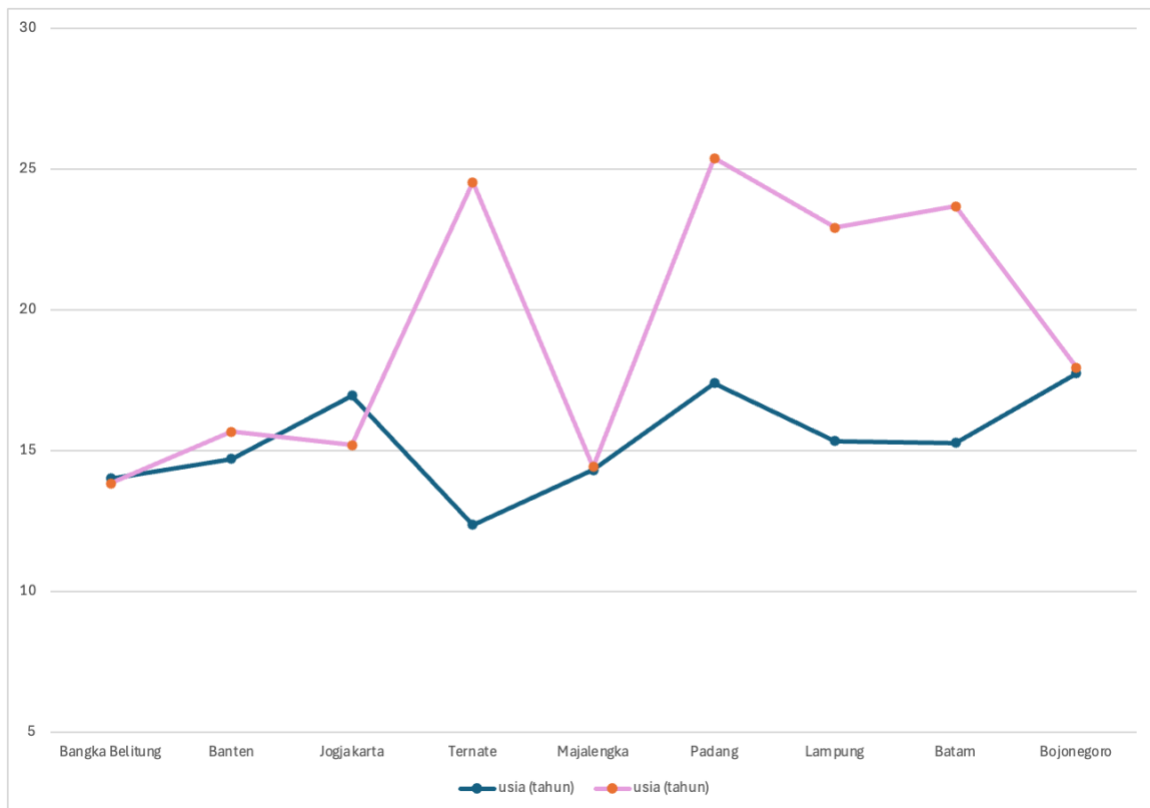
Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 1, terlihat adanya variasi komposisi peserta berdasarkan jenis kelamin di setiap lokasi pelaksanaan kegiatan. Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran visual yang lebih jelas mengenai perbandingan proporsi peserta laki-laki dan perempuan antar daerah, data tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk grafik.



Gambar 1. Komposisi Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin di Setiap Daerah

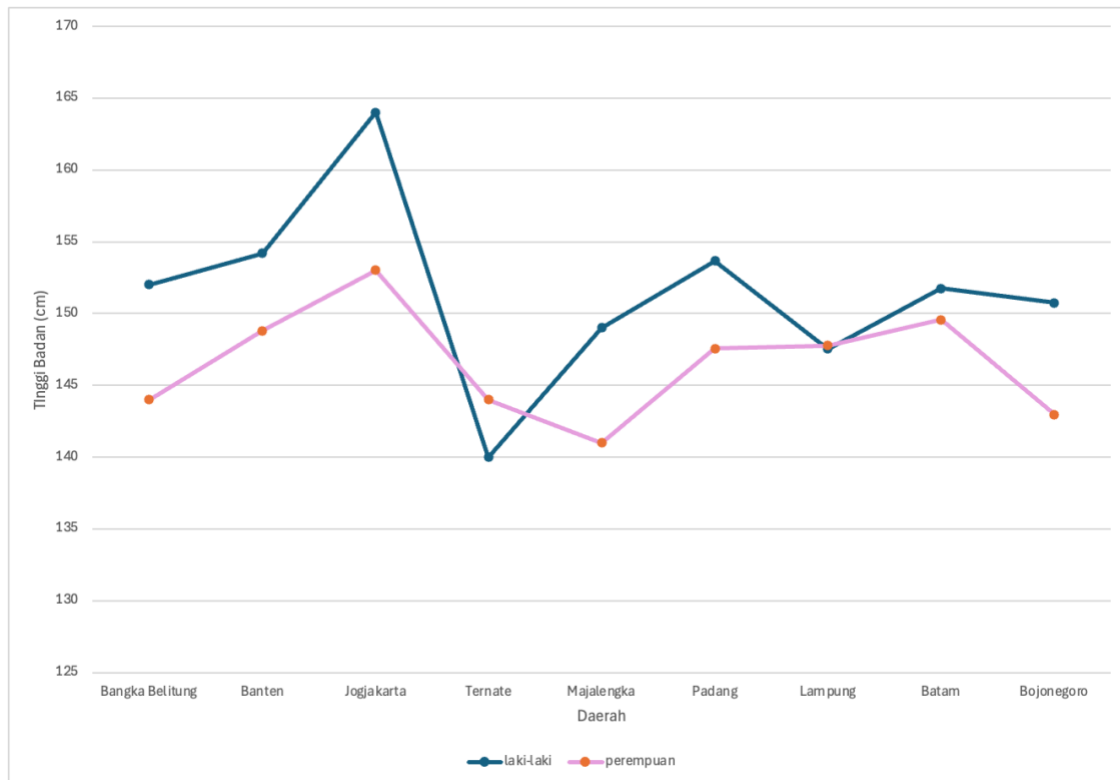
Berdasarkan grafik komposisi gender, dapat diketahui bahwa pada sebagian besar daerah jumlah peserta laki-laki lebih dominan dibandingkan peserta perempuan. Namun

demikian, pada beberapa lokasi, seperti Ternate dan Batam, proporsi peserta perempuan terlihat lebih besar daripada laki-laki. Sementara itu, daerah lain menunjukkan komposisi gender yang relatif seimbang, yang mencerminkan variasi tingkat partisipasi peserta pada setiap wilayah pelaksanaan kegiatan. Selain komposisi gender, karakteristik peserta juga ditinjau dari aspek usia. Rata-rata usia peserta laki-laki dan perempuan di setiap daerah disajikan pada grafik berikut.



Grafik 1. Perbedaan rata-rata usia antara laki-laki dan Perempuan per daerah

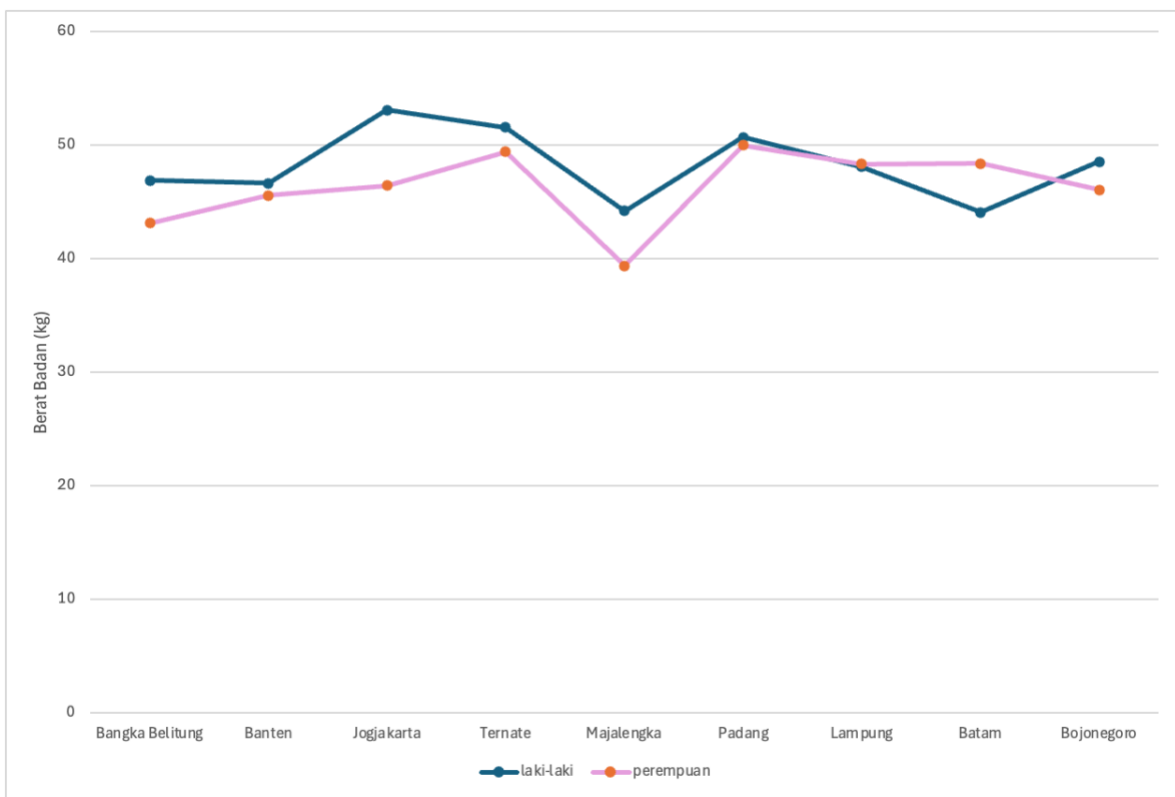
Grafik tersebut menunjukkan perbandingan rata-rata usia peserta laki-laki dan perempuan pada setiap lokasi pelaksanaan kegiatan. Secara umum, rata-rata usia peserta bervariasi antar daerah, baik pada kelompok laki-laki maupun perempuan. Pada beberapa kota seperti Bangka Belitung, Banten, dan Majalengka, rata-rata usia peserta laki-laki dan perempuan relatif berdekatan, menunjukkan komposisi usia peserta yang cukup seimbang. Sementara itu, pada Jogjakarta, peserta laki-laki memiliki rata-rata usia yang lebih tinggi dibandingkan peserta perempuan. Perbedaan yang cukup mencolok terlihat pada Ternate dan Padang, di mana rata-rata usia peserta perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan peserta laki-laki. Kondisi serupa juga terlihat di Lampung dan Batam, meskipun dengan selisih yang tidak sebesar di Padang. Pada Bojonegoro, rata-rata usia peserta laki-laki dan perempuan kembali menunjukkan nilai yang relatif seimbang.



Grafik 2. Rata-rata Tinggi Badan Laki-laki dan Perempuan per Daerah

Grafik tersebut menunjukkan perbandingan rata-rata tinggi badan peserta laki-laki dan perempuan pada setiap lokasi pelaksanaan kegiatan. Secara umum, peserta laki-laki memiliki tinggi badan rata-rata lebih besar dibandingkan peserta perempuan di seluruh daerah, meskipun terdapat variasi nilai antar lokasi. Nilai rata-rata tinggi badan tertinggi pada kedua jenis kelamin terlihat di Jogjakarta, sementara Ternate menunjukkan rata-rata tinggi badan terendah. Pada beberapa daerah, seperti Lampung dan Batam, perbedaan tinggi badan antara laki-laki dan perempuan relatif kecil, menunjukkan karakteristik fisik peserta yang cukup berimbang.

Grafik 3 menunjukkan perbandingan rata-rata berat badan peserta laki-laki dan perempuan pada setiap lokasi pelaksanaan kegiatan. Secara umum, rata-rata berat badan peserta laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan peserta perempuan di sebagian besar daerah, meskipun selisihnya relatif tidak terlalu besar. Nilai rata-rata berat badan tertinggi pada peserta laki-laki terlihat di Jogjakarta dan Padang, sedangkan nilai terendah terlihat di Majalengka. Pada kelompok perempuan, pola yang relatif serupa juga terlihat, dengan berat badan tertinggi di Padang, sementara Majalengka menunjukkan nilai rata-rata terendah. Pada beberapa daerah, seperti Lampung dan Batam, rata-rata berat badan antara laki-laki dan perempuan tampak hampir seimbang.



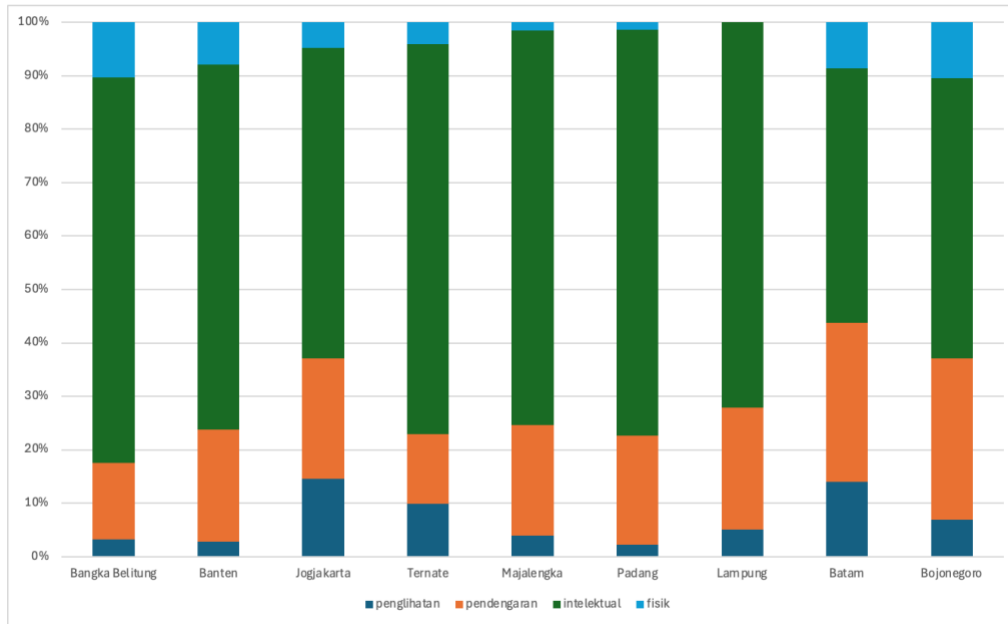
Grafik 3. Rata-rata Berat Badan Laki-laki dan Perempuan per Daerah

Selain karakteristik demografis dan fisik peserta, kegiatan ini juga melibatkan peserta dengan latar belakang jenis disabilitas yang beragam. Data jenis kedisabilitasan dikumpulkan untuk memberikan gambaran mengenai profil peserta yang mengikuti kegiatan serta sebagai konteks dalam pelaksanaan dan evaluasi aktivitas yang diberikan.

Tabel 2. Distribusi Data Jenis Kedisabilitas per Daerah

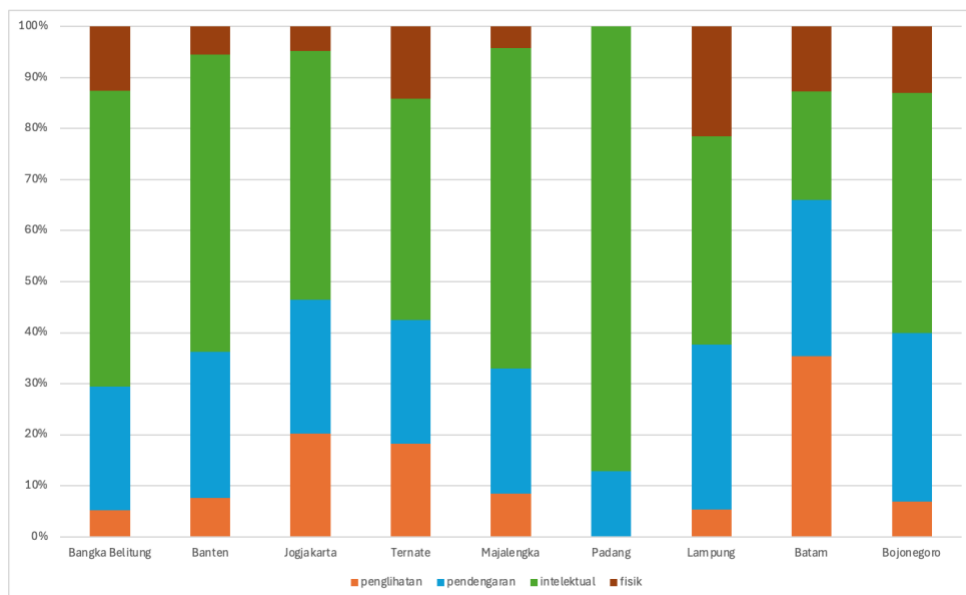
Daerah	laki-laki (%)				perempuan (%)			
	penglihatan	pendengaran	intelektual	fisik	penglihatan	pendengaran	intelektual	fisik
Bangka Belitung	3,25	14,28	72,07	10,38	5,26	24,21	57,89	12,63
Banten	2,88	20,86	68,34	7,91	7,69	28,57	58,24	5,49
Jogjakarta	14,52	22,58	58,06	4,83	20,24	26,19	48,81	4,76
Ternate	9,83	13,11	72,95	4,09	18,24	24,32	43,24	14,19
Majalengka	3,97	20,63	73,81	1,58	8,51	24,47	62,76	4,25
Padang	2,19	20,44	75,91	1,46	0	12,86	87,14	0
Lampung	5,11	22,63	71,53	0	5,38	32,26	40,86	21,51
Batam	13,85	29,23	46,92	8,46	35,71	30,71	21,43	12,85
Bojonegoro	6,99	30,07	52,45	10,49	6,96	33,04	46,96	13,04

Berdasarkan distribusi jenis kedisabilitas, peserta kegiatan terdiri atas beberapa kelompok disabilitas dengan proporsi yang berbeda. Variasi jenis disabilitas ini menunjukkan keberagaman kebutuhan dan karakteristik peserta yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pendekatan pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi peserta di lapangan.



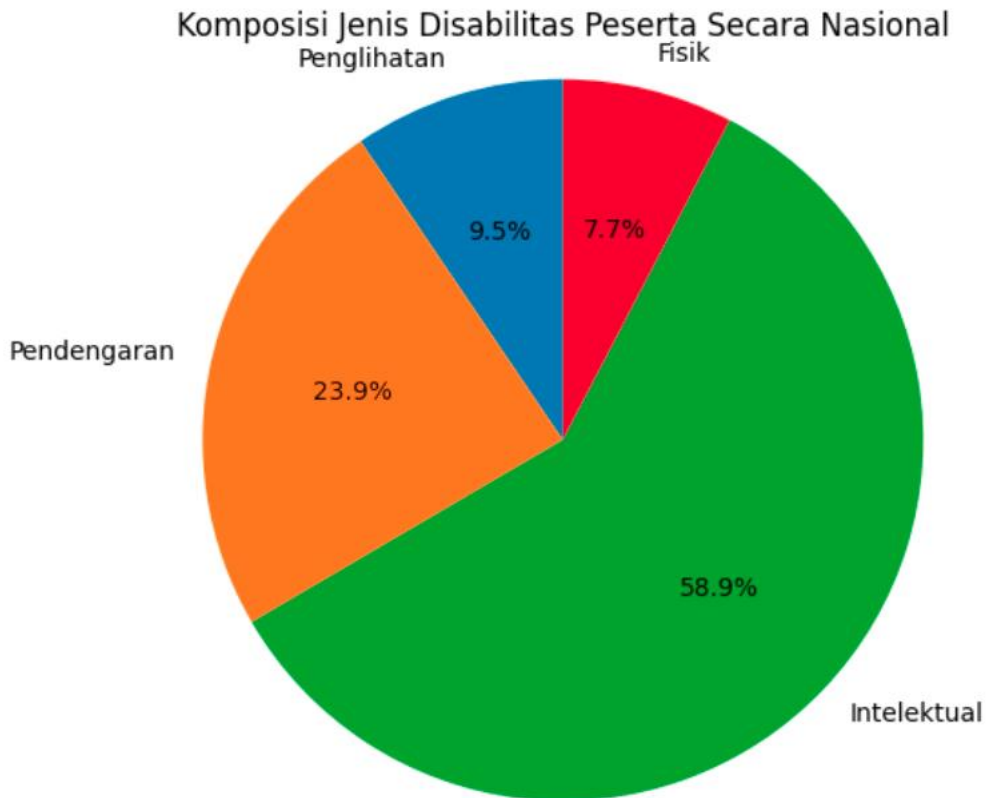
Grafik 4. Distribusi jenis disabilitas peserta laki-laki

Grafik 4 distribusi jenis disabilitas peserta laki-laki menunjukkan bahwa disabilitas intelektual merupakan kategori yang paling dominan di seluruh lokasi pelaksanaan kegiatan. Pada sebagian besar kota, proporsi peserta laki-laki dengan disabilitas intelektual berada di atas 50%. Sementara itu, disabilitas pendengaran dan penglihatan muncul dengan persentase yang lebih kecil dan bervariasi antar daerah. Disabilitas fisik memiliki proporsi paling rendah pada hampir seluruh lokasi.



Grafik 5. Distribusi jenis disabilitas peserta perempuan

Grafik 5 distribusi jenis disabilitas peserta perempuan menunjukkan pola yang serupa dengan peserta laki-laki, di mana disabilitas intelektual tetap menjadi kategori yang paling dominan di sebagian besar kota. Namun demikian, pada beberapa daerah terlihat proporsi disabilitas pendengaran dan penglihatan yang relatif lebih besar dibandingkan peserta laki-laki. Disabilitas fisik pada peserta perempuan juga menunjukkan variasi antar wilayah, meskipun secara umum berada pada persentase yang lebih kecil.



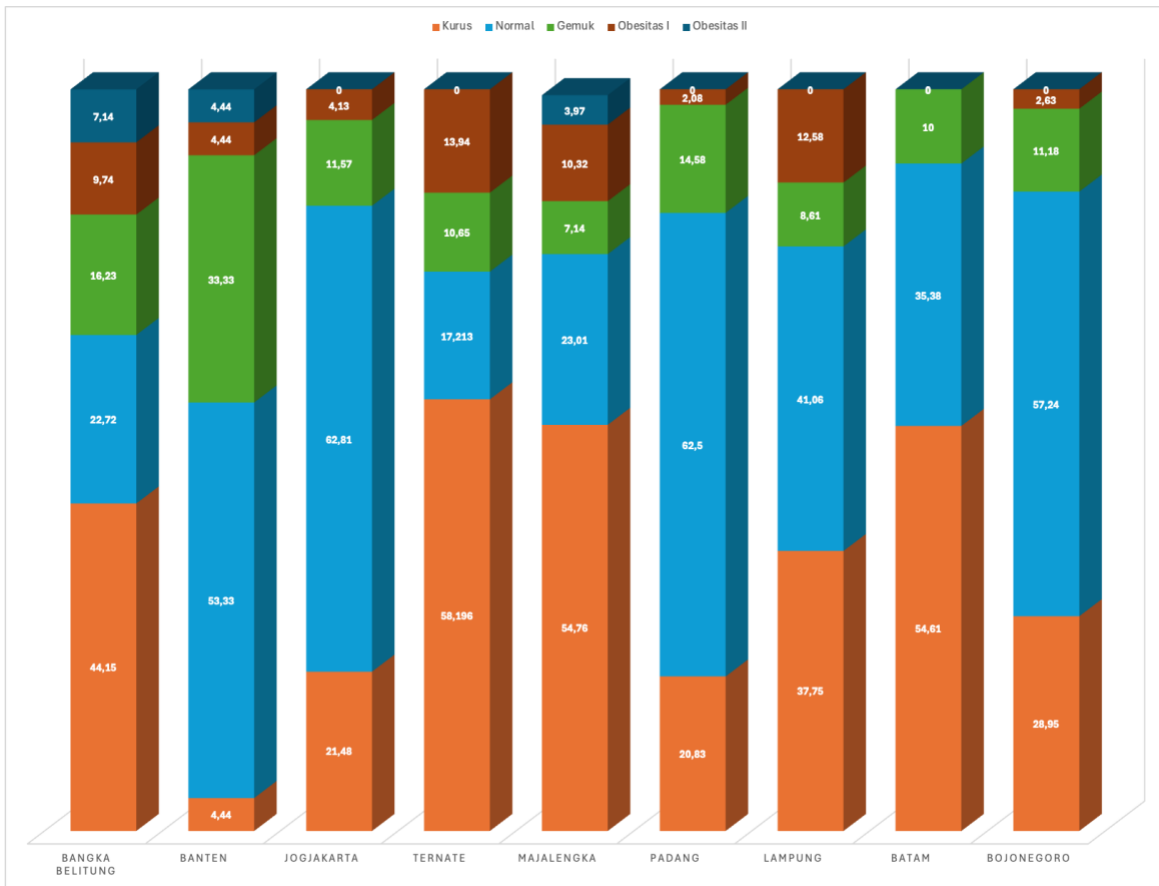
Gambar 2. Komposisi jenis disabilitas secara nasional

Gambar 2 menunjukkan komposisi jenis disabilitas peserta secara nasional. Berdasarkan data tersebut, peserta kegiatan didominasi oleh penyandang disabilitas intelektual, dengan proporsi mendekati 60% dari keseluruhan peserta. Selanjutnya, peserta dengan disabilitas pendengaran menempati proporsi terbesar kedua, diikuti oleh disabilitas penglihatan dan disabilitas fisik. Komposisi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan secara umum lebih banyak melibatkan peserta dengan disabilitas intelektual, sejalan dengan sasaran utama kegiatan yang dilaksanakan. Perlu dicatat bahwa kategori disabilitas intelektual mencakup beberapa ragam kondisi, sehingga masih memungkinkan dilakukan pengelompokan lebih lanjut untuk mengidentifikasi jenis disabilitas intelektual yang paling dominan pada peserta kegiatan.

Selain status antropometri peserta yang telah disajikan sebelumnya, karakteristik peserta juga ditinjau berdasarkan jenis kedisabilitas. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang peserta yang terlibat dalam kegiatan serta menjadi konteks penting dalam pelaksanaan aktivitas dan interpretasi hasil kebugaran jasmani.

Tabel 3. BMI dalam persentase

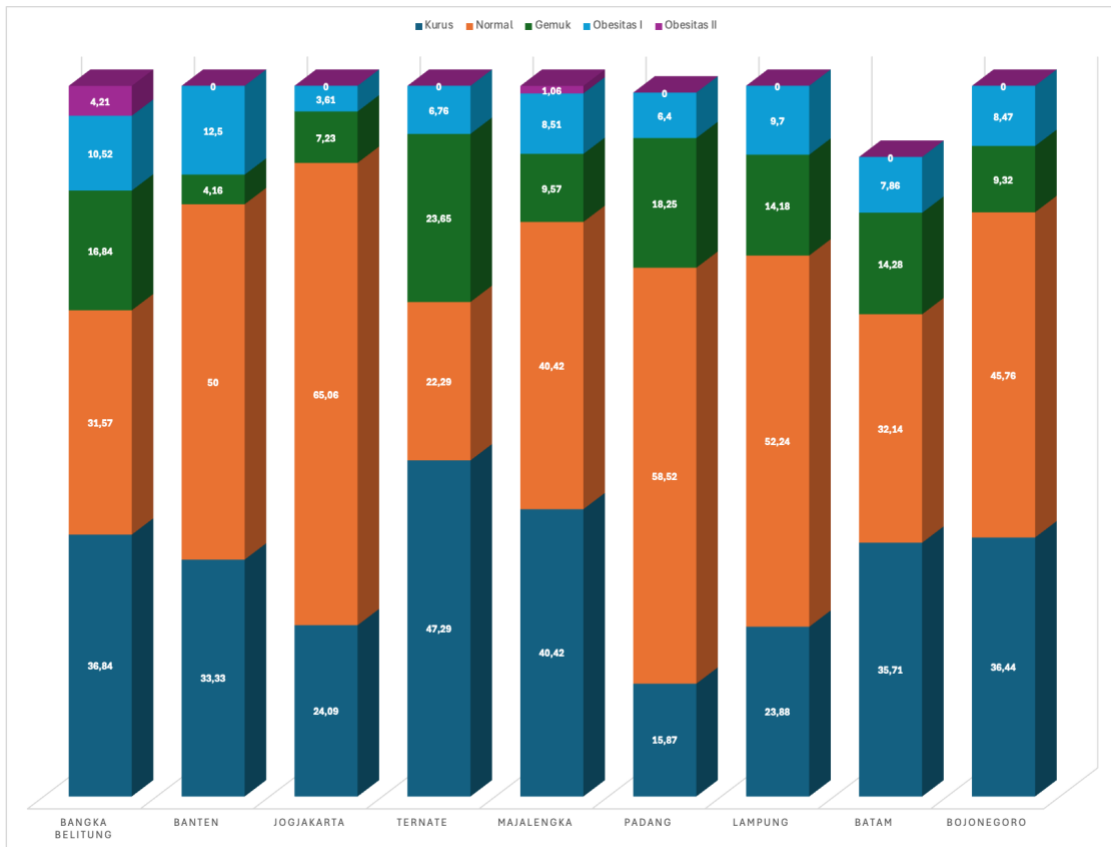
kota	laki-laki					perempuan				
	Kurus	Normal	Gemuk	Obesitas I	Obesitas II	Kurus	Normal	Gemuk	Obesitas I	Obesitas II
Bangka Belitung	44,15	22,72	16,23	9,74	7,14	36,84	31,57	16,84	10,52	4,21
Banten	4,44	53,33	33,33	4,44	4,44	33,33	50,00	4,16	12,5	0,00
Jogjakarta	21,48	62,81	11,57	4,13	0,00	24,09	65,06	7,23	3,61	0,00
Ternate	58,196	17,213	10,65	13,94	0,00	47,29	22,29	23,65	6,76	0,00
Majalengka	54,76	23,01	7,14	10,32	3,97	40,42	40,42	9,57	8,51	1,06
Padang	20,83	62,5	14,58	2,08	0,00	15,87	58,52	18,25	6,40	0,00
Lampung	37,75	41,06	8,61	12,58	0,00	23,88	52,24	14,18	9,70	0,00
Batam	54,61	35,38	10,00	0,00	0,00	35,71	32,14	14,28	7,86	0,00
Bojonegoro	28,95	57,24	11,18	2,63	0,00	36,44	45,76	9,32	8,47	0,00



Grafik 6. Distribusi Kategori BMI Peserta Laki-laki Berdasarkan Daerah

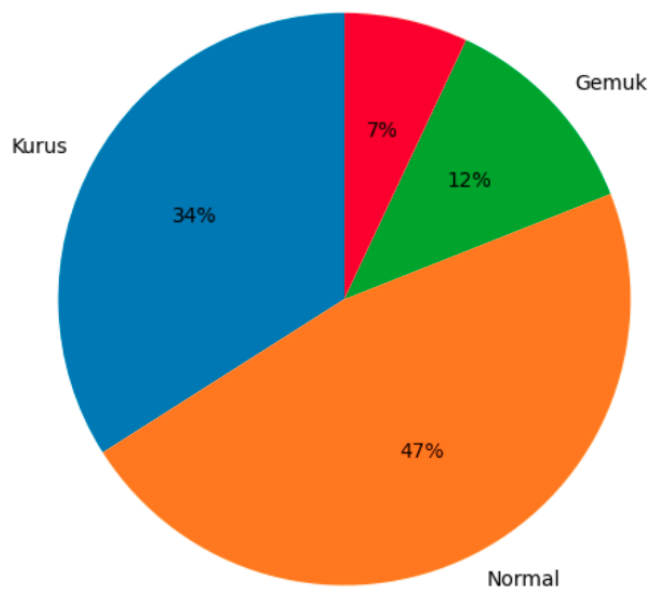
Grafik 6 yaitu distribusi BMI peserta laki-laki menunjukkan bahwa kategori kurus dan normal mendominasi pada sebagian besar kota. Namun demikian, pada beberapa lokasi masih terlihat proporsi peserta dengan kategori gemuk dan obesitas, dengan variasi yang berbeda antar wilayah. Temuan ini menggambarkan perbedaan karakteristik fisik peserta laki-laki pada setiap lokasi pelaksanaan kegiatan.

Grafik 7 yaitu distribusi BMI peserta perempuan menunjukkan variasi kategori BMI antar kota, dengan kecenderungan dominasi kategori normal dan kurus pada sebagian besar lokasi. Meskipun demikian, pada beberapa daerah juga terdapat peserta perempuan dengan kategori gemuk dan obesitas, yang mencerminkan keberagaman karakteristik peserta selama pelaksanaan kegiatan.



Grafik 7. Distribusi Kategori BMI Peserta Perempuan Berdasarkan Daerah

Distribusi Kategori BMI Peserta Secara Nasional
Obesitas



Gambar 3. Distribusi Kategori BMI Peserta Keseluruhan

Gambar 3 menunjukkan distribusi kategori Indeks Massa Tubuh (BMI) peserta secara nasional. Berdasarkan hasil pengolahan data, peserta kegiatan didominasi oleh kategori normal, dengan proporsi mendekati separuh dari keseluruhan peserta. Kategori kurus menempati proporsi terbesar kedua, sementara kategori gemuk dan obesitas muncul dalam proporsi yang lebih kecil. Gambaran ini menunjukkan bahwa secara umum peserta kegiatan memiliki status antropometri yang berada dalam rentang normal pada saat pelaksanaan kegiatan.

Distribusi BMI secara nasional ini digunakan sebagai gambaran umum karakteristik antropometri peserta. Selanjutnya, hasil pelaksanaan kegiatan ditinjau dari aspek kebugaran jasmani, khususnya melalui pengelompokan kategori VO_2max peserta.

Tabel 4. Distribusi Kategori VO_2max Peserta Laki-Laki (%)

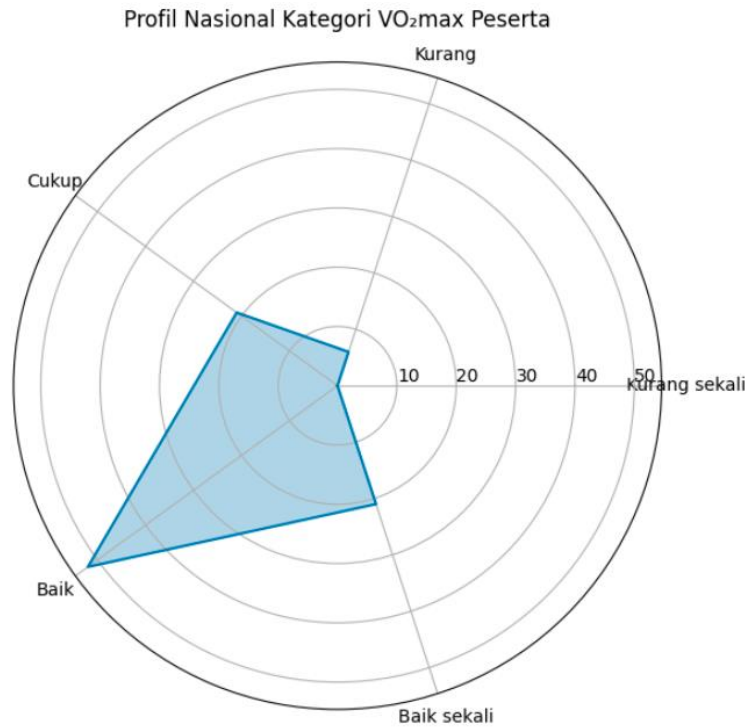
Daerah	Kurang sekali	Kurang	Cukup	Baik	Baik sekali
Bangka Belitung	0,00	0,00	30,00	25,00	55,00
Banten	0,00	5,00	20,00	45,00	30,00
Jogjakarta	0,00	0,00	15,00	50,00	35,00
Ternate	0,00	10,00	30,00	45,00	15,00
Majalengka	0,00	0,00	2,86	84,29	5,71
Padang	0,00	0,00	20,00	40,00	40,00
Lampung	0,00	5,00	25,00	45,00	25,00
Batam	0,00	6,89	10,34	72,41	10,34
Bojonegoro	0,00	0,00	18,00	52,00	30,00

Tabel 5. Distribusi Kategori VO_2max Peserta Perempuan (%)

Daerah	Kurang sekali	Kurang	Cukup	Baik	Baik sekali
Bangka Belitung	0,00	4,00	28,00	53,00	15,00
Banten	0,00	10,00	20,00	55,00	15,00
Jogjakarta	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00
Ternate	0,00	12,00	30,00	45,00	13,00
Majalengka	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00
Padang	0,00	0,00	20,00	55,00	25,00
Lampung	0,00	12,00	18,00	50,00	20,00
Batam	0,00	12,50	12,50	75,00	0,00
Bojonegoro	0,00	5,00	20,00	55,00	20,00

Berdasarkan hasil pengolahan dan estimasi distribusi kategori VO_2max , sebagian besar peserta kegiatan, baik laki-laki maupun perempuan, berada pada kategori baik dan baik sekali. Hampir tidak ditemukan peserta pada kategori kurang sekali, sementara kategori cukup dan kurang muncul dalam proporsi yang relatif kecil di beberapa lokasi. Pola ini menunjukkan bahwa secara umum peserta memiliki tingkat kebugaran kardiorespirasi yang

cukup baik pada saat kegiatan dilaksanakan, meskipun terdapat variasi distribusi antar kota dan jenis kelamin.



Gambar 4. Profil Kategori VO₂max Keseluruhan Peserta

Gambar 4 menampilkan profil nasional kategori VO₂max peserta dalam bentuk radar chart. Visualisasi ini menunjukkan bahwa kategori baik merupakan kategori yang paling dominan pada peserta kegiatan, diikuti oleh kategori cukup dan baik sekali. Sementara itu, kategori kurang muncul dalam proporsi yang relatif kecil, dan hampir tidak ditemukan peserta pada kategori kurang sekali. Pola ini menggambarkan bahwa secara umum peserta kegiatan memiliki tingkat kebugaran kardiorespirasi yang cukup baik pada saat pelaksanaan kegiatan.

3.2 Ringkasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil pengolahan data peserta yang meliputi jenis kedisabilitas, status antropometri, dan tingkat kebugaran jasmani, diperoleh gambaran umum mengenai karakteristik peserta kegiatan. Secara nasional, peserta kegiatan didominasi oleh penyandang disabilitas intelektual, dengan proporsi yang paling besar dibandingkan jenis disabilitas lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan secara umum menyasar peserta dengan karakteristik disabilitas intelektual, sejalan dengan sasaran utama kegiatan yang dilaksanakan.

Ditinjau dari status antropometri, distribusi Indeks Massa Tubuh (BMI) peserta secara nasional menunjukkan bahwa kategori normal merupakan kategori yang paling dominan, diikuti oleh kategori kurus, sementara kategori gemuk dan obesitas muncul dalam proporsi yang lebih kecil. Gambaran ini menunjukkan bahwa secara umum peserta memiliki status antropometri yang berada dalam rentang normal pada saat pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, hasil pengelompokan kategori kebugaran jasmani berdasarkan $VO_2\max$ menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berada pada kategori baik dan baik sekali, dengan proporsi yang lebih kecil pada kategori cukup dan sangat sedikit pada kategori kurang. Secara umum, temuan ini menggambarkan bahwa peserta kegiatan memiliki tingkat kebugaran kardiorespirasi yang cukup baik selama pelaksanaan kegiatan.

3.3 Catatan Pelaksanaan dan Kendala Lapangan

Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa catatan lapangan yang memengaruhi proses pelaksanaan tes kebugaran dan pengumpulan data peserta. Catatan ini disajikan untuk memberikan konteks terhadap hasil yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan. Kendala yang ditemui meliputi keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di beberapa lokasi, karakteristik peserta dengan disabilitas yang menyebabkan pelaksanaan tes tidak selalu berjalan sesuai prosedur standar, serta keterbatasan kompetensi tenaga pendamping dalam pelaksanaan pengukuran kebugaran. Selain itu, meskipun beberapa sekolah telah berstatus inklusif, ketersediaan sarana pendukung kegiatan pembelajaran dan olahraga masih terbatas. Rincian kendala, dampak terhadap pelaksanaan, serta arah tindak lanjut teknis disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Kendala, dampak, dan tindak lanjut yang disarankan

Kendala	Dampak terhadap Pelaksanaan	Tindak Lanjut yang Disarankan
Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di beberapa daerah	Pelaksanaan tes Rockport Walking tidak selalu dapat mengikuti prosedur standar dan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan	Pengadaan atau optimalisasi sarana sederhana yang adaptif serta penyesuaian protokol tes sesuai kondisi lapangan
Karakteristik peserta dengan disabilitas	Peserta sulit dikondisikan, seperti berlari saat tes berjalan atau terdistraksi sehingga tidak menyelesaikan tes	Pendekatan instruksional yang lebih adaptif, pendampingan intensif, serta modifikasi instruksi yang mudah dipahami
Keterbatasan kompetensi dan dukungan pengembangan guru olahraga SLB	Pengukuran denyut jantung dan pelaksanaan tes kebugaran belum dilakukan secara optimal dan konsisten akibat belum tersedianya pengembangan kapasitas secara sistematis	Pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan bagi guru olahraga SLB melalui keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam program pengabdian masyarakat
Keterbatasan sarana di sekolah inklusif	Aktivitas pembelajaran dan olahraga belum dapat dilakukan secara optimal	Penguatan dukungan sarana pembelajaran dan olahraga di sekolah inklusif melalui kolaborasi lintas sektor
Kurangnya pembiasaan aktivitas fisik terstruktur	Peserta belum terbiasa mengikuti aktivitas fisik berkelanjutan sehingga memengaruhi kelancaran tes	Program pembiasaan aktivitas fisik rutin dan terarah yang disesuaikan dengan karakteristik peserta disabilitas

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa peserta kegiatan memiliki karakteristik yang beragam ditinjau dari jenis disabilitas, status antropometri, dan tingkat kebugaran jasmani. Secara nasional, peserta kegiatan didominasi oleh penyandang disabilitas intelektual.

Ditinjau dari status antropometri, sebagian besar peserta berada pada kategori Indeks Massa Tubuh (BMI) normal, sementara kategori kurus, gemuk, dan obesitas muncul dalam proporsi yang lebih kecil. Sementara itu, hasil pengelompokan kebugaran jasmani berdasarkan VO_2max menunjukkan bahwa mayoritas peserta berada pada kategori baik dan baik sekali, yang menggambarkan tingkat kebugaran kardiorespirasi yang relatif baik pada saat pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan juga dihadapkan pada berbagai kendala lapangan yang memengaruhi proses pelaksanaan tes, namun tetap memberikan gambaran awal yang penting mengenai kondisi kebugaran peserta didik dengan disabilitas.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan catatan lapangan yang diperoleh, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Festival Olahraga Disabilitas perlu diarahkan tidak hanya sebagai kegiatan tahunan, tetapi sebagai program pembiasaan aktivitas fisik yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.
2. Pelaksanaan tes kebugaran jasmani perlu dipertahankan dan dikembangkan sebagai alat monitoring perkembangan kebugaran peserta dari waktu ke waktu.
3. Perlu penambahan komponen edukasi aktivitas fisik adaptif dalam pelaksanaan Festival Olahraga Disabilitas agar peserta dan pendamping dapat melanjutkan aktivitas fisik secara mandiri.
4. Diperlukan penguatan kapasitas guru olahraga dan tenaga pendamping di SLB melalui pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan, dengan melibatkan perguruan tinggi.



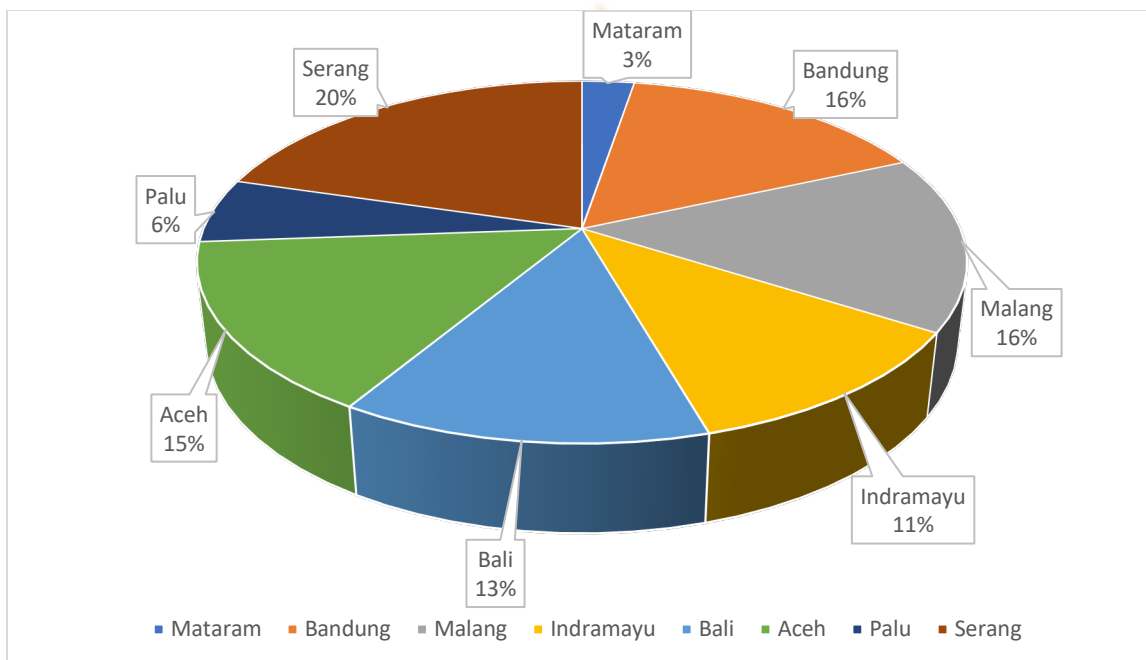
INTERPRETASI DATA

TES KEBUGARAN DALAM KEGIATAN FESTIVAL OLAHRAGA LANJUT USIA & ANAK JALANAN 2025

A. TES KEBUGARAN FESTIVAL OLAHRAGA LANJUT USIA

1. Sebaran Peserta Berdasarkan Kota

Kota							
Mataram	Bandung	Malang	Indramayu	Bali	Aceh	Palu	Serang
5	30	30	22	25	29	11	39



Sebaran peserta berdasarkan kota menunjukkan variasi jumlah partisipasi dari delapan daerah, dengan jumlah peserta tertinggi berasal dari Serang (39 orang), diikuti Bandung dan Malang (masing-masing 30 orang), Aceh (29 orang), Bali (25 orang), Indramayu (22 orang), Palu (11 orang), dan Mataram (5 orang). Variasi ini menunjukkan perbedaan tingkat keterlibatan dan jangkauan kegiatan Festival Olahraga Lansia di masing-masing wilayah. Data sebaran ini memberikan gambaran bahwa kegiatan telah menjangkau berbagai daerah, meskipun dengan





tingkat partisipasi yang belum merata, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang.

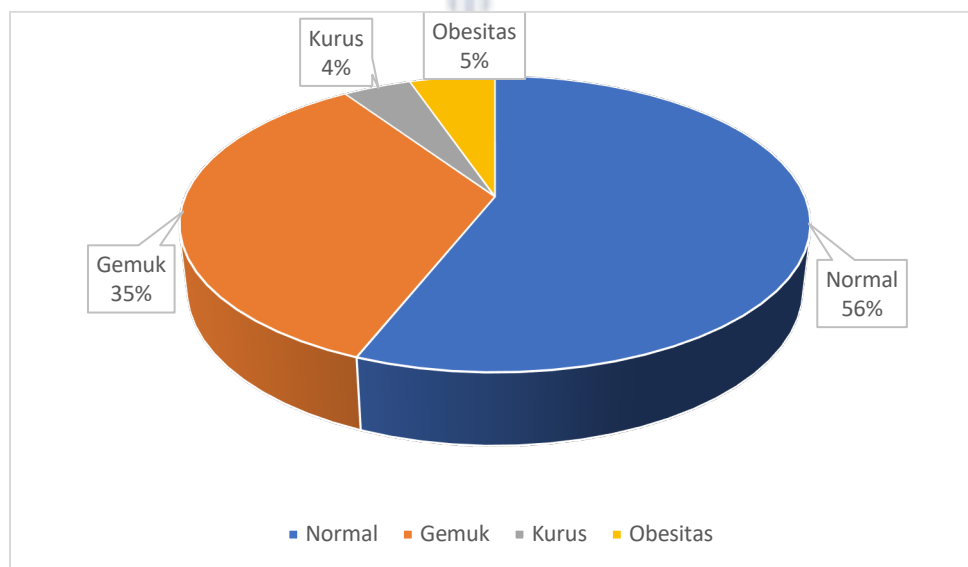
2. Karakteristik Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	
Laki-laki	73
Perempuan	118

Berdasarkan data jenis kelamin, peserta Festival Olahraga Lansia terdiri dari 73 peserta laki-laki dan 118 peserta perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa partisipasi lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam kegiatan olahraga ini. Dominasi peserta perempuan dapat mencerminkan tingkat keterlibatan yang lebih besar dalam aktivitas berbasis kesehatan dan komunitas. Informasi ini memberikan gambaran demografis yang penting dalam memahami karakteristik peserta dan dapat menjadi pertimbangan dalam perancangan program yang inklusif dan sesuai kebutuhan mayoritas peserta.

3. Kategori Indeks Massa Tubuh (BMI)

Kategori BMI	
Normal	107
Gemuk	66
Kurus	8
Obesitas	10





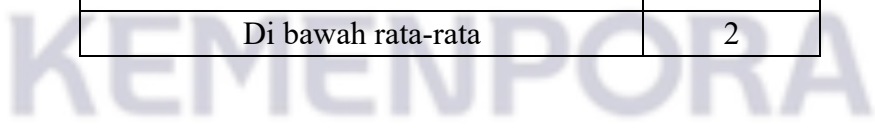
Distribusi kategori BMI pada peserta Festival Olahraga Lansia menunjukkan bahwa 107 peserta berada pada kategori normal, 66 peserta tergolong gemuk, 7 peserta kurus, dan 10 peserta obesitas. Data ini memperlihatkan bahwa lebih dari setengah peserta memiliki status berat badan dalam rentang normal, yang merupakan kondisi yang relatif menguntungkan bagi kesehatan dan kebugaran lansia. Namun demikian, proporsi peserta dengan kategori gemuk dan obesitas juga cukup terlihat, yang menunjukkan adanya variasi kondisi status gizi dalam kelompok ini. Keberagaman kategori BMI ini penting untuk diperhatikan dalam penyusunan program aktivitas fisik agar intensitas dan jenis latihan dapat disesuaikan dengan kondisi tubuh peserta.

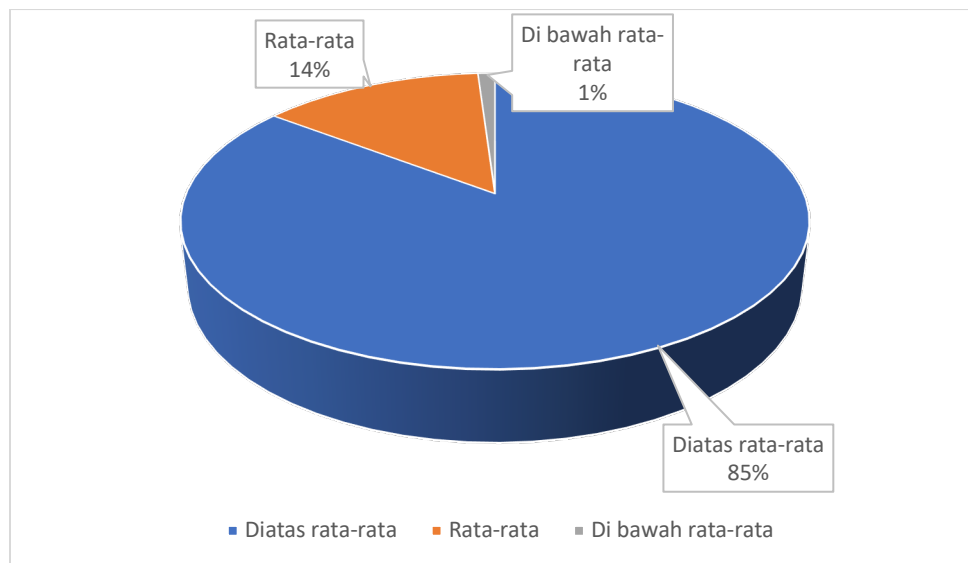
4. Chair Stand Test (Kekuatan Otot Tungkai Bawah)

Berdasarkan data Chair Stand Test, dari total 191 peserta lansia, sebanyak 129 peserta berada pada kategori di atas rata-rata, 49 peserta pada kategori rata-rata, dan hanya 13 peserta berada di bawah rata-rata. Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki kemampuan kekuatan dan daya tahan otot tungkai bawah yang relatif baik. Dominasi kategori di atas rata-rata mengindikasikan bahwa mayoritas lansia masih mampu melakukan gerakan fungsional seperti berdiri dari posisi duduk secara mandiri. Namun, keberadaan peserta pada kategori di bawah rata-rata tetap mencerminkan adanya kelompok lansia dengan keterbatasan kekuatan otot, yang memerlukan perhatian lebih dalam perancangan aktivitas fisik yang aman dan sesuai kemampuan.

5. Chair Sit and Reach Test (Fleksibilitas Tubuh Bagian Bawah)

Chair Sit and Reach Test	
Diatas rata-rata	163
Rata-rata	26
Di bawah rata-rata	2

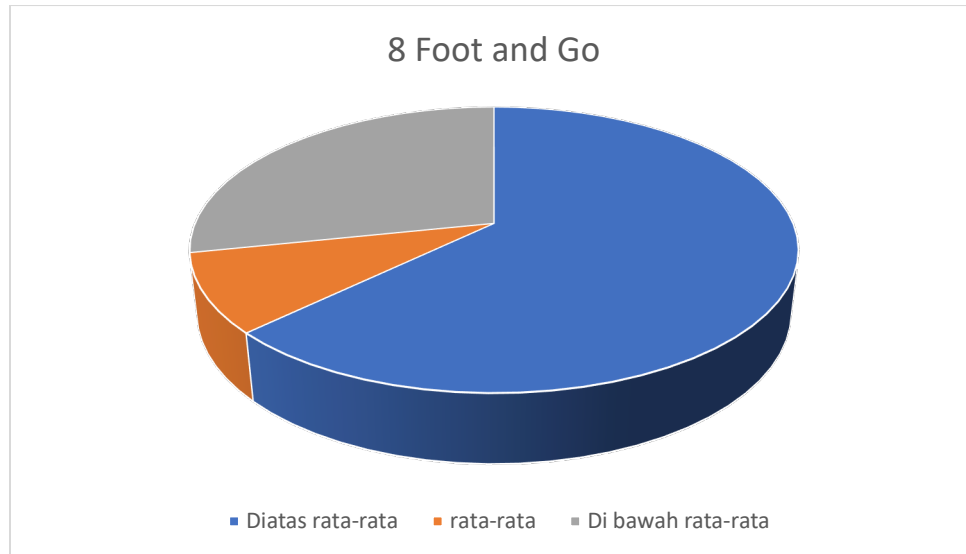




Hasil Chair Sit and Reach Test menunjukkan distribusi yang sangat dominan pada kategori di atas rata-rata, yaitu sebanyak 163 peserta, sementara 26 peserta berada pada kategori rata-rata dan hanya 2 peserta di bawah rata-rata. Pola ini menggambarkan bahwa fleksibilitas tubuh bagian bawah pada sebagian besar peserta lansia berada dalam kondisi yang baik. Tingginya jumlah peserta pada kategori di atas rata-rata menunjukkan bahwa keterbatasan fleksibilitas bukan menjadi permasalahan utama dalam kelompok ini. Meski demikian, tetap terdapat sebagian kecil peserta dengan fleksibilitas yang lebih rendah, yang berpotensi mengalami keterbatasan rentang gerak dalam aktivitas sehari-hari.

6. 8 Foot Up and Go Test (Kelincahan dan Mobilitas Fungsional)

8 Foot Up and Go Test	
Diatas rata-rata	120
rata-rata	17
Di bawah rata-rata	54



Pada tes 8 Foot Up and Go, sebanyak 120 peserta berada pada kategori di atas rata-rata, 17 peserta pada kategori rata-rata, dan 54 peserta pada kategori di bawah rata-rata. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas peserta memiliki kemampuan mobilitas dan keseimbangan yang cukup baik, masih terdapat proporsi peserta yang cukup besar pada kategori di bawah rata-rata. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek kelincahan dan kecepatan bergerak menjadi salah satu tantangan bagi sebagian lansia. Perbedaan hasil ini mencerminkan variasi kemampuan mobilitas fungsional antar peserta, yang penting diperhatikan terutama dalam konteks pencegahan risiko jatuh.

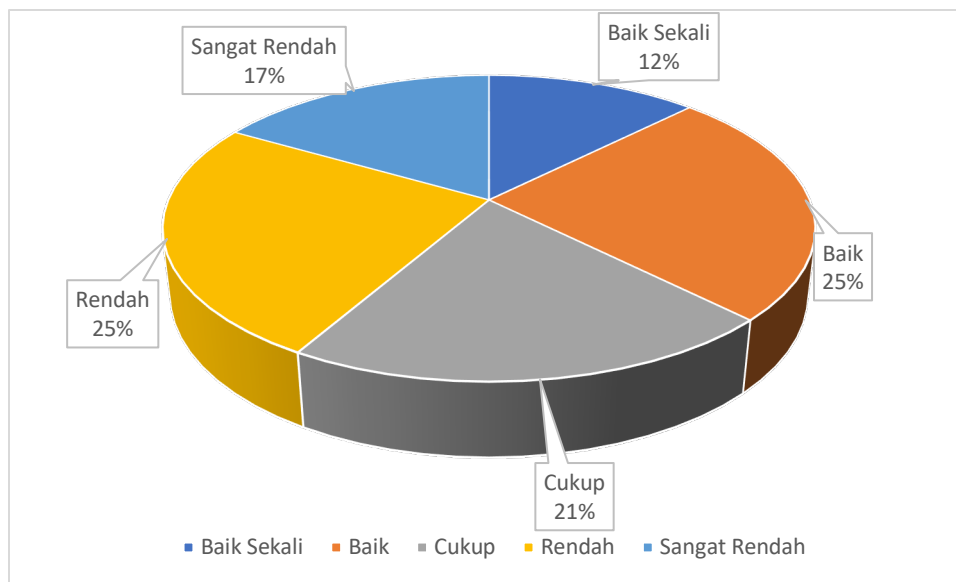
B. TES KEBUGARAN FESTIVAL OLAHRAGA ANAK JALANAN

Festival Olahraga Anak Jalanan ini diikuti oleh peserta yang seluruhnya berasal dari Kota Bandung dengan rentang usia 8 hingga 16 tahun dan komposisi jenis kelamin yang relatif seimbang. Berdasarkan karakteristik fisik, status Indeks Massa Tubuh (BMI) peserta didominasi oleh kategori normal dan kurus, tanpa ditemukannya peserta dengan kategori gemuk maupun obesitas. Secara umum, hasil tes kebugaran menunjukkan adanya variasi kemampuan fisik antar peserta pada berbagai komponen kebugaran, termasuk fleksibilitas, kekuatan dan daya tahan otot, koordinasi gerak, serta daya tahan kardiorespirasi. Variasi hasil tersebut mencerminkan perbedaan kemampuan individu yang wajar dalam kelompok usia anak dan menjadi konteks penting dalam menafsirkan hasil pada setiap item tes secara lebih spesifik.



1. V Sit and Reach (Fleksibilitas)

V Sit and Reach	
Baik Sekali	3
Baik	6
Cukup	5
Rendah	6
Sangat Rendah	4

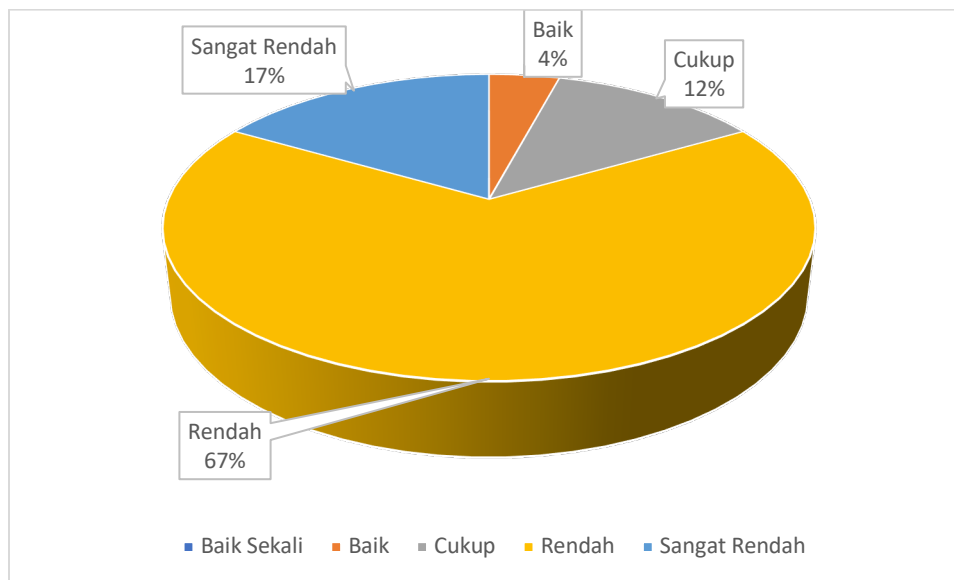


Hasil V Sit and Reach menunjukkan sebaran kemampuan fleksibilitas yang cukup bervariasi pada peserta Festival Olahraga Anak Jalanan. Sebanyak 3 peserta berada pada kategori baik sekali dan 6 peserta pada kategori baik, yang menunjukkan bahwa sebagian peserta telah memiliki fleksibilitas tubuh bagian bawah yang memadai. Namun demikian, masih terdapat 5 peserta pada kategori cukup, serta 10 peserta berada pada kategori rendah dan sangat rendah, yang mengindikasikan adanya keterbatasan rentang gerak pada sebagian peserta. Distribusi ini menggambarkan bahwa fleksibilitas belum merata di seluruh kelompok peserta dan menjadi salah satu komponen kebugaran yang perlu diperhatikan dalam pengembangan aktivitas fisik yang aman dan bertahap.



2. Sit Up 60 Detik (Daya Tahan Otot Perut)

Sit Up 60s	
Baik Sekali	0
Baik	1
Cukup	3
Rendah	16
Sangat Rendah	4

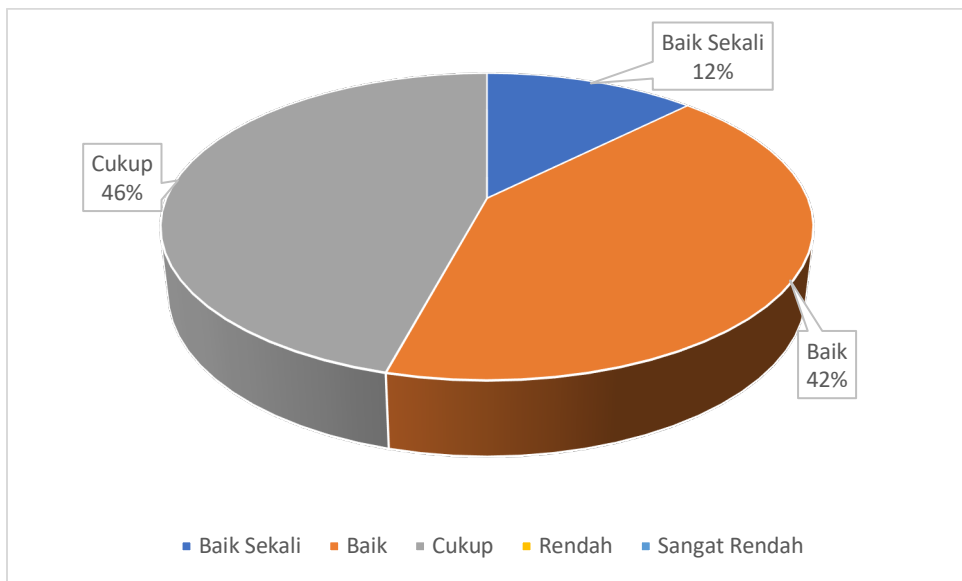


Hasil tes Sit Up 60 detik memperlihatkan kecenderungan capaian yang relatif rendah pada sebagian besar peserta. Dari keseluruhan peserta, 16 peserta berada pada kategori rendah dan 4 peserta pada kategori sangat rendah, sementara hanya 4 peserta yang mencapai kategori cukup hingga baik, dan tidak terdapat peserta pada kategori baik sekali. Pola ini menunjukkan bahwa daya tahan otot perut pada kelompok anak jalanan dalam kegiatan ini masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa komponen kekuatan dan daya tahan otot inti merupakan aspek kebugaran yang relatif lemah dan berpotensi memengaruhi performa gerak serta stabilitas tubuh dalam aktivitas fisik.



3. Squat Thrust 30 Detik (Daya Tahan Otot dan Koordinasi)

Squat Thrust 30s	
Baik Sekali	3
Baik	10
Cukup	11
Rendah	0
Sangat Rendah	0



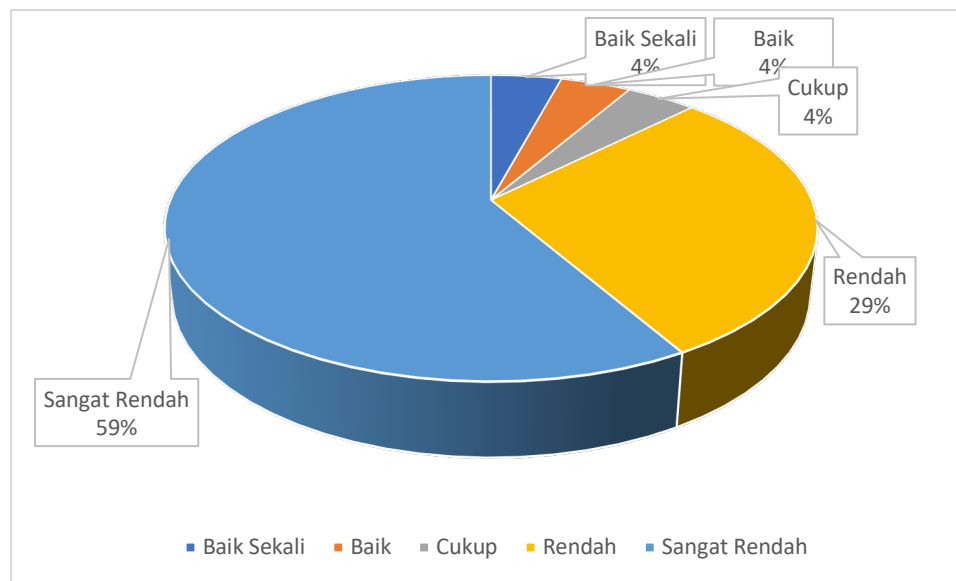
Pada tes Squat Thrust 30 detik, hasil yang diperoleh menunjukkan distribusi yang lebih positif dibandingkan tes kebugaran lainnya. Sebanyak 3 peserta berada pada kategori baik sekali, 10 peserta pada kategori baik, dan 11 peserta pada kategori cukup, tanpa adanya peserta yang berada pada kategori rendah maupun sangat rendah. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta memiliki kemampuan daya tahan otot dan koordinasi gerak yang cukup hingga baik, terutama pada aktivitas yang bersifat dinamis dan melibatkan gerakan seluruh tubuh. Temuan ini menunjukkan bahwa jenis aktivitas fisik yang menuntut gerak cepat dan berulang relatif dapat dilakukan dengan baik oleh mayoritas peserta.





4. Pacer Test (Daya Tahan Kardiorespirasi)

Pacer Test	
Baik Sekali	1
Baik	1
Cukup	1
Rendah	7
Sangat Rendah	14



Hasil Pacer Test menunjukkan bahwa daya tahan kardiorespirasi menjadi komponen kebugaran dengan capaian terendah pada sebagian besar peserta. Sebanyak 14 peserta berada pada kategori sangat rendah dan 7 peserta pada kategori rendah, sementara hanya 3 peserta yang mencapai kategori cukup hingga baik sekali. Distribusi ini menunjukkan bahwa kemampuan daya tahan jantung dan paru-paru pada mayoritas peserta masih terbatas. Kondisi ini menggambarkan bahwa aktivitas fisik yang menuntut ketahanan aerobik berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri bagi kelompok peserta dan merupakan aspek kebugaran yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam program aktivitas lanjutan.



No	Nama Peserta	Usia	Jenis Kelamin	Berat (kg)	Tinggi (cm)	BMI (kg/m ²)	HR Pasca Tes (bpm)	VO2max Prediksi (ml/kg/min)	Kategori 3MIST	30-Second Sit-to-Stand (jumlah)	Kategori	1-Minute Crunch Test (jumlah)	Kategori	Bent Knee Push-Up (jumlah)	Kategori
1	Mega Puspita	39	Perempuan	56	156	23,01	160	38,07	Baik	31	Baik Sekali	40	Baik Sekali	35	Baik Sekali
2	Annisa Putri	19	Perempuan	63	161	24,3	188	39,77	Baik	23	Baik Sekali	63	Baik Sekali	30	Baik Sekali
3	Tiara Putri	21	Perempuan	48	160	18,75	176	42,03	Baik Sekali	31	Baik Sekali	60	Baik Sekali	51	Baik Sekali
4	Monic Chusnul	51	Perempuan	64	155	26,64	100	40,86	Baik Sekali	20	Baik Sekali	24	Sedang	25	Baik
5	Melani Yulawati	26	Perempuan	56	155	23,31	96	48,68	Baik Sekali	20	Baik Sekali	37	Baik	30	Baik Sekali
6	Fitri Setianti	28	Perempuan	67	133	37,88	144	38,99	Baik	30	Baik Sekali	60	Baik Sekali	31	Baik Sekali
7	Riani Rosmawati	23	Perempuan	65	166	23,59	88	50,31	Baik Sekali	17	Baik	57	Baik Sekali	17	Sedang
8	Neng Tesa	25	Perempuan	54	161	20,83	152	43,19	Baik Sekali	27	Baik Sekali	51	Baik Sekali	18	Sedang
9	Krismawati Sindi	24	Perempuan	89	170	30,8	152	40,92	Baik Sekali	24	Baik Sekali	35	Baik	15	Sedang
10	Imas Masitoh	31	Perempuan	43	155	17,9	76	51,03	Baik Sekali	26	Baik Sekali	54	Baik Sekali	35	Baik Sekali
11	Devara Putri P	26	Perempuan	52	157	21,1	132	45,14	Baik Sekali	26	Baik Sekali	53	Baik Sekali	28	Baik
12	Odry Meliani	36	Perempuan	69	156	28,35	96	44,79	Baik Sekali	27	Baik Sekali	42	Baik Sekali	13	Sedang
13	Mira Hemirawati	49	Perempuan	81	165	29,75	136	36,48	Baik	22	Baik Sekali	45	Baik Sekali	16	Sedang
14	Syifa Mega	23	Perempuan	47	160	18,36	144	45,25	Baik Sekali	27	Baik Sekali	52	Baik Sekali	26	Baik
15	Afria Ramadita	27	Perempuan	55	153	23,5	152	41,99	Baik Sekali	21	Baik Sekali	39	Baik Sekali	24	Baik
16	Ulfah Fauziah	34	Perempuan	45	165	16,53	124	45,13	Baik Sekali	22	Baik Sekali	33	Baik	15	Sedang
17	Amelia Putri D.	25	Perempuan	58	150	25,78	152	41,93	Baik Sekali	21	Baik Sekali	40	Baik Sekali	21	Baik
18	Nova Amalia	42	Perempuan	57	155	23,73	60	48,5	Baik Sekali	21	Baik Sekali	44	Baik Sekali	27	Baik
19	Rosita	27	Perempuan	53	164	19,71	116	47,06	Baik Sekali	22	Baik Sekali	33	Baik	20	Baik
20	Nurul Siti Fatimah	33	Perempuan	82	159	32,44	80	46,36	Baik Sekali	27	Baik Sekali	30	Baik	20	Baik

Dokumentasi Bimbingan Teknis



Dokumentasi Festival Olahraga Disabilitas



Dokumentasi Festival Olahraga Lansia



Dokumentasi Festival Olahraga Anak Jalanan



Dokumentasi Festival Olahraga Warga Binaan



